

GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM PROVINSI BANTEN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pencapain tujuan Pembangunan Milienium Provinsi Banten, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium Provinsi Banten Tahun 2011-2015;

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor* 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor* 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang berkeadilan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM PROVINSI BANTEN 2011-2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten.
7. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals selanjutnya disingkat RAD MDGs adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals Provinsi Banten Tahun 2011-2015.

Pasal 2

(1) RAD MDGs disusun dimaksudkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya menyusun rencana kerja sebagai percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

(2) RAD MDGs disusun bertujuan sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup yang disusun dalam Peraturan Gubernur ini sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs;

c. BAB III : PEMANTAUAN DAN EVALUASI;

d. BAB IV : PENUTUP.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 20 Desember 2011
GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR..3..

Lampiran Peraturan Gubernur Banten
Nomor : 38 Tahun 2011
Tanggal : 20 Desember 2011

BAB I
PENDAHULUAN

Millenium Development Goals (MDGs) MDGs Merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Beberapa target MDGs 2015 telah tercapai seperti penurunan prevalensi kekurangan gizi dan proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari. Namun demikian, untuk data capaian target MDGs untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten masih ditemukan disparitas.

Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat nasional dan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk mempercepat pencapaian target MDGs, Bappenas bersama Kementerian/Lembaga telah merumuskan peta jalan (road map) nasional percepatan pencapaian MDGs. Selanjutnya road map tersebut perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing.

MDGs telah diarusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan Propinsi Banten (RPJPD, RPJMD, RKPD), perencanaan SKPD (RENSTRA, RENJA SKPD) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (DPA). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2007-2012 merupakan tahap kedua (tahap revitalisasi-II) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten 2002-2022 (Peraturan Daerah No.11 Tahun 2003) yang telah dirubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yaitu sejak dibentuknya Provinsi Banten berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara administratif terbentuk atas 4 Kabupaten dan 2 Kota yaitu; Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pembentukan daerah otonom baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, dengan demikian hingga Tahun 2008 Provinsi Banten telah memiliki 4 (empat) Kabupaten dan 4 (empat) Kota dengan luas

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDG'S PROVINSI BANTEN 2011-2015



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2011

BAB I
PENDAHULUAN

wilayah 8.651,2 Km^2.

Dokumen RPJMD 2007-2012 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dan menjadi landasan bahan menyusun rencana pembangunan tahunan daerah yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, dokumen RKPD akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas sektoral, lintas sektor, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi "Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa", maka ditetapkan "Misi Pembangunan Provinsi Banten 2007-2012" sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Melakukan Revitalisasi dan Refungsionalisasi Kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat menuju Tata Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Profesional yang Berorientasi pada Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Peran Aktif dan Menggalang Semangat Kebersamaan, Solidaritas dan Kemitraan Seluruh Komponen Pelaku Pembangunan;
3. Menjadikan Masyarakat Banten yang Bersandar pada Moralitas Agama dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Meningkatkan Taraf Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Banten;
5. Memperkuat Struktur Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis dan Memperluas Kesempatan Kerja;
6. Mengembangkan dan Menata Ulang Hubungan antar Industri dengan Orientasi pada Penciptaan Iklim yang Kondusif bagi Investasi, Penggunaan Bahan Baku Lokal Unggulan dan Penciptaan Peluang Usaha;
7. Merevitalisasi Kawasan dan antar Kawasan dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai melalui Pengembangan *"Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah Banten"*.

Dengan demikian, dokumen RPJMD 2007-2012 merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan daerah di Provinsi Banten, yaitu dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita luhur masyarakat Banten yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007–2012, dijabarkan pada 4 (empat) Agenda Pembangunan Daerah yaitu Agenda Pemerintahan, Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agenda Perekonomian serta Agenda Pengembangan Kawasan dan Wilayah. Memperhatikan dan mencermati isu-isu strategis ditingkat Global dan Nasional serta mengacu pada permasalahan pembangunan di wilayah Provinsi Banten, maka ditetapkan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012 sebagaimana berikut : " Percepatan Pembangunan Infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat".

Selanjutnya dalam rangka perwujudan tema tersebut, maka ditempuh melalui pelaksanaan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012 yang dirumpunkan menurut Agenda Pembangunan Daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007–2012, adalah sebagai berikut:

a. **Agenda Pemerintahan**, dengan Prioritas (1) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan;
b. **Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia**, dengan Prioritas (2) Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
c. **Agenda Perekonomian**, dengan Prioritas (3) Ketahanan Pangan, Iklim Investasi dan Usaha serta Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah;
d. **Agenda Pengembangan Kawasan/Wilayah**, dengan Prioritas (4) Infrastruktur Wilayah dan Energi, dan Prioritas; (5) Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

MDGs terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

(1) Menanggulangi kemiskinan dan Kelaparan;
(2) Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua;
(3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
(4) Menurunkan Angka Kematian Anak;
(5) Meningkatkan Kesehatan Ibu;
(6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;
(7) Memastikan Kelestarian Lingkungan; dan
(8) Menbangun Kemitraan Global Untuk Pembangunan.

Waktu pencapaian kedelapan tujuan tersebut adalah 25 tahun dengan tahun dasar 1990. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan pada tahun 2015 dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, bahkan dapat dicapai lebih cepat. Akan tetapi, untuk Rencana Aksi Daerah yang di buat oleh Pemerintah Provinsi hanya sampai dengan target yang ke tujuh.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Provinsi Banten disusun sesuai panduan yang diterbitkan oleh Bappenas, terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, mendeskripsikan gambaran kondisi pencapaian MDGs di Banten dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi; Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, mendeskripsikan tentang arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium masing-masing tujuan di Banten; Bab III Monitoring dan Evaluasi, menggambarkan tentang mekanisme monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium di Provinsi Banten; dan Bab IV Penutup.

Dalam penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Provinsi Banten ini tidak seluruh tujuan (8 tujuan) MDGs dibahas, namun hanya 7 tujuan, mengingat tujuan ke-8 yaitu Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan, kurang relevan untuk dibahas di tingkat daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan menjadi kompetensi Pemerintah Pusat.

Pada bab ini akan digambarkan kondisi pencapaian tujuan pembangunan millenium di Provinsi Banten dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium.

Gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan millenium serta permasalahan dan tantangan di Banten adalah sebagai berikut:

1.1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Banten

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs) diawali dengan mendeskripsikan kondisi capaian masing-masing indikator tujuan. Deskripsi pencapaian tujuan MDGs Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

	**Tujuan 1.Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan**

Tujuan 1.Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk Tujuan ke 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Status Capaian Tujuan 1 MDGs Banten

Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan						
Target 1 A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015						
1.1	Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional	9,56 (2003)	6,32 (2011)	7,5	●	BPS Susenas
1.2	Indeks kedalaman kemiskinan	1,40 (2007)	0,90 (2011)	Berkurang	●	BPS, Susenas
Target 1 B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda						
1.4	Laju PDRB per tenaga kerja	7,61 (2009)	-9,3 (2010)		▶	BPS
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	0,85 (2009)	0,86 (2010)		▶	BPS, Sakernas
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	31,57 (2009)	31,65 (2010)	Menurun	▶	BPS, Sakernas
Target 1 C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015						
1.8	Prevalensi balita dengaan berat badan rendah/kekurangan gizi	14,1 % (2007)	18,5 %	15,5%	▶	Riskesdas
1.8 a	Prevalensi gizi balita buruk	4,4 % (Riskedas 2007)	4,8%	3,6%	▼	Riskesdas
1.8 b	Prevalensi gizi balita kurang	12,2%	13,7%	11,9%	▶	Riskesdas
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:					
	< 1.400 Kkal/kapita/hari		9,71%	8,50%	●	Susenas
	< 2.000 Kkal/kapita/hari		57,31 %	35,32%	●	Susenas

Keterangan :
● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015.

1. **Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari.**

   Dalam pengukuran tingkat kemiskinan BPS Provinsi Banten tidak melakukan pendataan dengan tolok ukur Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 per kapita per hari, karena data ini tidak tersedia (NA= Not Available). Tolok ukur kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan (poverty line) yang berlaku untuk Indonesia.

2. **Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional.**

   Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selama Maret 2010 – Maret 2011, garis kemiskinan naik sebesar 8,96 persen, yaitu dari Rp.208.023 per kapita per bulan pada Maret 2010 menjadi Rp.226.662 per kapita per bulan pada Maret 2011.

   Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada tahun 2003 sebanyak 855.800 jiwa (9,56%). Pada tahun 2006 terjadi peningkatan yang signifikan jumlah penduduk miskin sebanyak 904.300 jiwa atau 9,79%. Meningkatnya angka kemiskinan tersebut dikarenakan adanya migrasi penduduk karena posisi Banten yang berada di perbatasan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kenaikan harga bahan bakar minyak juga menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi sebanyak 758,200 orang (7,16%) dan pada 2011 berkurang menjadi 6,32%. Namun demikian persentase penduduk miskin di Provinsi Banten masih lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu sebesar 13,33% pada 2010 dan 12,49 pada tahun 2011. Kondisi tersebut menempatkan Banten pada peringkat ke 6 dari 33 Provinsi di Indonesia. Namun demikian perlu diwaspadai kemungkinan munculnya penduduk miskin baru akibat kejadian bencana alam dan migrasi penduduk.

   Kecenderungan Proporsi Penduduk Miskin di Banten dari tahun 1990–2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Banten Tahun 1990 – 2011

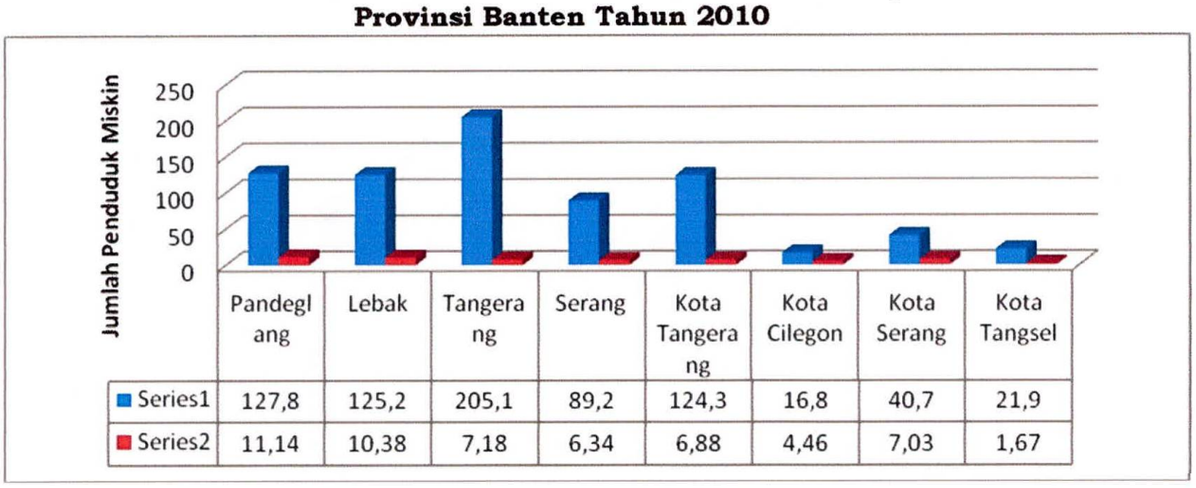
Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	
			Banten	Nasional
1990	na	Na	na	15,10
1999	na	Na	na	13,43

2003	126.214	855,8	9,56	17,42
2004	133.534	779,2	8,58	16,66
2005	150.209	830,5	8,86	15,97
2006	160.688	904,3	9,79	17,75
2007	169.485	886,2	9,07	16,58
2008	191.943	816,7	8,15	15,42
2009	222.292	788,1	7,64	14,15
2010	208.023	758,2	7,16	13,33
2011	226.662	690,5	6,32	12,49

Sumber : diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2011

Gambaran distribusi penduduk miskin di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2010



Sumber : diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009. Kota Tangsel masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang

Berdasarkan data kemiskinan tahun 2010 (Berita Resmi Statistik 1 Juli 2011) tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya di atas angka Provinsi Banten (7,16%). Terdapat sebanyak 3 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Pandeglang (11,14%), Lebak (10,38%) dan Tangerang (7,18%).
2. Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya di bawah angka Provinsi Banten (7,16%). Terdapat sebanyak 5 Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Serang (6,34%), Kota Tangerang (6,88%), Kota Cilegon (4,46) dan Kota Serang (7,03), Kota Tangerang Selatan (1,67).

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Data Indeks Kedalaman

Kemiskinan pada tahun 2009 sebesar 1,32% kemudian pada tahun 2010 menurun menjadi 0,99% atau terjadi penurunan sebesar 0,33% dan pada tahun 2011 menjadi 0,90. Kondisi ini sesuai dengan yang ditargetkan dalam MDGs yakni harus terjadi penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan sampai dengan tahun 2015.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 758,200 orang (7,16%). Pengukuran kemiskinan menggunakan garis kemiskinan yang berbeda antara daerah perdesaan dan perkotaan. Di daerah perkotaan garis kemiskinan pada tahun 2010 sebesar Rp 220.771 per kapita/bulan, sedangkan di perdesaan sebesar Rp 188.741 per kapita/bulan. Pada periode Maret 2009-2010 penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 8.461 ribu orang, sedangkan di perdesaan berkurang sebanyak 10.503 ribu orang. Besarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada tahun 2010, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 0,79 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 1,30 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2005 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Banten
Bulan Maret 2005-2011

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan		
		Kota	Desa	Kota+Desa
1	2005	na	na	na
2	2006	na	na	na
3	2007	1,09	1,86	1,40
4	2008	1,04	1,25	1,12
5	2009	0,93	1,91	1,32
6	2010	0,79	1,30	0,99
7	2011	0,68	1,36	0,90

Sumber : Kemiskinan Makro Susenas, BPS

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

1. Laju PDRB per Tenaga Kerja

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja diperoleh dari total PDRB dibagi jumlah seluruh tenaga kerja di Provinsi Banten. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja dapat menunjukkan produktivitas tenaga kerja, sehingga laju PDRB per tenaga kerja memberikan gambaran mengenai kecepatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Banten.

Pada tahun 2009 laju PDRB Banten per tenaga kerja sebesar 7,61%. Kemudian pada tahun 2009 laju PDRB per tenaga kerja tercatat cukup tinggi yaitu mencapai -9,3. Angka penurunan ini terjadi karena peningkatan jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan laju PDRB per tenaga kerja di Provinsi Banten pada tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Perkembangan Laju PDRB per Tenaga Kerja di Provinsi Banten
Tahun 2005 – 2009

No	Tahun	PDRB Berdasarkan Harga Konstan (Juta Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	PDRB per Tenaga Kerja berdasarkan Harga Konstan	Laju PDRB per Tenaga Kerja (%)
1	2005	58.106 948,22			
2	2006	61.341 658,64			
3	2007	65.046 775,77	3.383.661	19,22	
4	2008	68.802.910,03	3.660.895	18,76	
5	2009	72.031 120,61	3.704.778	19,44	7,61
6	2010		4.583.085		-9,3
7	2011				

Sumber : Data BPS yang telah diolah

2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Rasio kesempatan kerja untuk penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas menggambarkan perkembangan tenaga kerja yang memasuki lapangan kerja. Rasio kesempatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2007 sebesar 0,52. Rasio ini meningkat pada tahun 2009 menjadi 0,55. Upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja di Banten antara lain tergantung pada besarnya penanaman modal di daerah dalam rangka penyerapan kerja, kebijakan peningkatan kesempatan berusaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan regulasi serta iklim usaha yang kondusif. Perkembangan rasio kesempatan kerja untuk penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Rasio Kesempatan Kerja Untuk Penduduk Kelompok Usia 15 Tahun ke Atas
Provinsi Banten Tahun 1990 - 2011

Tahun	Angkatan Kerja yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Kelompok usia 15 tahun ke atas (orang)	Rasio Kesempatan kerja untuk penduduk 15 tahun ke atas
1990	na	na	na
2005	na	na	na
2006	na	na	na
2007	3.383.661	6.522.900	0,52
2008	3.668.895	6.674.895	0,55
2009	3.704.778	6.770.781	0,55

2010	4.791.877	7.402.379	0,64
2011	5.164.681	7.591.280	0,68

Sumber: Data BPS Provinsi Banten yang diolah

Jumlah angkatan kerja di Banten terus menglami perubahan penambahan, pada tahun 2007 berjumlah 4,016 juta (usia 15 tahun ke atas), tahun 2008 bertambah 309.302 orang atau sekitar 7,70 persen menjadi 4,33 dan tahun 2009 mengalami penambahan sebanyak 31.785 orang atau sekitar 0,73 persen menjadi 4,36 juta (Hasil Susenas). Penambahan tersebut terjadi karena adanya penambahan pada komponen angkatan kerja yang bekerja bertambah sebanyak 35.883 orang, sedangkan pengangguran turun sebanyak 4.098 orang. Berarti secara kuantitas, kondisi ketenagakerjaan di Banten pada tahun 2009 semakin membaik karena kesempatan kerja yang tercipta masih lebih besar bila di bandingkan dengan penambahan angkatan kerja baru. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2011 mencapai 5.264.681 orang, bertambah sebesar 372.704 orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada Februari 2010 sebesar 4.791.977 orang.

Lebih dari 50 persen dari total tenaga kerja Provinsi Banten berdomisili di Kabupaten Tangerang (termasuk Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang) yaitu Kabupaten/Kota yang terkenal dengan pusat bisnis dan konsentrasi industri. Akibatnya, serapan tenaga kerja disektor perdagangan dan sektor industri begitu mendominasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Kedua sektor tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja masing-masing sebesar 26,18 persen dan 22,77 persen. Sementara itu, sektor pertanian berada diposisi ketiga dalam penerapan tenaga kerja yaitu dengan serapan sebesar 20,12 persen dari keseluruhan tenaga kerja, dan terlihat mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Kondisi kesempatan kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terbagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang berada di atas angka kesempatan kerja Provinsi Banten yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Serang karena kesempatan kerjanya bertambah dibandingkan jumlah angkatan kerjanya.
2. Kabupaten/Kota yang berada di bawah angka kesempatan kerja Provinsi Banten yaitu Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Pandegalang.

3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja secara mandiri atau berwirausaha. Pada tahun 2007 jumlah tenaga kerja yang bekerja mandiri sebesar 0,34% dari angkatan kerja. Kemudian pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja yang bekerja mandiri sebesar 0,33% dan menurun menjadi 0,32% pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan masih banyak tenaga kerja yang berusaha sendiri dan dibantu tenaga kerja yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga baik pada skala usaha mikro, kecil dan kegiatan usaha di sektor informal perlu perhatian untuk mendapatkan fasilitasi keterampilan dan perlindungan tenaga kerja. Besarnya Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja di Provinsi Banten
Tahun 2007-2011

No	Status pekerjaan Utama	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Berusaha sendri (orang)	859.086	916.409	873.186	1.006.453	747.558
2	Berusaha dibantu Buruh tidak tetap (orang)	485.370	585.788	518.655	461.977	523.722
3	Berusaha dibantu buruh tetap (orang)	105.946	102.513	103.554	94.449	126.302
4	Bekerja bebas di pertanian (orang)	151.978	165.770	147.755	203.333	194.626
5	Pekerja bebas di non pertanian	139.467	172.472	172.662	200.661	240.244
Jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga (orang)			1.200.131	1.169.567	1.330.227	1.202.746
Jumlah		3.383.661	3.668.895	3.704.2778		

kesempatan kerja (Orang)					
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja			31,57	31,65	

Sumber :BPS Provinsi Banten 2005-2011 (diolah)

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

1. **Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi**

   Terdapat hubungan timbal balik antara kekurangan gizi dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah terjadinya kekurangan gizi selain disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang gizi seimbang bagi sebagian masyarakat terutama di perdesaan dan kelompok rentan. Proporsi Balita yang kekurangan gizi berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin. Semakin kecil pendapatan penduduk maka persentase Balita yang kekurangan gizi semakin meningkat, dan sebaliknya semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, semakin rendah persentase Balita yang kekurangan gizi. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi pada tahun 2007 sebesar 14,1%, naik menjadi 18,5% pada tahun 2010 sedangkan target MDGs tahun 2015 sebesar 15,5%. Diperkirakan target MDGs tersebut akan dapat tercapai di Banten.

   a. **Prevalensi Balita gizi buruk**

      Gizi buruk dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor langsung maupun tidak langsung yang saling terkait. Secara langsung disebabkan oleh dua hal, yaitu: asupan makan yang kurang dan penyakit penyerta/infeksi. Berdasarkan data Riskesdas laporan dari Kabupaten/Kota, prevalensi gizi buruk di Banten berdasarkan pada tahun 2010 sebesar 4,8% sedangkan target MDGs tahun 2015 sebesar 3,6%.

   b. **Prevalensi Balita gizi kurang**

      Prevalensi kekurangan gizi pada Balita pada tahun 2010 sebesar 13,7%, sedangkan target MDGs pada tahun 2015 sebesar 11,9%. Melalui prioritas program dan kegiatan yang semakin intensif utamanya pada kelompok rentan dan kekurangan gizi, diharapkan Banten mampu mencapai target MDGs yang telah ditetapkan.

2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum.

Pola konsumsi pangan yang kurang mencukupi kebutuhan energi dan gizi akan mengakibatkan terjangkitnya penyakit serius, bahkan kematian. Asupan makanan yang seimbang sangat penting bagi ketahanan tubuh terhadap penyakit. Penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat minimum sehingga berdampak buruk bagi kesehatan dan status gizi, sebagian besar disandang oleh masyarakat miskin. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya peningkatan dan perbaikan konsumsi terutama bagi masyarakat miskin sangat mendesak untuk dilakukan.

a. Kategori < 1.400 Kkal/kapita/hari

Proporsi penduduk di Banten dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum atau <1.400 Kkal/kapita/hari pada tahun 2009 sebesar 9,71%, sedangkan target MDGs tahun 2015 sebesar 8,50%. Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus agar proporsi penduduk dengan asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal/kapita/hari tersebut dapat diturunkan sesuai target MDGs.

b. Kategori < 2.000 Kkal/kapita/hari

Proporsi penduduk di Banten dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum atau < 2.000 Kkal/kapita/hari pada tahun 2009 sebesar 57,31%, masih jauh apabila dibandingkan target MDGs tahun 2015 sebesar 35,32%. Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan sinergis, sehingga proporsi penduduk dengan asupan kalori kurang dari 2.000 Kkal/kapita/hari tersebut dapat diturunkan seoptimal mungkin.

	**Tujuan 2.** **Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua**

Mencapai pendidikan dasar untuk semua adalah upaya yang dilakukan agar penduduk usia sekolah dasar seluruhnya dapat menikmati pendidikan SD/ MI/Paket A pada tahun 2015. Tujuan ke-2 ini memiliki tiga indikator yaitu: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI/Paket A dan Angka melek huruf penduduk usia 15 – 24 tahun perempuan dan laki-laki. APM SD/MI/Paket A adalah hasil bagi antara jumlah siswa SD/MI/Paket A usia 7 – 12 tahun

pada satu wilayah administrative dibagi penduduk usia 7 – 12 tahun. Status pencapaian tujuan ke-2 MDGs di Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Status Capaian Tujuan 2 MDGs Banten

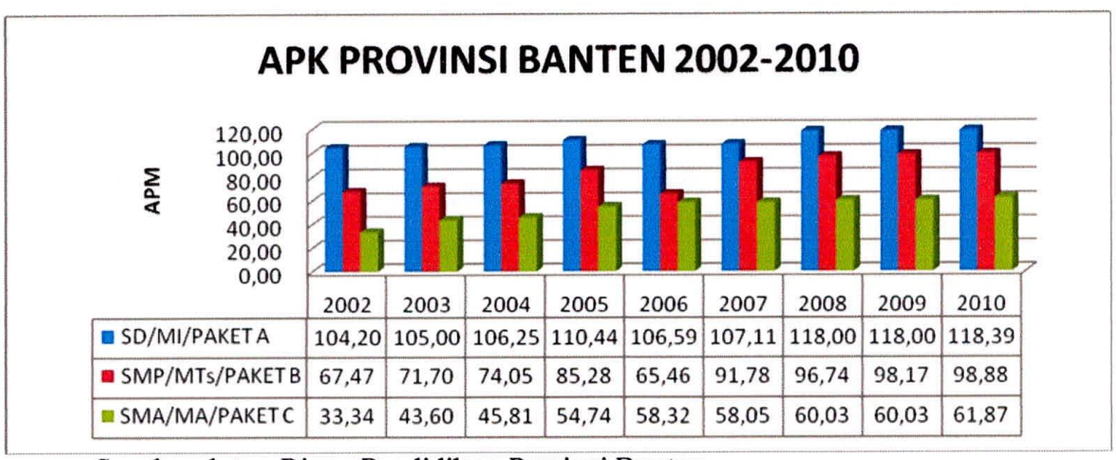
Indikator		Acuan Dasar	Saat Ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 2 A : Mencapai pendidikan Dasar Untuk Semua						
Target 2 A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar						
2.1	Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A	92,98 % (2005)	98,76% (2010)	100%	▶	**BPS**
2.2	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI	97% (2005)	97% (2010)	100%	▶	BPS
2.3	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun,perempuan dan laki-laki		99,94% (2009)	100%	●	BPS
Keterangan : ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus						

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Capaian target tujuan kedua MDGs untuk indikator APM SD/MI/Paket A dan angka melek huruf penduduk usia 15 - 24 tahun Provinsi Banten sudah menuju pada pencapaian target 2015 (On Track). Pada tahun 2009 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A telah mencapai 118%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,48% dan APK SMP/MTs/Paket B 98,17%. Pada jenjang Pendidikan Dasar, berdasarkan data indikator pembangunan bidang pendidikan, terdapat peningkatan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B sejak tahun 2007/2008, yakni APM SD/MI/Paket A pada tahun 2007/2008 sebesar 96,13% meningkat menjadi 98,76% pada tahun 2010. Dibandingkan dengan rata-rata nasional (sebesar 95,23%), posisi Banten sudah berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar mengalami peningkatan dari tahun 2007/2008 hingga tahun 2010. Apabila trend peningkatan tersebut dapat dipertahankan, maka Banten diharapkan dapat mencapai target MDGs pada jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2015.

Perkembangan capaian APK dan APM SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada gambar 1.2 dan 1.3. Grafik tersebut menggambarkan bahwa selama kurun waktu tersebut baik APK maupun APM SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B dan SMA/SMK/MA/ Paket C menunjukkan peningkatan.

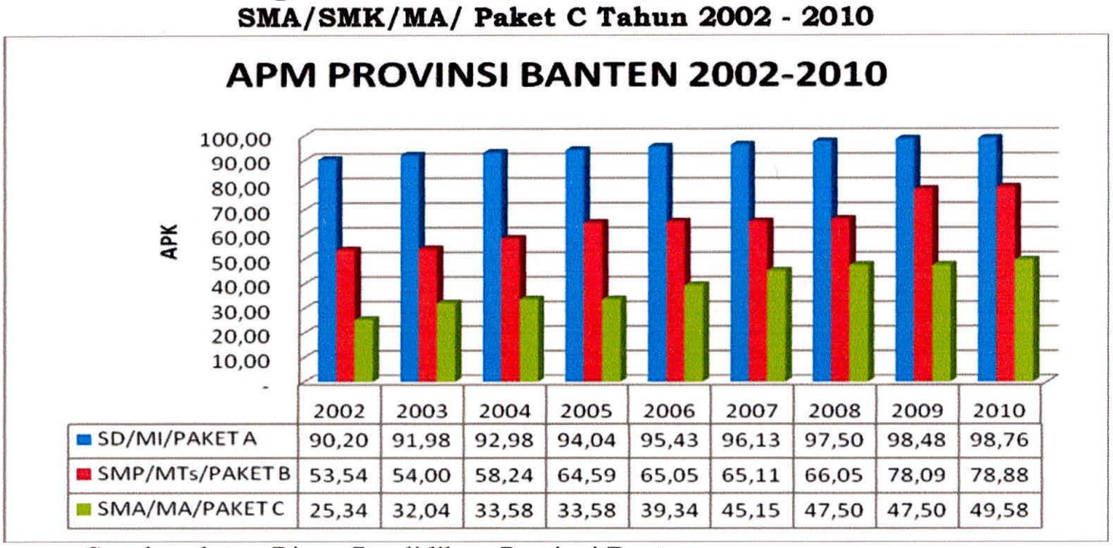
Grafik 1.2
Perkembangan APK SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ Paket B dan SMA/SMK/MA/ Paket C Tahun 2002-2010



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI/PAKET A	104,20	105,00	106,25	110,44	106,59	107,11	118,00	118,00	118,39
SMP/MTs/PAKET B	67,47	71,70	74,05	85,28	65,46	91,78	96,74	98,17	98,88
SMA/MA/PAKET C	33,34	43,60	45,81	54,74	58,32	58,05	60,03	60,03	61,87

Sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Grafik 1.3
Perkembangan APM SD/MI/ Paket A, SMP/MTs/ Paket B dan SMA/SMK/MA/ Paket C Tahun 2002 - 2010



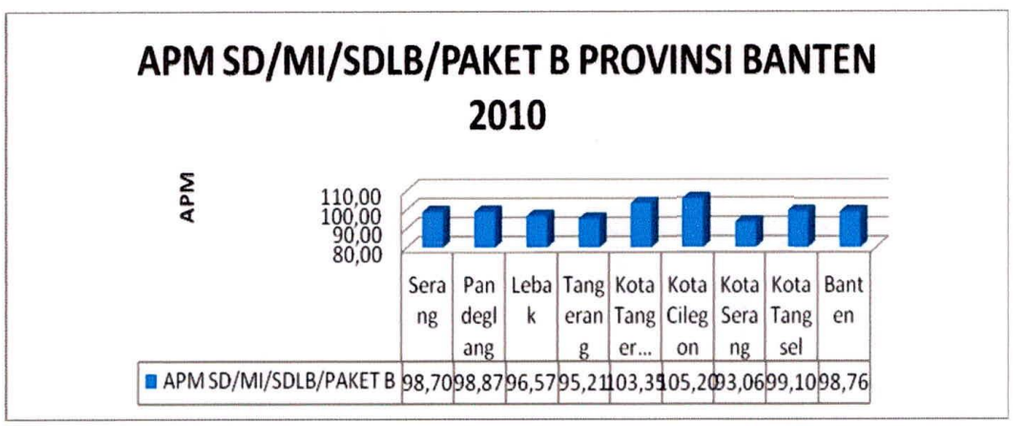
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SD/MI/PAKET A	90,20	91,98	92,98	94,04	95,43	96,13	97,50	98,48	98,76
SMP/MTs/PAKET B	53,54	54,00	58,24	64,59	65,05	65,11	66,05	78,09	78,88
SMA/MA/PAKET C	25,34	32,04	33,58	33,58	39,34	45,15	47,50	47,50	49,58

Sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Didukung oleh peraturan perundangan dan berbagai kebijakan serta upaya keras dari seluruh stakeholder, pembangunan pendidikan di Banten berhasil mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, antar kelompok pendapatan, dan antar daerah terutama pada tingkat Sekolah Dasar. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar (SD/MI/Paket A) telah melampaui angka 100 %. Pada tahun 2009/2010 APK SD/MI/Paket A telah mencapai 118% dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 98,48 %. Pada tahun yang sama, APK dan APM jenjang SMP/MTs/Paket B masing-

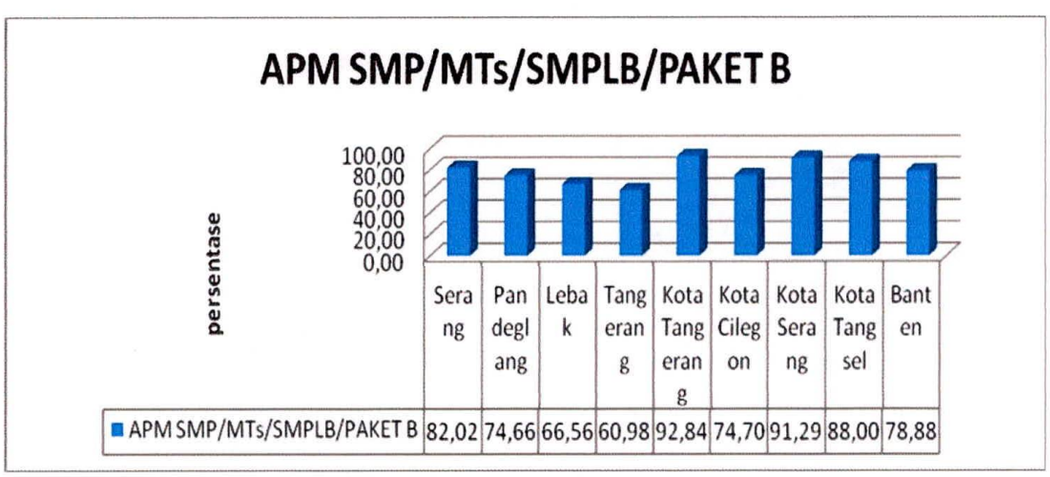
masing mencapai 98,17% dan 78,09%. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD/MI/Paket A), disparitas partisipasi pendidikan antar Kabupaten/ Kota sudah sangat kecil. Data Dinas Pendidikan menunjukan bahwa APM SD/MI/Paket A di semua Kabupaten/ Kota telah mencapai lebih dari 95 %, kecuali Kota Serang dengan APM sebesar 93,06%. Sebaran APM SD/MI/Paket A pada masing-masing Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa masih terdapat 3 Kabupaten/Kota yang capaian APM SD/MI/Paket A masih berada di bawah rata-rata Banten. Namun demikian, angkanya sudah berada di atas kisaran 93,06%. Capaian APM SD/MI/Paket A terendah adalah Kota Serang, dengan APM SD/MI/Paket A sebesar 93,06%. Hal ini disebabkan bahwa kecenderungan bahwa orang tua menyekolahkan anak ke SD/MI di bawah usia 7 tahun. Grafik 1.4 menunjukkan capaian APM SD/MI/Paket A Kabupaten/ Kota di Banten Tahun 2010.

Grafik 1.4
Capaian APM SD/MI/Paket A Kabupaten/Kota di Banten
Tahun 2009/2010



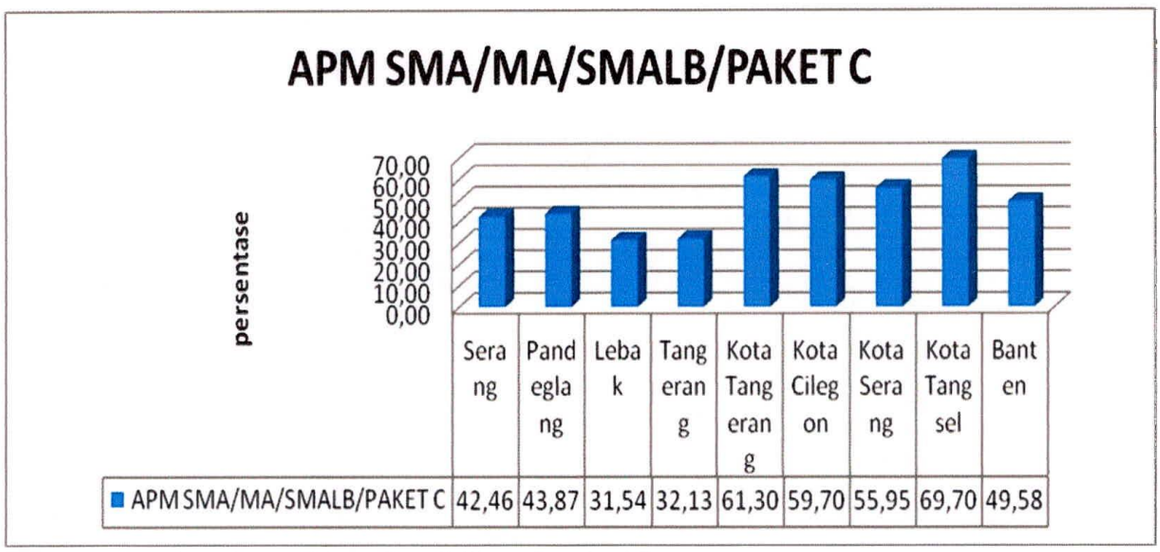
Sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Grafik 1.5
Capaian APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten/Kota di Banten
Tahun 2009/2010



Sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Grafik 1.6
Capaian APM SMA/MA/Paket C Kabupaten/Kota di Banten
Tahun 2009/2010



Sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Jumlah murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI atau mengikuti UASBN pada tahun pelajaran tertentu dalam kurun waktu 6 tahun kemudian, merupakan indikator untuk mengukur jumlah siswa yang tidak melanjutkan atau Drop Out (DO). Data pada tahun ajaran 2004/2005 siswa kelas 1 SD/MI sebanyak 215.075 orang dan siswa yang lulus UASBN tahun 2009/2010 sebanyak 200.021 orang, artinya jumlah siswa kelas 1 yang berhasil menamatkan jenjang SD/MI sebesar 93,00% berarti masih ada siswa yang DO sebanyak 7,00%. Pada tahun ajaran 2005/2006 jumalh murid kelas satu sebanyak 212,302 siswa, dan siswa SD/MI yang lulus UASBN pada tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 205,450 siswa, artinya siswa kelas 1 yang berhasil menamatkan jenjang SD/MI sebesar 97% berarti siswa SD/MI yang DO sebanyak 3,23%. Hal ini menunjukan adanya kenaikan siswa kelas 1 yang mengikuti UASBN sebanyak 3,77% atau penurunan angka putus sekolah pada tingkat SD/MI sebesar 3,77% selama periode 2009 s/d 2010 terlihat pada grafik.

Tabel 1.8
Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan UASBN Dua Tahun Berturut-turut

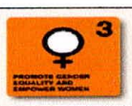
Jumlah Siswa SD/MI	T.P 2004/2005 215.075	T.P 2005/2006 212.302
Jumlah Lulusan UASBN SD/MI	T.P 2009/2010 200.021	T.P 2010/2011 205.450
Siswa Drop Out SD/MI	T.P 2009.2010 15.054	T.P 2010/2011 6.852
Pesentase Siswa SD/MI kls 1 yang ikut UASBN	T.P 2009/2010 93.00 %	T.P 2010/2011 96.77%

Persentase Siswa SD/MI kls 1 yang DO/tidak mengikuti UASBN	T.P 2009/2010 7.00%	T.P 2010/2011 3.23%
Persentase kenaikan siswa SD/MI kls 1 yang ikut UASBN/penurunan angka DO	3.77%	

Sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Angka melek huruf penduduk Provinsi Banten berusia 15-24 tahun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Angka melek huruf telah digunakan sebagai indikator tercapainya Education for All (EFA) dan MDGs serta berperanan penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. Melek huruf merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses informasi dan pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.

Data Dinas Pendidikan tahun 2009-2010 menunjukan bahwa angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Provinsi Banten mencapai 99,94% baik untuk laki-laki maupun perempuan. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2007/2008. Angka melek huruf pada tahun 2009 sebesar 99,96% untuk laki-laki dan 99,92% untuk perempuan. Peningkatan angka melek huruf terjadi antara lain karena peningkatan partisipasi penduduk usia 15 – 24 tahun yang buta huruf untuk mengikuti program pendidikan keaksaraan dan pendidikan non formal serta meningkatnya proporsi siswa yang menamatkan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B.



Tujuan 3.
Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu (1) Rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; (2) Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan (3) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD. Rasio perempuan terhadap laki-laki tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah angka hasil bagi APM perempuan jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan APM laki-laki pada jenjang pendidikan yang sama. Apabila hasil bagi berada pada kisaran 95 – 105, dapat disimpulkan dalam kategori terjadi kesetaraan gender. Terjadi ketimpangan gender apabila hasil bagi lebih besar dari 105 atau lebih kecil dari 95. Gambaran status capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9
Status Capaian Tujuan 3 MDGs Banten

Indikator		Acuan dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 3 : Mendorong Kesataraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						
Target 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.						
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi					
	- Rasio APM perempuan /laki-laki di SD/MI/Paket A	0,94 (2007)	1 (2010)	1	●	BPS
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,90 (2007)	0,93 (2010)	1	▶	BPS
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	0,93 (2007)	0,84 (2010)	1	▶	BPS
	- Rasio APK perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	0,85 (2006)	0,84 (2010)	1	▶	BPS
3.2	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0,95 (2006)	1 (2010)	1	●	BPS
3.3	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	14,62 (2009)	11,05 (2010)	50%	▼	BPS
3.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	6,66 (2004)	17,64 (2009)	30%	▼	BPS
Keterangan : ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus						

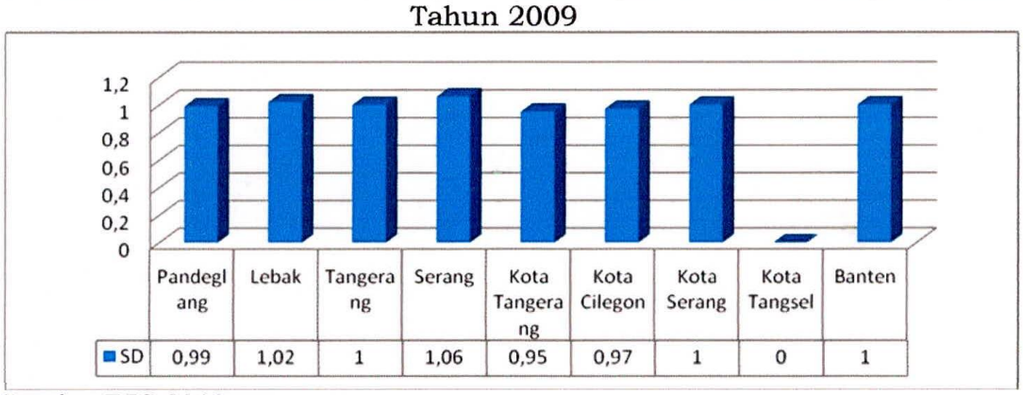
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A sebesar 1 meningkat dari tahun 2007 sebesar 0,94, SMP/MTs/ Paket B 0,93 tahun 2010 lebih besar dari tahun 2007 sebesar 0,90, sementara untuk rasio SMA/MA/Paket C

terjadi penurunan dari 93% tahun 2007 menjadi 0,84 tahun 2010. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun telah mencapai 1 pada tahun 2010, meningkat dari tahun 2007 sebesar 0,95. Dengan demikian, Banten sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya penurunan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebesar 3,57%. Pada tahun 2009 sebesar 14,62 dan tahun 2010 sebesar 11,05. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD Provinsi Banten pada Pemilu terakhir juga mengalami peningkatan dari 6,66% (2004) menjadi 17,64% (2009). Berdasarkan Data BPS tahun 2009/2010, APM baik perempuan maupun laki-laki, pada SD/MI/Paket A sudah mencapai lebih dari 97,50%.

Disparitas antar Kabupaten/Kota masih merupakan masalah utama, terutama pada tingkat pendidikan menengah. Data BPS 2009/2010 menunjukan bahwa disparitas gender APM perempuan terhadap laki-laki pada SD/MI/Paket A berkisar antara 0,95 (Kota Tangerang) dan 1,06 (Kabupaten Serang) seperti terlihat pada grafik 1.7. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada SMP/ MTs/ Paket B berkisar antara 0,92(Kota Cilegon) dan 1,26 (Kota Serang) seperti terlihat pada grafik 1.8, sedangkan pada SMA/MA/Paket C berkisar antara 0,48 (Kabupaten Lebak) dan 1,10 (Kabupaten Serang) terlihat pada grafik 1.9. Dari data tersebut terlihat bahwa APM perempuan terhadap laki-laki untuk Jenjang SD/MTs/Paket A perbedaan antar Kabupaten kecil sekali. Sementara untuk jenjang SMP/MTs/Paket B dan SMA/MA/Paket C perbedaannya relatif tidak begitu jauh.

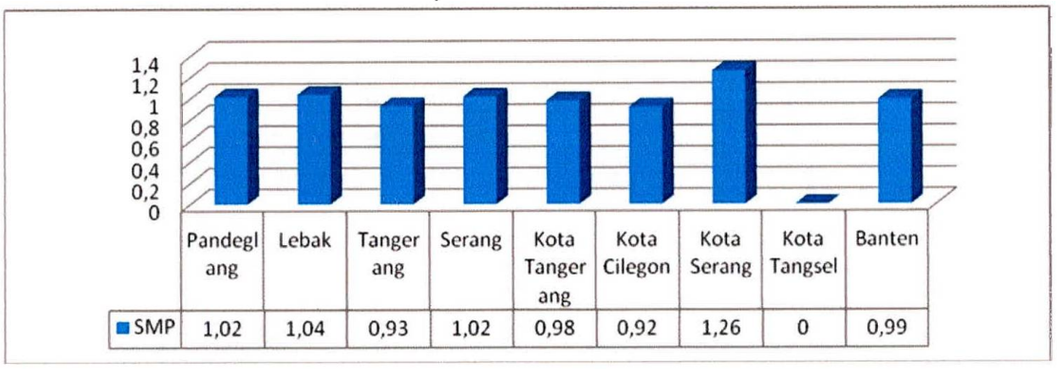
Grafik 1.7
Rasio APM SD/MI/Paket Perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten/Kota Tahun 2009



	Pandeglang	Lebak	Tangerang	Serang	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kota Tangsel	Banten
SD	0,99	1,02	1	1,06	0,95	0,97	1	0	1

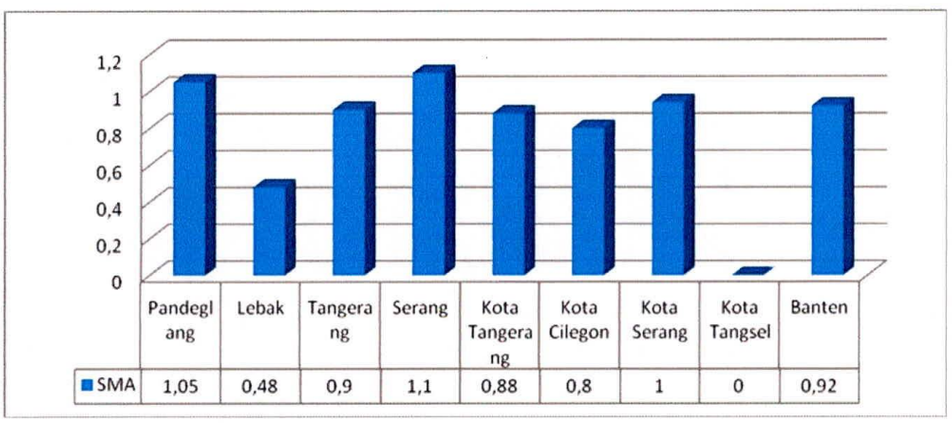
Sumber BPS 2010

Grafik 1.8
Rasio APM SMP/MTs/Paket B Perempuan terhadap laki-laki di Kabuten/Kota Tahun 2009



Sumber BPS 2010

Grafik 1.9
Rasio APM SMA/MA/Paket C Perempuan terhadap laki-laki di Kabuten/Kota Tahun 2009



Sumber BPS 2010

Angka melek huruf perempuan dan laki-laki kelompok usia 15-24 tahun telah mencapai sasaran MDGs. Pada tahun 2009/2010, Disparitas gender angka RAD MDGs Banten melek huruf antara perempuan dan laki-laki Provinsi Banten kelompok usia 15-24 tahun sudah mencapai 100.

Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Data BPS tahun 2008 menunjukan bahwa TPAK perempuan tidak menunjukan peningkatan yang signifikan, hanya berkisar sekitar 46,26 %. Angka tersebut jauh lebih rendah jika di bandingkan dengan TPAK laki-laki yang rata-rata 83,07 % selama periode yang sama.

Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian memperlihatkan kecenderungan penurunan, yang termasuk pekerja upahan di sektor non pertanian adalah buruh/ karyawan/ pegawai dan pekerja bebas yang bekerja di lapangan kerja sektor non pertanian. Data BPS

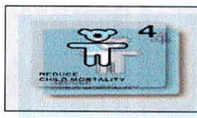
menunjukan bahwa kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan non pertanian mengalami penurunan, dari sebesar 14,62 % pada tahun 2009 menjadi sebesar 11,05 % pada tahun 2010. Pekerja perempuan cenderung lebih memilih pekerjaan dengan status karyawan atau pekerja keluarga (tidak menanggung resiko/kerugian)

Kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga diukur berdasarkan proporsi perempuan di lembaga-lembaga publik (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif), menunjukan adanya peningkatan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari proporsi perempuan yang menduduki kursi di DPRD Provinsi mengalami peningkatan dari 6,66 % pada tahun 2004 menjadi 17,64 % pada tahun 2009. Pada tahun 2009, jumlah anggota DPRD Provinsi Banten sebanyak 85 orang, terdiri dari 71 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Total anggota DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Banten berjumlah 375 orang dengan 48 diantaranya adalah Legislator perempuan. Sedangkan anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Banten berjumlah 21 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Di bidang politik, kemajuan yang dicapai antara lain adalah dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, disusul dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan dengan jelas 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang diajukan untuk calon anggota Legislatif. Gambar 1.10 menunjukkan proporsi kursi yang dididuduki perempuan di DPRD.

Tabel 1.10
Proporsi Kursi yang dididuduki Perempuan di DPRD Kab/Kota Se Banten
Tahun 2009

No	Tingkatan	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah Kursi
1	Provinsi Banten	70	82,4	15	17,7	85
2	Kabupaten Serang	47	94	3	8	50
3	Kota Serang	37	82,2	8	17,8	45
4	Kota Cilegon	28	80	7	20	35
5	Kabupaten Tangerang	46	92	4	8	50
6	Kota Tangerang	44	88	6	12	50
7	Kabupaten Lebak	42	84	8	16	50
8	Kabupaten Pandeglang	45	90	5	10	50
9	Kota Tangerang Selatan	38	84,4	7	15,6	45
	Total	397	86,3	63	13,7	460

Sumber Data : Kesbangpol Provinsi Banten



Tujuan 4.
Menurunkan Angka Kematian Anak

Target yang akan dicapai pada tujuan ini adalah: menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015 dengan indikator (1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup; (2) Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup; dan (3) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak.

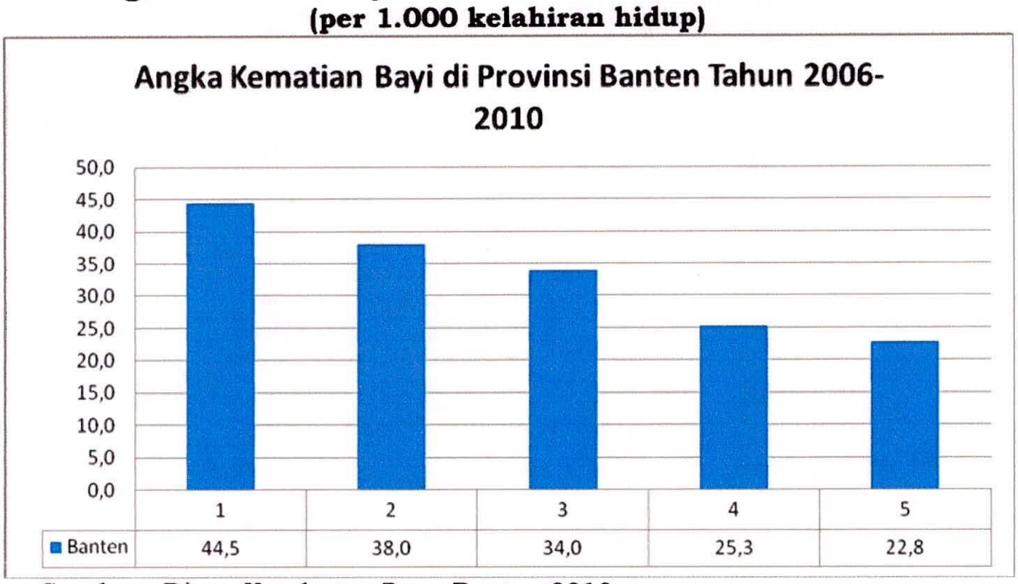
Tabel 1.11
Status Capaian Tujuan 4 MDGs Banten

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015						
4.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	25,3 (2009)	22,8 (2010)	23		Dinkes, BPS
4.2	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup	56 (2007)	58 (2007)	32		Dinkes BPS SDKI 2007
4.3	Proporsi anak berusia 1 tahun diimnunisasi campak	74,6 % (2007)	96,3% (2010)	95%		Dinkes SDKI Banten
Keterangan : Sudah Tercapai Akan Tercapai Perlu Perhatian Khusus						

Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015

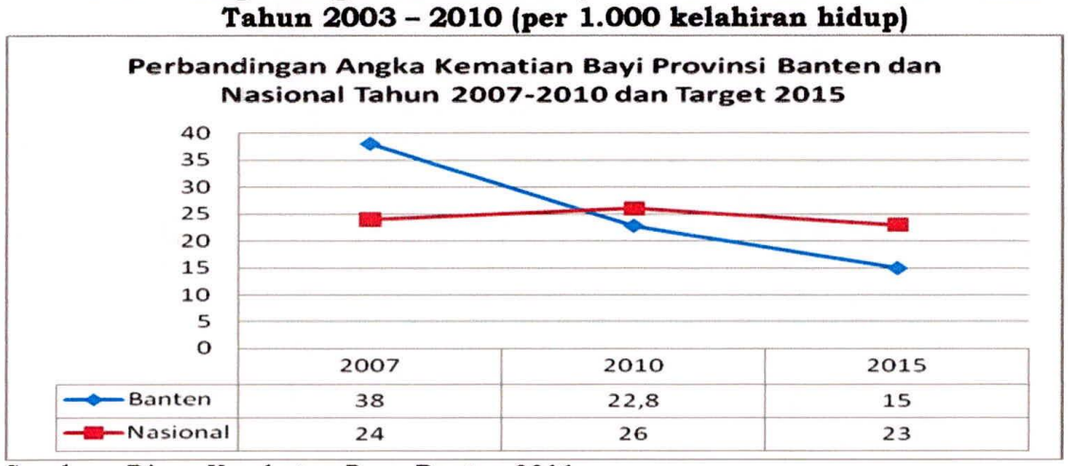
Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Banten dari tahun 2006 sampai dengan 2010 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2006 AKB sebesar 44,5/1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2010 menurun menjadi 22,8/1.000 kelahiran hidup. Dibandingkan target MDGs tahun 2015 sebesar 23/1.000 kelahiran hidup, kondisi ini telah mencapai target. Pada Tahun 2015 target capaian AKB Provinsi Banten sebesar 15/1.000 kelahiran hidup.

Grafik 1.10
Angka Kematian Bayi Provinsi Banten Tahun 2006 – 2010
(per 1.000 kelahiran hidup)



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten 2010

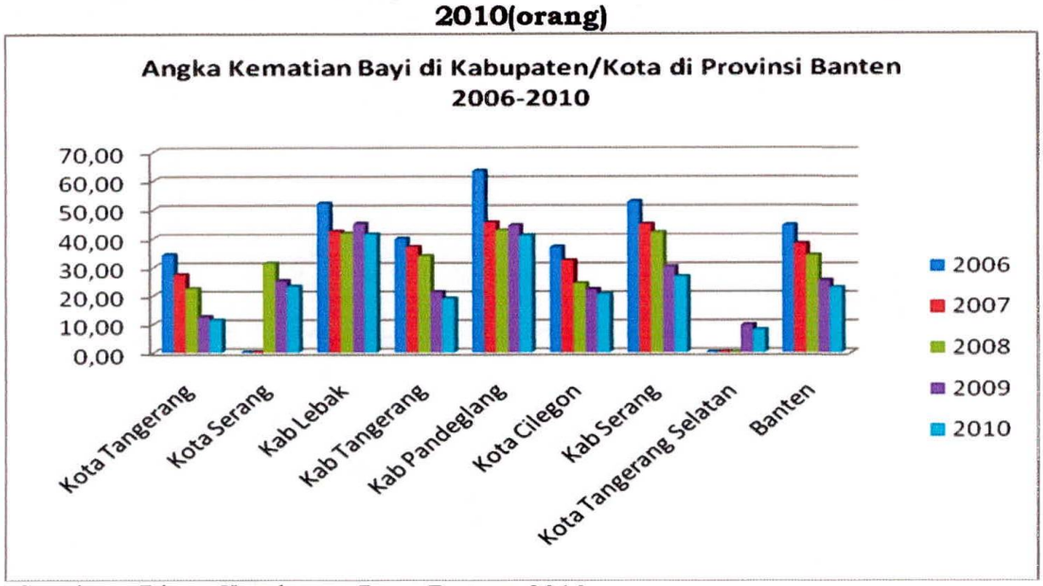
Grafik 1.11
Perbandingan Angka Kematian Bayi Provinsi Banten dan Nasional
Tahun 2003 – 2010 (per 1.000 kelahiran hidup)



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten 2011

Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Banten tahun 2010 sejumlah 22,8/1.000 kasus yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota dengan kasus kematian bayi tertinggi adalah Kabupaten Lebak (41,4/1.000 kasus), Kabupaten Pandeglang (40,8/1.000 kasus) dan Kabupaten Serang 26,6/1.000 Kasus.

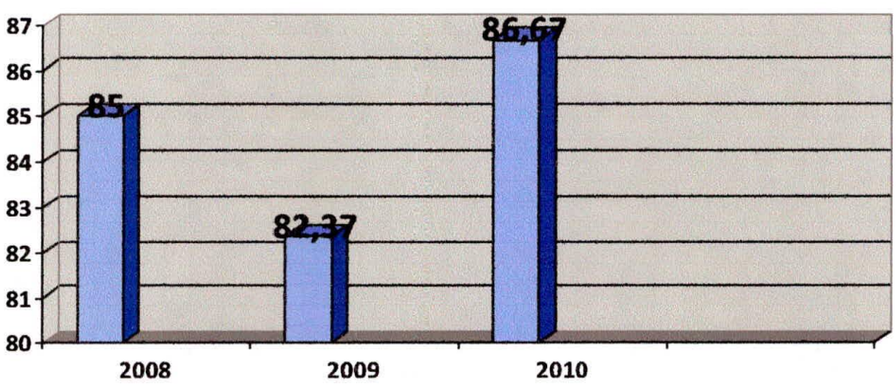
Grafik 1.12
Jumlah Kematian Bayi di Kab/Kota Se Banten Tahun 2006-2010(orang)



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten 2010

Menurunnya AKB di Banten disebabkan oleh meningkatnya pelayanan kesehatan pada bayi. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN-1) di Provinsi Banten tahun 2010 sebesar *86,67* %, dengan cakupan Kabupaten/ Kota tertinggi adalah *Kota Tangsel* (*101,8* %) dan Kabupaten dengan cakupan terendah adalah Kabupaten *Lebak* (*75,7* %).

Grafik 1.13
Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Kab/Kota se-Banten Tahun 2010 (%)



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2010

Cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 29 hari– 2 bulan, 1 kali pada umur 3 – 5 bulan, satu kali pada umur 6 – 8 bulan dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2010 sebesar *83,90* %, Kabupaten/Kota dengan cakupan tertinggi adalah Kota *Tangsel* (*99,5* %) dan Kabupaten dengan cakupan terendah adalah *Kota Tangerang* (*74,97* %). Sampai dengan tahun 2010 cakupan kunjungan bayi

yang masih di bawah capaian Banten sebanyak *4 (Empat)* Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten *Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kota Serang, dan Kota Tangerang.*

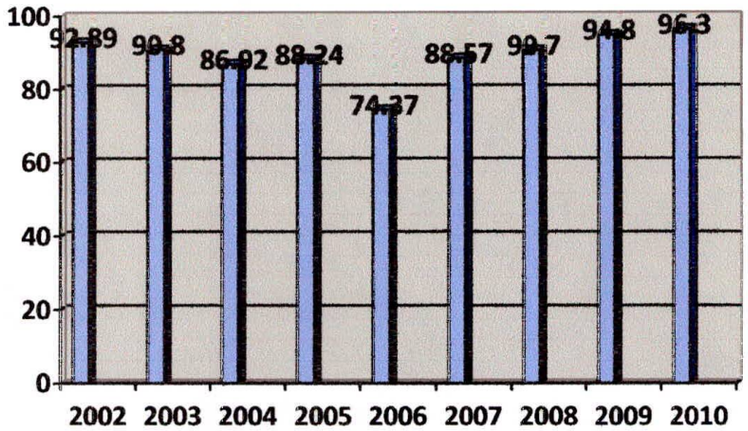
AKBA Provinsi Banten dari tahun 2002 (56/ 1.000 kelahiran hidup) sampai dengan tahun 2007 (58/1.000 kelahiran hidup) cenderung stagnan. AKBA Provinsi Banten Masih diatas angka Nasional tahun 2002 sebesar 46/1.000 kelahiran hidup dan 44/1.000 kelahiran hidup. Angka Provinsi Banten dan Nasional masih jauh dengan dengan target MDGs tahun 2015 (23/ 1.000 kelahiran hidup). Dibutuhkan kerja keras dari level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat mencapai target MDGs 2015.

Jumlah kasus kematian anak balita di Provinsi Banten tahun 2010 sejumlah 168 kasus yang tersebar di 8 (Delapan) Kabupaten/Kota. Kabupaten / Kota dengan kasus kematian anak balita terbanyak adalah Kota Cilegon (16 kasus), Kabupaten Lebak (98 kasus) dan Kabupaten Serang (20 kasus). Kabupaten / Kota dengan kasus terkecil adalah Kab. Tangerang (1 kasus), Kota Tangerang Selatan (5 kasus).

Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Banten sebesar *76,26* %, dimana Kabupaten / Kota dengan cakupan tertinggi adalah *Kota Tangerang Selatan* (*99,34* %) dan Kabupaten dengan cakupan terendah adalah *Kab. Pandeglang* (*60,3* %). Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Kabupaten/Kota yang masih dibawah capaian Banten sebanyak 3 (Tiga) Kabupaten/Kota meliputi Kota Cilegon, Kab. Pandeglang, Kab. Serang.

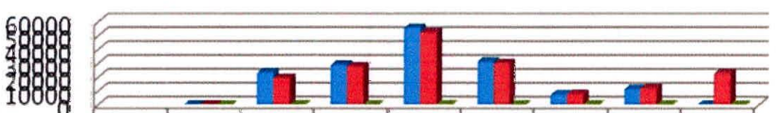
Proporsi anak - anak berusia 1 tahun diimunisasi campak di Provinsi Banten pada tahun 2010 sebesar 96,3 % naik dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 94,8 %. Target MDGs untuk indikator ini telah tercapai. Namun demikian, masih diperlukan berbagai upaya meningkatkan dan mempertahankan cakupan pelayanan imunisasi campak sehingga target Provinsi Banten tahun 2015 sebesar 95% dapat tercapai. Imunisasi merupakan salah satu cara dalam rangka pencegahan penyakit menular dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita. Peningkatan imunisasi sebesar 3 persen dapat menurunkan kematian anak balita sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup (UNSD 2009, ADB).

Grafik 1.14
Proporsi Anak-anak Berusia 1 Tahun diimunisasi Campak Di Provinsi Banten 2002-2010



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten 2010 (diolah)

Grafik 1.15
Bayi Berusia 1 Tahun diimunisasi Campak Di Kabupaten/Kota Tahun 2009



	LEBAK	PANDEGLANG	SERANG	TANGERANG	KOTA TANGERANG	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGSEL
JUMLAH BAYI	0	23.142	28.660	55.398	31.252	7.437	11413	0
DIIMUNISASI CAMPAK	0	19.187	27.527	52.007	29.903	7.555	11681	22569
%	0	83	96	94	96	102	102	0

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten 2010 (diolah) (Kab. Lebak tidak ada data, Kota Tangsel hanya ada jumlah bayi yang diimunisasi campak)

Tujuan 5.
Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target yang akan dicapai pada tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Target 5a: menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 dengan indikator sebagai berikut:
   a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
   b. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
   c. Cakupan pelayanan antenatal (K4 atau empat kali kunjungan)
2. Target 5b: mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 dengan indikator sebagai berikut:
   a. Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun saat ini, cara modern.

b. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 – 19 tahun) per 1,000 perempuan usia 15-19.

c. Unmetneed (kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).

Status pencapaian tujuan 5 MDGs di Banten sebagai berikut:

Tabel 1.12
Status Capaian Tujuan 5 MDGs Banten

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Treget MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 5 : Meningkatkan kesehatan Ibu						
Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015						
5.1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	203,2 (2009)	187,3 (2010)	102	▼	Dinkes BPS
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)	68,86 % (2009)	85,5% (2010)	90%	●	Dinkes
5.3	Cakupan pelayanan antenatal (K4)	81,51% (2007)	84,43 % (2010)	95%	▶	Dinkes, SDKI
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015						
5.2	Angka pemakaian kontrasepsi/Contrac eptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (semua cara)	55,4% (SDKI 2007)	55,5% (2010)	65%	▶	BKKBN, SDKI 2007
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/Contrac eptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (cara modern)	55,4 % (2007)	55,5% (2010)	65%	▶	SDKI 2007 BKKBN Dinkes
5.4	Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	23 (2007)	21,6	30	▶	SDKI 2007 BKKBN Dinkes
5.5	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana / KB yang tidak terpenuhi)	9% (SDKI 2007)	7,3% (2010)	6%	▶	BKKBN Dinkes

Keterangan :
● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus

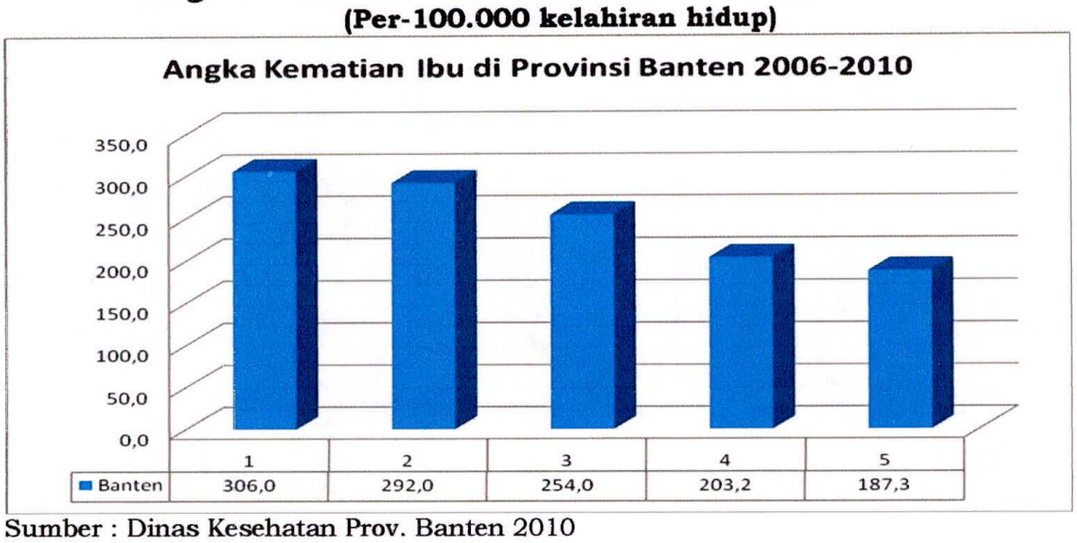
Target 5A: Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 - 2015

Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Banten tahun 2006 (306/ 100.000 kelahiran hidup) mengalami penurunan pada tahun 2010 (187,3/ 100.000 kelahiran hidup). Dibandingkan dengan target MDGs (102 per 100.000 kelahiran hidup), target Banten tahun 2015 (102 per 100.000 kelahiran hidup) pada kondisi akan tercapai. Upaya yang dilakukan untuk menekan AKI di Banten antara lain melalui penerapan program Jampersal sehingga persalinan dilakukan dengan gratis, rencana penerbitan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelayanan persalinan yang harus berada di sarana kesehatan dan dilakukan oleh petugas/tenaga kesehatan, peningkatan kualitas puskesmas melalui pelayanan PONED dan Rumah Sakit melalui pelayanan PONEK dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

Menurunnya AKI ini diantaranya disebabkan oleh meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan sebanyak empat kali/ K4) dan meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan. Sampai dengan tahun 2010 cakupan K4 sebesar 72,6% dan kelahiran hidup dengan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) sebesar 85,5%.

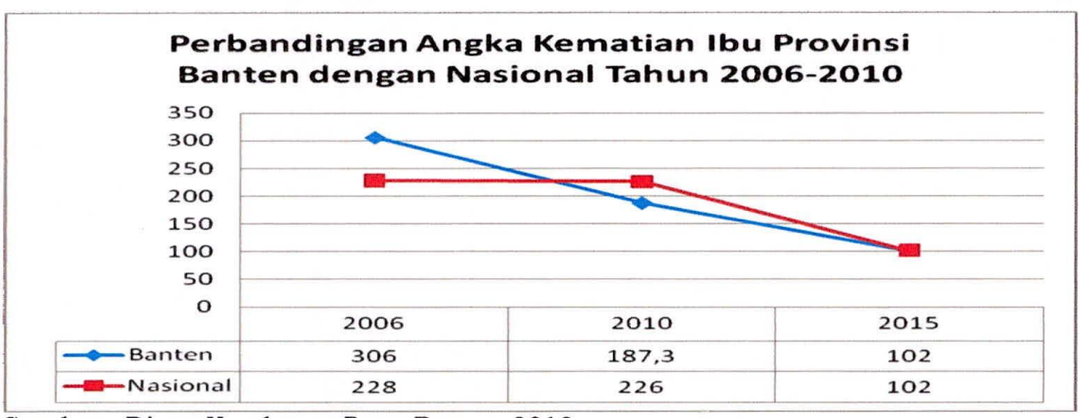
Intervensi kunci yang mempengaruhi AKI mencakup pelayanan antenatal yang baik, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan yang memadai untuk kehamilan resiko tinggi termasuk pencegahan ibu hamil komplikasi, program keluarga berencana untuk menghindari kehamilan dini, mengurangi tingkat aborsi tidak aman dan post abortion care serta program-program perubahan perilaku di kalangan perempuan usia subur. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebesar *70* % Puskesmas dan persentase RS Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebesar 40 %.

Grafik 1.16
Angka Kematian Ibu Provinsi Banten Tahun 2006 – 2010
(Per-100.000 kelahiran hidup)



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten 2010

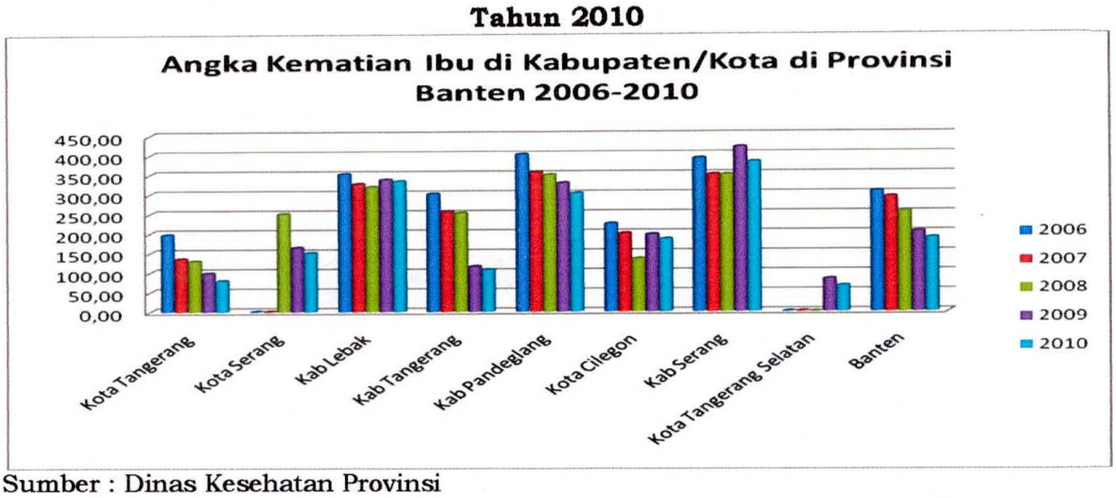
Grafik 1.17
Perbandingan Angka Kematian Ibu Provinsi Banten dengan Nasional Tahun 2006 – 2010 serta Target 2015



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten 2010

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Banten sampai dengan tahun 2010 sebesar *372* kasus, dengan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Serang sebanyak *99* kasus, diikuti Kabupaten Lebak (71 kasus) sebagaimana pada grafik berikut:

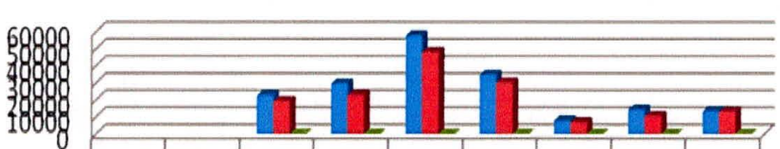
Grafik 1.18
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Kab/Kota Se Banten
Tahun 2010



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2009 sebesar 79,33 %. Dibandingkan dengan target MDGs kondisi ini sudah tercapai dan pada tahun 2015 akan mencapai target Banten (100%). Sampai dengan tahun 2010 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota yang masih dibawah rata-rata Banten sebesar 85,5 Kabupaten/Kota, yaitu *Kab. Serang, Kab. Lebak.*

Grafik 1.19
Jumlah Ibu Melahirkan di Tolong Tenaga Kesehatan di Kab/Kota Se Banten
Tahun 2009



	LEBAK	PANDEGLANG	SERANG	TANGERANG	KOTA TANGERANG	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGSEL
JUMLAH		22549	29.529	57.608	34.515	7.809	14161	13212
DITOLONG TENKES		19031	22.742	47.889	30.081	6.588	10315	12982
%		84,4	77,02	83,13	84,36	84,36	72,84	98,26

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

Pada tahun 2010 persentase cakupan peserta KB aktif (CPR) perempuan menikah (15-49 tahun) cara modern sebesar 55,5% mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2007 (54,4%) membutuhkan kerja

keras untuk mencapai Target MDGs di tahun 2015. Target Banten tahun 2015 (65%), telah tercapai

Sampai dengan tahun 2010 jumlah persalinan pada anak remaja (15-19 tahun) per 1.000 perempuan sebesar 21,6 menurun dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 23 (SDKI 2007), dan diharapkan pada tahun 2015 turun menjadi 19,7. Capaian ini sudah melampaui target MDGs 2015.

Cakupan antenatal care (K4) Banten Tahun 2010 (84,43%) mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2007 (81,51%), dan diharapkan dapat mencapai target pada tahun 2015 sebesar 95%. Jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi (unmetneed) mengalami penurunan, pada tahun 2007 (SDKI 2007) sebesar 9% turun menjadi 7,3% tahun 2010. Target unmetneed Provinsi Banten tahun 2015 sesuai dengan target MDGs sebesar 4,9% akan tercapai.

	**Tujuan 6.** **Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya**

Target yang akan dicapai pada tujuan ini adalah:

1. Target 6a: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru dengan indikator :
   a. Prevalensi HIV dari total populasi.
   b. Persentase Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir.
   c. Persentase penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS.
2. Target 6b: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 dengan indikator proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obat antiretroviral.
3. Target 6c: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 dengan indikator:
   a. Angka kejadian Tuberkulosis per 100.000 penduduk.
   b. Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk.
   c. Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS.
   d. Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate).
   e. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk.
   f. Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk).
   g. Kematian DBD.

Status pencapaian tujuan ke-6 di Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13
Status Capaian Tujuan 6 MDGs Banten

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya						
Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015						
6.1	Prevalensi HIV	0,16 (1990)	0,04 (2010)	<0,5	▶	Pusdatin Depkes
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi	12,8% (2002)	26% (2010)	70%	▼	SKRRI Dinkes
6.3	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	*Riskesdas, 2007) P : 9,5% L : 14,7% (SDKI, 2007) P : 2,6% L : 1,4% SKRRI, 2007)*	22,6% (2010)	85%	▼	SKRRI, RiskesdasDinkes
Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015						
6.4	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	71,2 % (2005)	83,5	95%	▶	Kemenkes, Dinkes
Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkanjumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya (Tubercolosis) hingga tahun 2015						
6.5	Angka kejadian tubercolosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun)	6,5	6,7	Dihentikan, mulai berkurang	▶	Kemenkes, Dinkes
6.6	Tingkat prevalensi tubercolosis (per 100.000 penduduk)	343 (1990)	285 (2009)	224	▶	Kemenkes, Dinkes
6.7	Tingkat kematian karena tubercolosis (per 100.000 penduduk)	92 (1990)	27 (2010)	Dihentikan, mulai berkurang	▶	Kemenkes, Dinkes
6.8	Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS	20 % (2000)	73,3% (2010)	70%	●	Kemenkes, Dinkes
6.9	Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate)	87% (2000)	87% (2010)	85%	●	Kemenkes, Dinkes
6.10	Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk	155 (2010)	0,49 (2010)	0,1	▼	Kemenkes, Dinkes

	Penyakit Menular Lainnya: DBD **)					
6.11	Angka kesakitan DBD (per 100.000 Penduduk)	55%	57,49 % (2010)	55%	▶	Kemenkes, Dinkes
6.12	Angka kematian DBD	NA	0,85 (2010)	0,4%	▼	Kemenkes, Dinkes
Keterangan : ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus						

*) Demam Berdarah Dengue, di Banten merupakan jenis penyakit menular yang perlu mendapatkan perhatian serius meskipun tidak termasuk dalam salah satu indikator pada tujuan ke-6 Road Map RAD MDG's 2015.

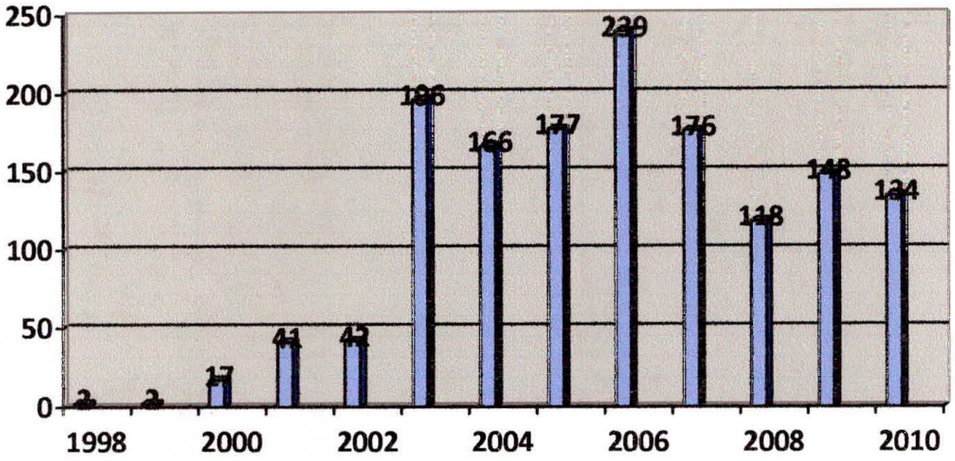
Target 6 A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 dan Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

Prevalensi kasus HIV di Provinsi Banten pada tahun 2010 sebesar 0,04% dari total penduduk. Kondisi ini telah mencapai target apabila dibandingkan dengan target MDGs dan target Banten tahun 2015 (<0,5%). Dalam rangka mengendalikan penyebaran HIV/AIDS perlu upaya penemuan kasus di masyarakat mengingat hal ini seperti "fenomena gunung es".

Penularan HIV dan AIDS disebabkan oleh hubungan seks yang beresiko dengan tidak menggunakan kondom dan pemakaian narkoba melalui jarum suntik. Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan tentang HIV dan AIDS pada tahun 2010 mencapai 11,6%, dan jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV sebesar 2.423 orang persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman sebesar 75%, penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi sejumlah 17,2% (L=2,9, P=14,3%) dan ODHA yang diobati/yang mendapatkan antiretoviral therapy sebesar 83 %.

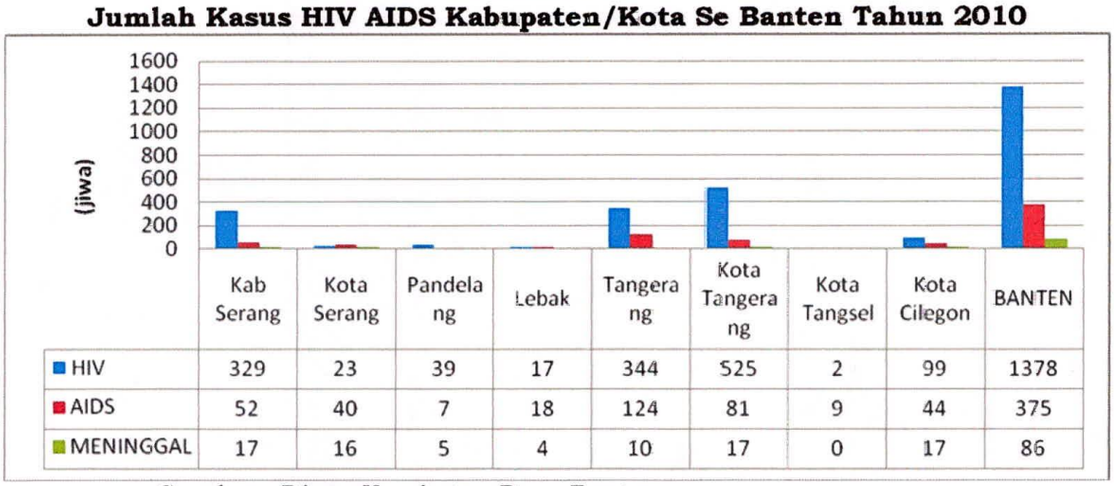
Jumlah penderita HIV dan AIDS Banten dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 sebesar *1.913* orang, dengan rincian *455* kasus AIDS dan *1.458* HIV. Kabupaten/kota yang penderita HIV dan AIDS tertinggi adalah Kota *Tangerang* yaitu mencapai lebih dari *634* kasus.

Grafik 1.20
Jumlah Kasus HIV AIDS di Provinsi Banten Tahun 1998 – 2010



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten

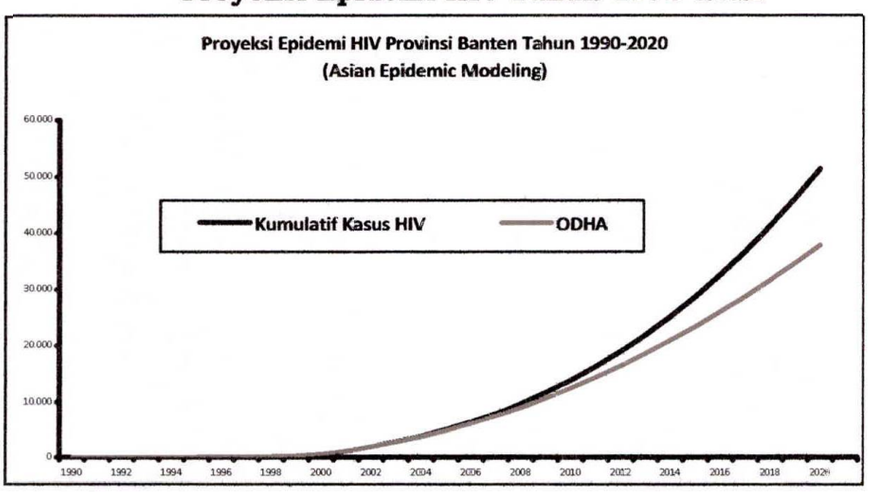
Grafik 1.21
Jumlah Kasus HIV AIDS Kabupaten/Kota Se Banten Tahun 2010



	Kab Serang	Kota Serang	Pandeglang	Lebak	Tangerang	Kota Tangerang	Kota Tangsel	Kota Cilegon	BANTEN
HIV	329	23	39	17	344	525	2	99	1378
AIDS	52	40	7	18	124	81	9	44	375
MENINGGAL	17	16	5	4	10	17	0	17	86

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten

Grafik 1.22
Proyeksi Epidemi HIV Tahun 1990-2020



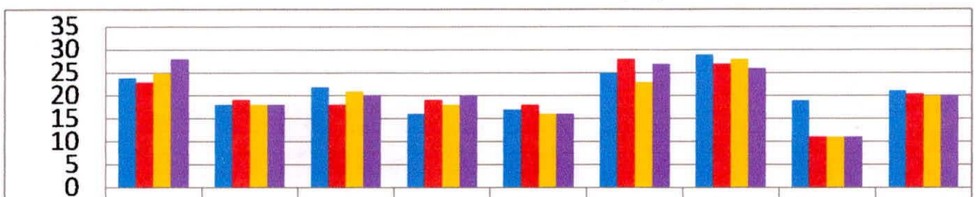
Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

Angka Kejadian TB Paru di Provinsi Banten pada tahun 2010 sebesar 80/100.000 penduduk, dengan tambahan kasus baru sebesar 70% dan persentase kasus TB yang dapat disembuhkan sebesar 87%. Angka kejadian TB Paru pada tahun 2015 akan turun sesuai dengan target Banten (70 per 100.000 penduduk)

Case Detection Rate (CDR) TB Paru Kabupaten/Kota yang capaiannya dibawah rata-rata Banten, sebanyak 2 Kabupaten/Kota. Adapun CDR TB Paru terendah berada di Kota Tangerang Selatan.

Grafik 1.23
Realisasi dan Target Penemuan TB Paru Kab/Kota Se-Banten Tahun 2010 (%)

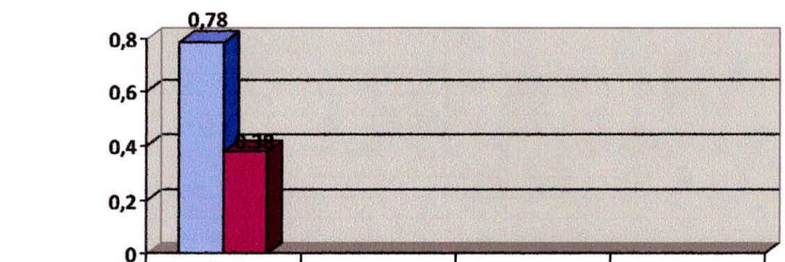


	Srg	Tgr	Pdg	Lbk	Tgr Kt	Clg	Srg kt	Tang sel	Prov
Q1	24	18	22	16	17	25	29	19	21
Q2	23	19	18	19	18	28	27	11	20
Q3	25	18	21	18	16	23	28	11	20
Q4	28	18	20	20	16	27	26	11	20

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten 2010

Pada tahun 2010 angka kematian karena TB Paru sebesar 1,46%, dibawah target Banten tahun 2015 yaitu 2%. Kondisi ini dikarenakan kesadaran penderita untuk minum obat secara teratur mengalami peningkatan dilihat dari capaian kesembuhan melalui program DOTS sebesar 87%.

Grafik 1.24
Prevalensi Malaria Tahun 2010 Berdasarkan API (Annual Parasit Incidence)

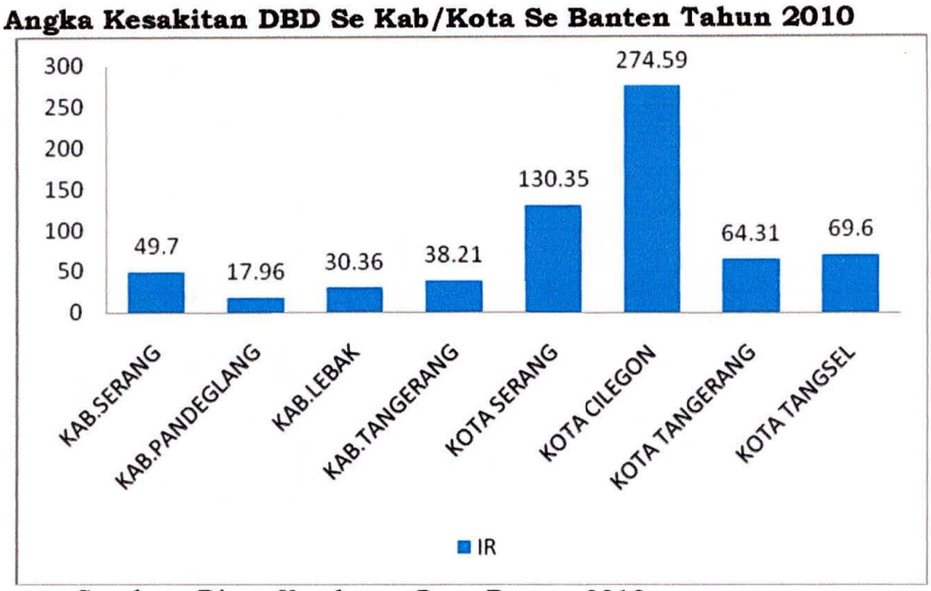


	2010			
Pandeglang	0,78			
Lebak	0,38			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Angka penemuan kasus malaria di Provinsi Banten pada tahun 2010 sebesar 0,49 per 1.000 penduduk. Daerah endemis malaria di Banten adalah Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang(kasus impor) Pada tahun 2010 Prevalensi Malaria (API) paling tinggi adalah Kabupaten Pandeglang (API 0,78)

Grafik 1.25
Angka Kesakitan DBD Se Kab/Kota Se Banten Tahun 2010



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Banten 2010

Angka kesakitan DBD di Provinsi Banten pada tahun 2010 sebesar 57,49/ 100.000 penduduk dan angka kematian DBD sebesar 0,85 %. Target Banten untuk Angka kesakitan DBD adalah 55 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan DBD terbesar adalah Kota Cilegon (274,59) disusul adalah Kota Serang (130,35) dan Kota Tangerang Selatan (69,60)

Tujuan 7.
Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Tujuan 7 MDGs mencakup empat target, yaitu (1) Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program Nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang; (2) Target 7B: Mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati dan mencapai penurangan yang signifikan pada tahun 2010; (3) Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015; dan Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

Terdapat sembilan indikator yang harus dicapai untuk mencapai tujuan 7 MDGs, yaitu (1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil RAD MDGs Banten 46 pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan; (2) Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)e; (3) Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO); (4) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. (5) Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan; (6) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial; (7) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan; (8) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan; dan (9) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan. Status pencapaian tujuan 7 MDG's di Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 1.14
Status Capaian Tujuan 7 MDGs Banten

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 7A : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup						
Target 7 A : memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang						
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan	16,68 % (2009)		Meningkat	▶	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)	1.883.494 (ribu ton) tahun 2002	1.379.419 (ribu ton) tahun 2005	Berkurang 26% pada tahun 2020	▶	KemenagLH (hasil Study)
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)	NA	NA	0 CFCs dengan mengurangi HCFCs		KemenagLH (hasil Study) Badan LHD
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	NA	NA	tidak melebihi batas		Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 7 B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010						
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	11,87% (2009)		Meningkat	▶	Kementrian Kehutanan

7.6	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan Banten	4,04% (2009)		Meningkat	▶	Kementrian Kelautan dan Perikanan
Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015						
7.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	29,79% (2007)	27,47% (2009)	68,87%	▼	BPS (Susenas 2009) SDAP
	Perkotaan	32,43% (2007)	27,54% (2009)	75,29%	▼	BPS (Susenas 2009) SDAP
	Perdesaan	26,59% (2007)	27,35% (2009)	65,81%	▼	BPS (Susenas 2009) SDAP
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar	50,22% (2007)	58,82% (2009)	62,41%	▶	BPS (Susenas 2009) SDAP
	Perkotaan	71,75% (2007)	77,03% (2009)	76,82%	●	BPS (Susenas 2009
	Perdesaan	24,26% (2007)	30,10 (2009)	55,55%	▼	BPS (Susenas 2009)
7.9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	15,7% (2009)	15,7% (2009)	6%	▼	BPS (Susenas 2009) SDAP
Keterangan : ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus						

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan

Berdasarkan data Kementrian Kehutanan (2009) rasio kawasan tertutup pepohonan sebesar 16,68% dengan luas kawasan tertutup pepohonan sebesar 156.700 ha dan luas daratan 939.300 ha.

Sementara berdasarkan penafsiran Citra Landsat wilayah Provinsi Banten tahun 2009 oleh BPKH XI diperoleh hasil, yaitu jika dibandingkan dengan data tahun 2006, tutupan lahan berhutan di Provinsi Banten tahun 2009 mengalami kenaikan baik areal di dalam kawasan hutan maupun di

luar kawasan hutan. Pada tahun 2009, areal berhutan di dalam kawasan hutan mencapai 68,57 % (dari luas kawasan hutan) atau mengalami kenaikan 3.58 % dibandingkan dengan data tahun 2006 yang mencapai 64,99 %. Begitu juga areal berhutan di luar kawasan hutan, pada tahun 2009 mencapai 5,17 % (dari luas non kawasan hutan) atau mengalami kenaikan 0,32% dari tahun 2006 yang mencapai 4,85%.

Dua Taman Nasional yang berada di Provinsi Banten menunjukan kondisi yang berbeda. Taman Nasional Ujung Kulon, mempunyai tutupan lahan berhutan yang baik yaitu mencapai 95,03 % sedangkan Taman Nasional Gunung Halimun Salak tutupan lahan berhutannya hanya mencapai 67,69 %.

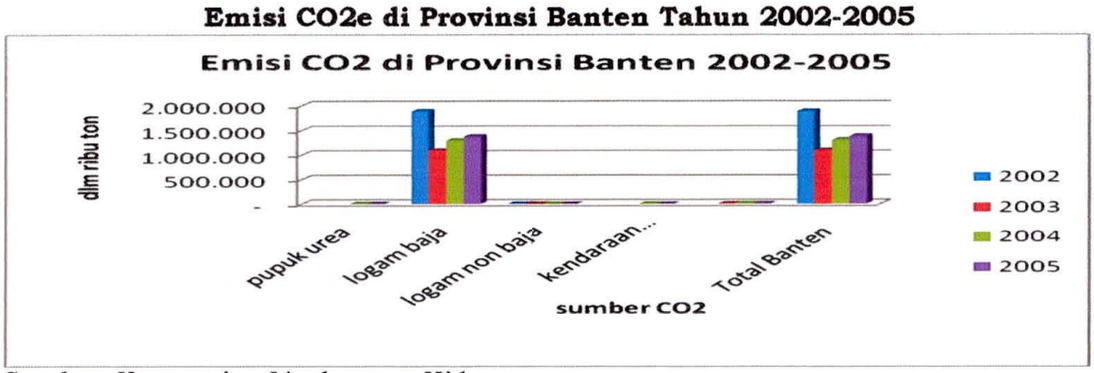
Emisi CO2 (e) berdasarkan penghitungan yang dilakukan pada tahun 2002 berdasarkan hasil study Kementrian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa jumlah emisi CO2 (e) di Banten sebesar 1.883.494 ribu ton. Tahun 2005 berkurang menjadi 1.379.419 ribu ton. Perhitungan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya sektor industri baja dan non baja, kendaraan bermotor, konsumsi energi industri dan pertanian. Sumber emisi CO2(e) paling besar bersumber dari penggunaan energi industri baja yang dan konsumsi energy industri serta kendaraan bermotor.

Tabel 1.15
Emisi CO2e di Provinsi Banten Tahun 2002-2005

No.	Sumber Emisi CO2	Emisi CO2 dalam ribu ton						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pupuk urea	na	na	44	45	46,25	47,53	48,84
2	Logam baja	1.883.152	1.086.829	1.291.239	1.373.125	na	na	na
3	Logam non baja	342	260	259	258	na	na	na
4	Kendaraan bermotor	na	na	631	619	582	663	na
5	Konsumsi energi industri	na	2.590	6.712	5.372	na	na	na
	Total Banten	1.883.494	1.089.679	1.298.885	1.379.419	628,25	710,53	48,84

Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup

Grafik 1.26
Emisi CO2e di Provinsi Banten Tahun 2002-2005



Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup

Konsumsi bahan perusak ozon (BPO) di Banten dihitung berdasarkan selisih refrigerant ramah lingkungan yang tersalur dengan sisa yang tidak tersalur pada akhir tahun. Pemerintah pusat mentargetkan pada tahun 2015 penggunaan CFCs tidak ada lagi, dan mengurangi penggunaan HCFCs. Kondisi ini memerlukan perhatian yang serius menginggat kebutuhan masyarakat terhadap peralatan yang menggunakan refrigeran semakin meningkat, sementara refrigeran jenis lain yang lebih ramah lingkungan belum ditemukan. Penggunaan CFCs juga diperkirakan masih ada, dan sulit sekali dideteksi karena dilakukan secara ilegal. Pada tahun 2015 ditargetkan pemakaian bahan perusak ozon di Banten dapat berkurang dengan adanya peningkatan pemakaian refrigeran ramah lingkungan. Untuk mendorong hal tersebut maka program monitoring dan pengawasan terhadap distribusi pemakaian refrigeran yang ramah lingkungan di Banten perlu ditingkatkan.

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di Banten (Maximum Sustainable Yield) pada tahun 2008 sebesar 80%. Pada tahun 2009 produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten mencapai 89.050 ton, meningkat dari tahun 2004 sebesar 76.324 ton. Pada tahun 2015 ditargetkan proporsi tangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman di Banten sebesar 80%, artinya tidak melebihi batasan biologis yang aman. Namun demikian, para nelayan dalam menangkap ikan tidak terbatas untuk beroperasi di wilayah 12 mil, tapi telah keluar dari perairan teritorial. Dengan demikian upaya pengembangan pemanfaatan ikan di Provinsi Banten harus diarahkan pada perairan lepas pantai (*offshore),* atau bahkan ZEE dan laut bebas. Ditambah dengan pengembangan armada perikanan dengan melakukan penambahan kapal berukuran 30 GT keatas yang memiliki jangkauan wilayah penangkapan di wilayah yang lebih jauh, tentunya diikuti dengan penggantian kapal berukuran kecil.

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010.

Berdasarkan data Kementrian Kehutanan (2009) rasio kawasan lindung terhadap luas daratan sebesar 11,8% dengan luas kawasan lindung sebesar 11.500 ha dan luas daratan 939.300 ha.

Sementara berdasarkan data RTRW Provinsi Banten 2010-2030, Kawasan lindung di Provinsi Banten terdiri dari Hutan Lindung, Kawasan yang member perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Luas kawasan lindung di Banten sebesar 135.869 ha dan diharapkan pada tahun 2030 mencapai 260.843 ha

atau 30,15 dari luas Provinsi Banten. Hal ini sesuai dengan target MDGs nasional yang hanya mentargetkan peningkatan rasio kawasan pepohonan terhadap luas daratan.

Tabel Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Banten tahun 2010 berdasarkan RTRW Provinsi Banten 2010-2030.

Tabel 1.16
Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW Prov. Banten 2010-2030

No	Kawasan Lindung	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Lindung	260.843	2,39
2.	Kawasan yang member perlindungana terhadap daerah bawahannya		
3.	Kawasan Perlindungan setempat	89.903	11,24
4.	Kawasan Suaka alam dan Cagar Budaya	126.397	14,61
5.	Kawasan rawan bencana	8.643	1,00

Sumber: RTRW Provinsi Banten 2010-2030

Kawasan lindung daratan di Provinsi Banten pada tahun 2010 seluas 135.868,69 ha, terdiri dari kawasan lindung hutan seluas 126.397,30 ha, dan kawasan konservasi dalam kawasan hutan seluas 9.471,39 ha. Rasio luas kawasan lindung ini tidak mengalami perubahan tiap tahunnya, namun dilihat dari kualitasnya semakin menurun. Target rasio kawasan lindung di Banten pada tahun 2030 sesuai RTRW Provinsi Banten 2010-2030 tetap yaitu sebesar 30,15% dari luas Provinsi Banten, dan peningkatan tutupan pohon pada kawasan lindung.

Berdasarkan data Kementrian Kelautan dan Perikanan (2009) luas perairan Banten 1.113.422 ha. Sementara kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung perairan laut di Banten sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 mempunyai luasan 45.057 ha terdiri dari luas kawasan lindung perairan Taman Nasional Ujung Kulon seluas 44.337 ha, dan TWA Perairan Sangiang seluas 720 ha. Walaupun tidak mengalami perubahan luasan kawasan lindung, namun kualitasnya semakin menurun akibat aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Program yang dapat mendukung pencapaian target tersebut yaitu Program Pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi.

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015

Proporsi rumah tangga yang terlayani akses air bersih di perkotaan dan perdesaan di Banten pada tahun 2009 sebesar 27,47%, mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 29,79%. Cakupan pelayanan air bersih di wilayah perkotaan pada tahun 2009 sebesar 27,54% dan di wilayah perdesaan sebesar 27,35%; mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007, yaitu sebesar 32,43% untuk wilayah perkotaan, dan peningkatan menjadi 26,59% untuk wilayah perdesaan. Pencapaian ini masih jauh dari target MDGs nasional sebesar 75,29% untuk wilayah perkotaan, dan 65,81% untuk wilayah perdesaan. Pencapaian tersebut juga masih jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di Banten, yaitu pada tahun 2015 sebesar 71,85% di seluruh wilayah (perkotaan dan perdesaan). Kondisi ini disebabkan oleh sulitnya mengembangkan sumber air baku dan lemahnya institusi dan manajemen PDAM serta keterlibatan aktif/ partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Proporsi rumah tangga di Banten dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di wilayah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2009 sebesar 58,82%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 sebesar 50,22%. Pencapaian ini kurang dibandingkan target MDGs nasional tahun 2015 sebesar 62,41%. Pada tahun 2009 di perkotaan sebesar 77.03% dan pedesaan 30,10%. Angka ini meningkat dari tahun 2007 sebesar 71,75% untuk perkotaan dan 24,26% untuk predesaan. Di bandingkan angka MDGs untuk perkotaan sebesar 76,82% dan perdesaan 55,55%, maka capaian di perkotaan mendekati capaian MDGs akan tetapi capaian di pedesaan membutuhkan kerja keras untuk mencapai target MDGs 2019.

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

Kondisi pencapaian target 7D di Banten diketahui dari jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan. Rumah tangga miskin di permukiman kumuh adalah jumlah rumah tangga yang memiliki rumah tangga tidak permanen. Berdasarkan data tahun 2010 terdapat 391.481 rumah tidak permanen dari total 1.922.750 rumah layak huni di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak dan Pandeglang memiliki rumah tidak permanen paling tinggi yaitu 121.327 dan 138.153 rumah. Sementara Kota Cilegon mempunyai jumlah terendah yaitu sebanyak 5,073 rumah. Kondisi ini masih belum memenuhi target capaian

Provinsi Banten sebesar 10,18% dan masih jauh dari target nasional tahun 2020 yaitu rumah tangga kumuh diperkotaan (6%).

Tabel 1.17
Tabel Rumah Layak Huni di Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Rumah Permanen	Rumah Semi Permanen	Rumah Tidak Permanen	Total
Kab.Lebak	111458	75150	121327	307935
Kab.Pandeglang	75732	71891	138153	285776
Kab.Serang	132522	119046	56868	308436
Kota Serang	109965	23799	7170	140934
Kota Cilegon	64219	27522	5073	96814
Kab.Tangerang	belum ada data	belum ada data	belum ada data	0
Kota Tangerang	390776	77621	6022	474419
Kota Tangsel	132522	119046	56868	308436
Jumlah	1017194	514075	391481	1922750

Sumber: Dinas SDAP Provinsi Banten

1.2. Permasalahan dan Tantangan

1.2.1 Permasalahan

Secara umum permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan pencapaian target MDGs di Provinsi Banten adalah permasalahan Sanitasi dan Air bersih merupakan permasalahan yang sulit untuk dicapai pada tahun 2015. Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) harus terus digalakkan terutama di daerah yang kesulitan terdapan pelayanan air bersih. Permasalahan lain adalah disparitas kemiskinan yang tidak merata antar Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten Lebak dan Pandeglang mempunyai angka kemiskinan yang berada diatas rata-rata Provinsi. Permasalahan lain adalah tingginya jumlah penganggur walau secara prosentase turun. Hal ini disebabkan oleh adanya migrasi penduduk terutama ke daerah penyangga Jakarta seperti Tangerang.

Berdasarkan kondisi capaian target tujuan pembangunan millennium permasalahan dihadapi dalam rangka percepatan pencapaian target tujuan pembangunan milennium di Provinsi Banten hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut:

	**Tujuan 1.** **Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan**

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015.

1. Kelompok masyarakat miskin usia produktif berpendidikan rendah (SD/ sederajat)
2. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di pedesaan
3. Sulitnya akses untuk permodalan bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin
4. Implementasi program pemerintah, swasta dan lembaga ekonomi masyarakat yang tidak optimal

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

1. Rendahnya kualitas SDM pada usia produktif sehingga tidak dapat mengisi lowongan yang ada di sektor industri
2. Industri padat modal yang tidak menyerap banyak tenaga kerja
3. Sektor informal yang kurang mendapatkan perlindungan kerja/sosial serta jaminan kepastian keberlanjutan usaha

4. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding laki-laki.

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang penderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

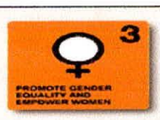
1. Masih terdapat Balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, khususnya pada masyarakat miskin di perdesaan
2. Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan makanan bergizi dan rendahnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber gizi
3. Sistem Kewaspadaan ketahanan pangan yang belum berjalan optimal



Tujuan 2.
Mencapai Dasar Pendidikan untuk Semua
Pendidikan Dasar

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

1. Disparitas capaian APM SD/MI/Paket A yang cukup tinggi. Kota Tangerang, Tangerang Selatan mempunyai capaian yang jauh lebih diatas kabupaten Lebak dan Pandeglang.
2. Masih ada siswa SD/MI yang drop out karena faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat
3. Layanan pelayanan pendidikan dasar yang belum seimbang di Kabupaten/Kota
4. Masih rendahnya kondisi sarana prasarana pendidikan dasar sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kabupaten/Kota
5. Disparitas kualifikasi pendidikan pendidik pada pendidikan dasar antar Kabupaten/Kota
6. disparitas katagori (hasil akreditasi) satuan pendidikan dasar antar Kabupaten/Kota



Tujuan 3.
Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

1. Budaya masyarakat yang kurang mendukung perempuan untuk mencapai pendidikan tinggi
2. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam partai politik, yang terjun di dunia politik pun tidak memiliki posisi yang strategis

3. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan di bandingkan laki-laki sehingga kalah bersaing dalam kompetisi mencari pekerjaan khususnya di sektor formal
4. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data terpilah dan partisipasi masyarakat
5. Implementasi PUG dalam kebijakan pembangunan pada Dokumen Renja SKPD, RKA, DPA, dan TOR belum optimal. Termasuk didalamnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG
6. Sulitnya akses ke pendidikan tinggi bagi perempuan karena keterbatasan ekonomi



Tujuan 4.
Menurunkan Angka Kematian Anak Balita

Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015

1. Kurangnya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis anak
2. Kompetensi teknis pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di pedesaan yang masih kurang
3. SOP kebidanan yang belum dijalankan secara optimal dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita
4. Penurunan pelayanan posyandu dari segi kualitas dan kuantitas
5. Kurang aktifnya masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarganya khusunya dalam pola asuh berperilaku hidup sehat dan bersih
6. Ibu hamil dengan latar pendidikan rendah dan ekonomi yang kurang jarang sekali memeriksakan kesehatan dirinya dan bayi dalam kandungannya
7. Kurangnya pemahaman mengenai imunisasi sehingga masih ada yang tidak mendapat imunisasi khusunya di perdesaan
8. Tumbuh kembang balita yang tidak terpantau secara penuh oleh keluarga
9. Berkuranngnya kader Posyandu di masyarakat



Tujuan 5.
Meningkatkan Kesehatan Ibu melahirkan

Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 melahirkan

1. Pelayanan Dasar yang ada di Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa dan pelayanan belum memberikan pelayanan secara optimal yang

sangat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelayanan ibu hamil / melahirkan dengan risiko tinggi

2. Masih ada Puskemsas yang belum mempunyai pelayanan Obsetri Neonatus Emergency Dasar (PONED)
3. Belum ada payung hukum yang melindungi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan PONED di Puskesmas
4. Belum semua tenaga kesehatan di Puskemas mendapat pelatihan PONED
5. Masih ada ibu yang melahirkan tanpa di bantu oleh tenaga kesehatan yang terlatih

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

1. Fasilitas pelayanan dasar yang belum memadai baik dari kualitas maupun kuantitas khususnya di pedesaan
2. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam mendukung program Keluarga Berencana
3. Kuranngya sosialisasi kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi pada usia 15-19 tahun



Tujuan 6.
Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015

1. Perilaku berisiko terhadap penularan HIV terutama pada populasi kunci masih tinggi
2. Kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem layanan kesehatan dan rujukan belum memadai
3. Komitmen politis pembuat kebijakan belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan KPA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota belum memadai

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta sistem layanan kesehatan dan rujukan belum memadai
2. Komitmen politis pembuat kebijakan belum optimal

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit TB
2. Kurang otpimalnya program dari Pemerintah Daerah untuk mencegah penyebaran malaria
3. Surveilanse untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khususnya TB, Malaria dan DBD kurang optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia
4. Belum dilakukannya surveilans migrasi penduduk yang membawa penyakit menular
5. Perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit DBD yang belum mendukung seperti dalam pemberantasan sarang nyamuk



Tujuan 7.
Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan

1. Alih fungsi ruang terbuka hijau yang masih tinggi
2. Lahan kritis yang belum mendapat penanganan serius
3. Ekosistem laut yang tercemar oleh sampah masyarakat dan industri
4. Tidak tersedianya data yang terkait dengan potensi emisi CO2
5. Pencemaran dari kendaraan bermotor dan industri yang terus bertambah yang tidak diimbangi dengan penghijauan
6. Kerusakan ekosistem laut yang disebabkan oleh penangkapan ikan yang tidak menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan
7. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan terhadap limbah bahan-bahan beracun dan berbahaya

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010.

1. Kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat Desa di sekitar hutan dalam pelestarian hutan lindung yang masih rendah
2. Pemanfaatan Sumber Daya Perairan dengan peralatan tidak ramah lingkungan (obat kimia dan bahan peledak)

3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan masih rendah.

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015

1. Rendahnya akses terhadap air minum yang layak khususnya di pedesaan
2. Penyediaan infrastruktur air minum yang tidak mencukupi laju pertumbuhan penduduk
3. Sarana dan Prasarana air minum yang tidak terpelihara
4. Kualitas air permukaan sebagai sumber air baku yang menurun akibat pencemaran lingkungan
5. Kinerja institusi pengelola air yang masih rendah
6. Pokja Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang bekerja belum optimal
7. Akses terhadap sanitasi layak yang masih rendah
8. Kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi dasar masih rendah
9. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

1. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membangun dan memperbaiki rumah
2. Tingginya proporsi rumah tangga kumuh perkotaan dan pedesaan

1.2.2 Tantangan

Secara umum tantangan pembangunan di Provinsi Banten adalah meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar untuk masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Untuk layanan kesehatan dasar di pedesaan disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan dan kurangnya sarana kesehatan. Daerah dengan rata-rata jumlah dokter per 100.000 penduduk terendah adalah Kabupaten Serang dan Pandeglang dengan rasio 5 – 6 dokter per 100.000 penduduk. Distribusi tenaga dokter di Banten juga tidak merata, di wilayah perkotaan (Tangerang dan Kota Tangerang) memiliki jumlah dokter rata–rata 700 orang sedangkan di wilayah pedesaan hanya memiliki jumlah dokter sebanyak 80 orang.

Di bidang pendidikan dasar tantangan yang di hadapi adalah meningkatkan layanan pendidikan dasar, menengah dan tingggi pada masyarakat miskin pedesaan. Masyarakat miskin mempunyai akses yang rendah terhadap pendidikan *formal* maupun *non-formal*, akibat tingginya biaya pendidikan, terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah dan guru bermutu pada daerah miskin, terbatasnya jumlah sekolah yang layak, terbatasnya jumlah SLTP dan SLTA di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan, serta terbatasnya jumlah, sebaran, dan mutu program kesetaraan pendidikan dasar melalui pendidikan *non-formal*.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target tujuan MDGs di Provinsi Banten hingga tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

	**Tujuan 1.** **Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan**

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015.

1. Mengurangi kesenjangan tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota
2. Iklim usaha yang kondusif yang memberikan kesempatan kepada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
3. Mengefektifkan program-program bantuan dan jaminan sosial yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah
4. Peningkatan terhadap layanan dasar untuk masyarakat miskin
5. Tingkat pertumbuhan yang tinggi untuk memperluas kesempatan kerja, termasuk untuk kelompok masyarakat miskin
6. Menurunkan indeks kedalaman kemiskinan secara signifikan

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan pasar
2. Memperluas kesempatan kerja formal melalui sektor industri dan pariwisata
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru
4. Memfasilitasi sektor informal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

1. Disparitas status gizi balita yang masih tinggi antar Kabupaten/Kota
2. Memberdayakan masyarakat miskin berpendidikan rendah untuk meningkatkan akses pangan yang bergizi

3. Pengetahuan masyrarakat Desa yang masih rendah tentang makanan sehat bergizi

	**Tujuan 2.** **Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua**

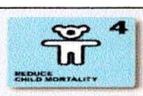
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

1. Disparitas terhadap akses ke pendidikan dasar yang masih tinggi antar Kabupaten/Kota
2. Optimalisasi dana BOS untuk mengurangi angka putus sekolah
3. Optimalisasi Implementasi Program Wajar Dikdas 9 tahun
4. Pemerataan distribusi guru
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk sekolah di pedesaan

	**Tujuan 3.** **Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

1. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan untuk meningkatkan APM perempuan di jenjang pendidikan lanjutan dan tinggi
2. Peningkatan angka partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor non pertanian
3. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga Legislatif dan partai politik

	**Tujuan 4.** **Menurunkan Angka Kematian Anak**

Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015

1. Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan anak berkualitas di unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa / PKD)
2. Pola asuh anak di masyarakat tentang kesehatan belum optimal (perilaku masyarakat untuk pola hidup bersih sehat)
3. Belum semua bidan mengikuti pelatihan penanganan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh

Kembang (SDIDTK), Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBM/MTBS)

4. Akses terhadap sanitasi dan air bersih yang rendah pada masyarakat pedesaan
5. Disparitas status kesehatan antar kabupaten/kota yang tinggi

	**Tujuan 5.** **Meningkatkan Kesehatan Ibu** melahirkan

Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015

1. Terbatasnya akses terhadap fasilitas persalinan khususnya di daerah pedesaan
2. Masih ada ibu yang melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan dan di rujuk ke pelayanan kesehatan ketika kondisinya sudah parah
3. Mengubah perilaku masyarakat yang masih ingin melahirkan di rumah tanpa tenaga kesehatan/bidan
4. Masih ada Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) memiliki sarana prasarana yang yang belum memadai
5. Desa Siaga yang berjalan belum optimal
6. Program KIE yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat di pedesaan
7. Jamkesmas dan Jamkesda yang belum mengcover semua lapisan masyarakat miskin
8. Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK yang masih terbatas)
9. Kurangnya tenaga kesehatan/bidan di Puskemas kesehatan
10. Masih rendahnya status gizi ibu hamil di pedesaan karena ketidakmampuan ekonomi

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

1. Masih ada perkawinan di usia muda dan beresiko tinggi yang belum memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
2. Berkurangnya tenaga lapangan penyuluh keluarga berencana yang mensosialisasikan kesehatan reproduksi
3. Besarnya angkatan muda yang belum mengerti kesehatan reproduksi remaja
4. Berkurangnya komitmen dari semua pemangku kepentingan akan pentingnya program keluarga berencana

	**Tujuan 6.** **Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya**

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015

1. Letak geografis Banten yang berbatasan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mempunyai prevalensi HIV/AIDS tinggi
2. Infeksi baru HIV yang cenderung meningkat pada lima kelompok populasi kunci, yaitu penasun, wanita penjaja seks, lelaki seks dengan lelaki, pelanggan seks komersial dan wanita pasangan pelanggan

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

1. Persediaan obat ARV yang masih terbatas
2. Rumah Sakit Pemerintah yang belum memiliki 19 layanan perawatan dukungan dan pengobatan ARV
3. Operasional Klinik VCT yang masih terbatas di beberapa puskesmas
4. Baru Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan dukungan HCPI membuka layanan jarum dan alat suntik steril di beberapa puskesmas dimana juga terdapat layanan VCT dan memulai aktivasi program terapi rumatan metadon di Puskesmas Cibodasari

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

1. Tingginya migrasi penduduk ke wilayah Banten
2. Kurangnya petugas yang memantau informasi mengenai penyakit endimis dari luar banten
3. Perubahan cuaca yang ekstrem
4. Penerapan International Standard for Tuberculosis Care (ISTC) di rumah sakit pemerintah dan swasta

	**Tujuan 7.** **Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan

1. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin bertambah
2. Penambahan jumlah kendaraan bermotor dan pencemaran industri yang terus bertambah
3. Masih terdapatnya penggunaan peralatan yang tidak ramah lingkungan yang merusak ekosistem laut

4. Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi hutan

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010.

1. Menambah luas areal hutan lindung
2. Menurunkan konflik dan tekanan terhadap taman nasional dan kawasan konservasi
3. Meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumberdaya perairan dengan peralatan tidak ramah lingkungan yang merusak terumbu karang dan ekosistem laut

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015

1. Perubahan iklim global yang mengurangi debit air
2. Kapasitas AMPL yang lemah dalam mensinergikan program terkait air minum
3. Laju pertumbuhan dan migrasi penduduk yang belum diimbangi dengan sanitasi dasar yang memadai

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

1. Terbatasnya anggaran untuk penyediaan rumah sehat bagi kelompok miskin
2. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di perkotaan yang tidak diimbangi dengan infrastruktur perumahan yang memadai
3. Banyaknya perumahan yang tidak layak huni baik yang berlokasi di pedesaan maupun perkotaan akibat terbatasnya ketersediaan lahan, rendahnya kualitas pengelolaan infrastruktur dan rendahnya kemampuan/daya beli masyarakat

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs

Arah kebijakan Umum pembangunan di Provinsi Banten adalah Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan pilihan program dan indikasi kegiatan, sesuai tugas dan kewenangannya. Indikator Makro Pembangunan Daerah 2007 – 2012, sebagai ukuran visi dan misi pembangunan, ditempuh oleh Agenda, Arah Kebijakan dan Program serta indikasi kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Makro Pembangunan Daerah 2007 – 2012

URAIAN INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	SAT.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			REALISASI	REALISASI	ANGKA SEMENTARA	TARGET	PROYEKSI	PROYEKSI
1. INDEKS PEMBANGUAN MANUSIA (IPM)	IPM	%	69.28	69.68	70.65	71.78	72.34	72.88
2. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)	LPE	%	6.04	5.82	4.69	5.59 - 6.00	6.10 - 6.35	6.50 - 6.80
3. INDEKS PEMBANGUNAN DAERAH (IPD)	IPD	%	73.18	77.18	81.77	81,24 - 85,0	85,0 - 89,2	89,2 - 98,0
4. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	IPM-G	%	61.40	62.00	63.00	64.30	65.80	67.40
5. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	IDG	%	48.80	51.50	52.00	52.90	53.80	54.20
6. JUMLAH PENDUDUK SANGAT MISKIN	Penduduk Miskin	Jiwa	886,200	816,742	788,067	717.141 - 700.000	700.000 - 650.000	650.000 - 600.000
7. PROSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN (RTM)	% RTM	%	33.04	33.04	29.60	29,6 - 27	27 - 25	25 - 23
8. JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA	Jml Pengangguran	Jiwa	632,762	656,560	676,560	650,000	620,000	600,000
9. PROSENTASE PENGANGGURAN TERBUKA	% Jml Pengangguran / Thd Jml Penduduk	%	6.71	6.50	6.50	6,54 - 6,0	6 - 5,6	5,6 - 5,2

Arah kebijakan umum pembangunan di Provinsi Banten telah mencakup sebagian besar dari target percepatan pencapaian target MDGs di Provinsi Banten. Terdapat 4 arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Banten 2007-2012:

1. Arah Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat
2. Arah kebijakan di Bidang Sumber Daya Manusia yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan dan Pendidikan
3. Arah Kebijakan di Bidang Ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan fasilitasi kelompok usaha kecil dan menengah
4. Arah Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan adalah untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat

Memperhatikan capaian target Tujuan Pembangunan Millennium Provinsi Banten dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, maka upaya untuk memecahkan masalah dan menghadapi tantangan melalui arah kebijakan dan

strategi pemecahan masalah dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Arah Kebijakan Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)

	Tujuan 1. **Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan**

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015.

Arah kebijakan untuk mencapai target menurunnya hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$1,00 (PPP) per kapita per hari adalah:

1. Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Proses dan Pemanfaatan Hasil Pembangunan, melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin;
2. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kemitraan Usaha Pariwisata Daerah, melalui Pengembangan Pariwisata Daerah;
3. Meningkatkan Realiasasi Investasi Dunia Usaha, melalui : Peningkatan Investasi Sektor Swasta dan Peningkatan Hubungan Industri hulu-hilir
4. Meningkatkan Usaha Kelembagaan Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, melalui Pengembangan Usaha dan Kelembagaan UMKM-K;
5. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Berusaha, Kualitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja melalui : Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan kualitas kelembagaan, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja
6. Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja melalui Job Fair
7. Peningkatan kesempatan kerja masyarakat miskin upaya peningkatan kesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan dilakukan secara mandiri
8. Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat miskin, peningkatan akses permodalan dilakukan dengan membangun kemitraan bersama koperasi, instansi terkait, lembaga keuangan dan BUMN/BUMD. Selain itu dilakukan pula pendampingan pengelolaan manajerial dan pemasaran.
9. Peningkatan akses sumberdaya produktif bagi kelompok masyarakat miskin, peningkatan akses sumberdaya produktif dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan

penggunaan teknologi tepat guna, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan usaha

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

Arah kebijakan untuk mencapai target terwujudnya kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.

1. Meningkatkan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

   Upaya peningkatan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dilakukan antara lain melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan antar negara dalam rangka penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara) maupun transmigrasi, disertai peningkatan kualitas tenaga kerja dengan ketrampilan khusus terhadap tenaga kerja yang akan masuk dalam mekanisme dan program kerja tersebut. Selain itu dikembangkan pula jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri

2. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

   Upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilakukan diantaranya melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan pemagangan di dalam dan luar negeri. Selain itu perlunya penyesuaian kurikulum pelatihan dan keterampilan dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pasar kerja.

3. Meningkatkan Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum

   Upaya perlindungan dan penegakan hukum diarahkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, sehingga akan menjamin keberlanjutan usaha dan terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha.

4. Meningkatkan Realiasasi Investasi Dunia Usaha, melalui :
   a. Peningkatan Investasi Sektor Swasta;
   b. Peningkatan Hubungan Industri Hulu – Hilir.

5. Meningkatkan Usaha Kelembagaan Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, melalui Pengembangan Usaha dan Kelembagaan UMKM-K;

6. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Berusaha, Kualitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja melalui :
   a. Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha;
   b. Peningkatan Kualitas, Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

Arah kebijakan untuk mencapai target menurunnya hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan sampai dengan tahun 2015 adalah:

1. Distrubusi, Cadangan dan Mutu Pangan Masyarakat melalui Peningkatan Ketahanan Pangan dengan indikator kinerja adalah tingkat produksi beras dengan ketersediaan minimal 90 % dari kebutuhan domestik serta meningkatkan ketersediaan pangan hewani sampai tahun 2012;
2. Meningkatkan Produktivitas Produksi Pertanian dalam Arti Luas, melalui : Pengembangan Agribisnis; Pengembangan Sumber Daya Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan
3. Meningkatkan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, melalui Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin;
4. Bantuan Khusus Untuk Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Air Terutama Irigasi yang Mendukung Ketahanan Pangan, Ketersediaan Air Baku, Konsevasi, Sungai – Waduk, Situ dalam Mengantisipasi Banjir dan kekeringan, melalui Pengembangan, Pengelolaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air;
6. Peningkatan Investasi pada Prasarana Dasar (Kesehatan, Air, Sanitasi) terutama di Daerah Perdesaan dan Perkampungan Miskin di Wilayah Perkotaan
7. Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat dan Merevitalisasi Posyandu
8. Memperkuat Program Pangan dan Gizi masyarakat
9. Peningkatan Ketahanan Pangan pada Tingkat Kabupaten/Kota
10. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Perbaikan Teknologi Budidaya dan Teknologi Pengolahan pangan
11. Memperkuat Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Termasuk Sistem Kewaspadaan Dini (*Early Warning System*)

	Tujuan 2. **Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua**

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Arah kebijakan untuk mencapai target menjamin semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun pada 2015 dapat menyelesaikan pendidikan dasar

1. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Anak Prasekolah, melalui :

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Wajib Belajar 12 Tahun;

2. Meningkatkan Budaya Baca dan Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah, Melalui Pengembangan Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik, melalui :
   a. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   b. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan.
4. Meningkatkan Akses Orang Dewasa Untuk Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan Hidup;
5. Meningkatkan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, melalui Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin;
6. Kebijakan Alokasi Dana Pemerintah Provinsi Banten Untuk Bidang Pendidikan Minimal Sebesar 20% dari Jumlah APBD akan Diteruskan Untuk Pengakselerasi Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua pada tahun 2015.

	Tujuan 3. **Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

Arah kebijakan untuk mencapai target menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Anak Prasekolah, melalui :
   a. Pendidikan Anak Usia Dini;
   b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Wajib Belajar 12 Tahun;
   c. Pendidikan Menengah.
2. Meningkatkan Budaya Baca dan Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah, melalui Pengembangan Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik, melalui :
   a. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   b. Peningkatan manajemen Pelayanan Pendidikan.
4. Meningkatkan Akses Orang Dewasa Untuk Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan Hidup;
5. Meningkatkan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, melalui Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin;
6. Meningkatkan Aksessibilitas dan Mutu Layanan terhadap Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :
   a. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
   b. Pemberdayaan Sosial.

7. Meningkatkan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, melalui Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin;
8. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Jaringan Kelembagaan Perempuan, melalui Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

	Tujuan 4. **Menurunkan Angka Kematian Anak** balita

Target 4A: menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015

Arah kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan balita adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibiltas Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan, melalui :
   a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
   b. Perbaikan Gizi Masyarakat;
   c. Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan;
   d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
   e. Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatkan Pengembangan Kesehatan Berbasis Masyarakat, melalui :
   a. Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
   b. Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan;
   c. Pengembangan Lingkungan Sehat.
3. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Akibat Persalinan dan Terwujudnya Penduduk yang Berkualitas, melalui Revitalisasi Program Keluarga Berencana;
4. Meningkatkan Aksessibilitas dan Mutu Layanan terhadap Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :
   a. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
   b. Pemberdayaan Sosial.
5. Meningkatkan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, melalui Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin;
6. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Miskin dalam Proses dan pemanfaatan hasil Pembangunan, Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin;
7. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Jaringan Kelembagaan Perempuan, melalui Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
8. Revitalisasi Posyandu di seluruh Kabupaten/Kota
9. Optimalisasi Peran Masyarakat melalui Desa Siaga dan keluarga Siaga

	Tujuan 5. **Meningkatkan Kesehatan Ibu** Melahirkan

Target 5A: menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015

Arah Kebijakan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu adalah :

1. Meningkatkan Aksessibiltas Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan, melalui :

a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
b. Perbaikan Gizi Masyarakat;
c. Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan;
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
e. Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Meningkatkan Pengembangan Kesehatan Berbasis Masyarakat, melalui :
   a. Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
   b. Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan;
   c. Pengembangan Lingkungan Sehat.
3. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Akibat Persalinan dan Terwujudnya penduduk yang berkualitas, melalui Revitalisasi Program Keluarga Berencana;
4. Meningkatkan Aksessibilitas dan Mutu layanan terhadap Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :
   a. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
   b. Pemberdayaan Sosial.
5. Meningkatkan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, melalui Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin;
6. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat miskin dalam Proses dan Pemanfaatan Hasil Pembangunan, Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin;
7. Meningkatkan Kualitas hidup Perempuan dan Anak serta Jaringan Kelembagaan Perempuan, melalui Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
8. Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta Unit Pelayanan Rujukan (Rumah Sakit) di Provinsi Banten, antara lain melalui Pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu di Semua Unit Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta Unit Pelayanan Rujukan Poned dan Rumah Sakit; dan Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan.
9. Penajaman Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) untuk semua Desa di Provinsi Banten, antara lain melalui Penggalangan Kemitraan dengan sektor terkait dalam penajaman kegiatan Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
10. Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga dalam rangka penanggulangan faktor resiko timbulnya masalah kesehatan ibu di Provinsi Banten, antara lain dengan pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor melalui akselerasi implementasi Peraturan Daerah.

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan akses kesehatan reproduksi adalah

1. Meningkatkan Aksessibiltas Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan, melalui :
   a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
   b. Perbaikan Gizi Masyarakat;

c. Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan;
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
e. Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Meningkatkan Pengembangan Kesehatan Berbasis Masyarakat, melalui :
   a. Promosi dan Upaya Kesehatan berbasis masyarakat;
   b. Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan;
   c. Pengembangan Lingkungan Sehat.
3. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Akibat Persalinan dan Terwujudnya Penduduk yang Berkualitas, melalui Revitalisasi Program Keluarga Berencana;
4. Meningkatkan Aksessibilitas dan mutu layanan terhadap masyarakat penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :
   a. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
   b. Pemberdayaan Sosial.
5. Meningkatkan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, melalui Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin;
6. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Miskin dalam Proses dan Pemanfaatan Hasil Pembangunan, melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin;
7. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Jaringan Kelembagaan Perempuan, melalui Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

	Tujuan 6. **Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya**

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDs pada tahun 2015, Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010, dan Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberkolusis) hingga tahun 2015

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya adalah :

1. Meningkatkan Komitmen Penentu Kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (Tuberkulosis), melalui :
   a. Advokasi;
   b. Regulasi;
   c. Ketersediaan Anggaran.
2. Meningkatkan Pengembangan Kesehatan Berbasis Masyarakat, melalui :
   a. Advokasi;
   b. Regulasi;
   c. Ketersediaan Anggaran.
3. Meningkatkan Aksessibilitas dan Mutu Layanan terhadap Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :
   a. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
   b. Pemberdayaan Sosial.
   c. Peran serta masyarakat dalam menjaga Perilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

4. Meningkatkan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, melalui Bantuan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin; Meningkatkan pengetahuan masyarakat yang komprhensif tentang HIV-AIDS
5. Percepatan akses pelayanan kesehatan BAGI penderita hiv aids melalui penambahan Rumah sakit Rujukan dan Puskesmas yang menyediakan layanan VCT, CST, PMTCT dan PTRM;
6. Peningkatan mobilisasi masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS pada populasi rentan melalui ABCD (Abstinent, Be Faithful, Condom dan No Drugs), penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penangulangan HIV-AIDS serta penyakit menular lainnya.
7. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pelatihan dan On Job Training sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi masing-masing.

	Tujuan 7. **Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan

Arah kebijakan dalam rangka memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumberdaya lingkungan adalah:

1. Meningkatkan aksessibilitas orang, barang dan jasa di, dalam dan antar Pusat – pusat Pertumbuhan Wilayah, melalui :
   a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   b. Pengembangan Transportasi, Pos dan Telekomunikasi
2. Meningkatkan Sarana – Prasarana Pendukung Fungsi Kawasan Pusat – Pusat Pertumbuhan, melalui Penataan Perumahan, Permukiman dan Kawasan Sentra Produksi;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya air terutama irigasi yang mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, konsevasi, sungai – waduk, situ dalam mengantisipasi banjir dan kekeringan, melalui Pengembangan, Pengelolaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air;
4. Meningkatkan penyelenggaraan Tata Ruang Daerah dengan keserasian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, melalui :
   a. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;
   b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakaan Lingkungan Hidup;

c. Pengembangan Pertambangan dan Energi;

d. Penataan Ruang.

5. Meningkatkan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan melalui peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis dan potensial kritis; dan peningkatan fungsi RTH sebagai jantung kota dan upaya penghijauan di wilayah perkotaan, dan sekitar pabrik industri.

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010.

Arah kebijakan dalam Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang significant pada tahun 2010

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya air terutama irigasi yang mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, konsevasi, sungai – waduk, situ dalam mengantisipasi banjir dan kekeringan, melalui Pengembangan, Pengelolaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air;
2. Meningkatkan penyelenggaraan Tata Ruang Daerah dengan keserasian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, melalui :
   a. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;
   b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakaan Lingkungan Hidup;
   c. Pengembangan Pertambangan dan Energi;
   d. Penataan Ruang.
3. Pengelolaan sumberdaya hutan dan perikanan yang berkelanjutan
4. Peningkatan fungsi kawasan lindung perairan melalui peningkatan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan konservasi sumberdaya laut; dan peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya kelestarian terumbu karang dan sumberdaya perikanan.

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015

Arah kebijakan dalam rangka menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 adalah:

1. Meningkatkan aksessibilitas orang, barang dan jasa di, dalam dan antar Pusat – pusat Pertumbuhan Wilayah, melalui :
   a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   b. Pengembangan Transportasi, Pos dan Telekomunikasi
2. Meningkatkan Sarana – Prasarana Pendukung Fungsi Kawasan Pusat – Pusat Pertumbuhan, melalui Penataan Perumahan, Permukiman dan Kawasan Sentra Produksi;

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya air terutama irigasi yang mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, konsevasi, sungai – waduk, situ dalam mengantisipasi banjir dan kekeringan, melalui Pengembangan, Pengelolaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air;
4. Meningkatkan penyelenggaraan Tata Ruang Daerah dengan keserasian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, melalui :
   a. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;
   b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakaan Lingkungan Hidup;
   c. Pengembangan Pertambangan dan Energi;
   d. Penataan Ruang.
5. Mendorong sinergitas Pokja AMPL Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan akses AMPL bagi masyarakat tidak mampu;

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

1. Meningkatkan aksessibilitas orang, barang dan jasa di, dalam dan antar Pusat – pusat Pertumbuhan Wilayah, melalui :
   a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   b. Pengembangan Transportasi, Pos dan Telekomunikasi
2. Meningkatkan Sarana – Prasarana Pendukung Fungsi Kawasan Pusat – Pusat Pertumbuhan, melalui Penataan Perumahan, Permukiman dan Kawasan Sentra Produksi;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya air terutama irigasi yang mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, konsevasi, sungai – waduk, situ dalam mengantisipasi banjir dan kekeringan, melalui Pengembangan, Pengelolaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air;
4. Meningkatkan penyelenggaraan Tata Ruang Daerah dengan keserasian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, melalui :
   a. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam;
   b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakaan Lingkungan Hidup;
   c. Pengembangan Pertambangan dan Energi;
   d. Penataan Ruang.
5. Pembangunan rumah sehat bagi penduduk berpenghasilan rendah
6. Dukungan sertifikasi lahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

2.2. Strategi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)

Strategi Pembangunan di Provinsi Banten secara umum merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Banten. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2007-2012 merupakan tahap kedua (tahap revitalisasi-II) dari pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten 2002-2022 (Peraturan Daerah No.11 Tahun 2003) yang telah dirubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yaitu sejak dibentuknya Provinsi Banten berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara administratif terbentuk atas 4 Kabupaten dan 2 Kota yaitu; Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pembentukan daerah otonom baru yang ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 tetang Pembentukan Kota Serang, dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, dengan demikian hingga Tahun 2008 Provinsi Banten telah memiliki 4 (empat) Kabupaten dan 4 (empat) Kota dengan luas wilayah 8.651,2 Km^2.

Strategi Pembangunan Provinsi Banten terdiri dari 4 strategi : 1) strategi perkuatan Perekonomian Daerah melalui pengembangan ekonomi lokal. 2) Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis sumberdaya lokal dan peningkatan peran dan swadaya masyarakat. 3) Strategi revitalisasi kawasan dan wilayah yang diorientasikan pada pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Khusus untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pengembangan pedoman umum untuk SKPD untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan gender pada perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi kebijakan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara khusus strategi pembangunan yang dikembangkan untuk mempercepat pencapaian target MDGs di Provinsi Banten berdasarkan RPJMD Provinsi Banten dapat dijabarkan sebagai berikut :

	Tujuan 1. **Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan**

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015.

Strategi menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari, adalah:

1. Pengembangan ekonomi lokal melalui :
   a. Optimalisasi pemanfataan sumberdaya alam, yang diiringi dengan upaya peningkatan kualitas produksi dan pengembangan pemasaran hasil produksi dan produk unggulan daerah
   b. Pelibatan dan peningkatan daya saing (keahlian) dan jiwa kewirausahaan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam
   c. Peningkatan dan pengembangan daya dukung sumberdaya buatan (prasarana dan sarana) dalam menunjang pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan kualitas masyarakat.
2. strategi "perkuatan struktur ekonomi berbasis agribisnis", prioritas pembangunan diarahkan kepada :
   a. Pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, kebudayaan dan pariwisata;
   b. Penataan ulang struktur industri yang berdaya saing dengan prioritas penggunaan bahan baku lokal unggulan;
   c. Pengembangan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi berbasis masyarakat.
3. Pengembangan pemasaran hasil pertanian/agro yang difokuskan untuk pembangunan Terminal Agro sebagai pasar induk/pemasaran hasil pertanian
4. Mengembangkan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal
5. Mengoptimalkan kelembagaan ekonomi Desa/Kelurahan dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan
6. Meningkatkan fasilitasi Bintek dan pelatihan bagi aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan.
7. Mengoptimalkan bantuan langsung masyarakat kepada masyarakat Desa/Kelurahan.

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

Strategi pencapaian target perwujudan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, adalah:

1. Strategi untuk memperluas kesempatan kerja yaitu:
   a. Meningkatkan fasilitasi dalam upaya memperluas jejaring kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja, baik regional, nasional maupun internasional
   b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat

c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sesuai norma hukum yang berlaku, serta meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan.

2. Strategi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yaitu optimalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja.
3. Pengembangan ekonomi lokal melalui :
   a. Optimalisasi pemanfataan sumberdaya alam, yang diiringi dengan upaya peningkatan kualitas produksi dan pengembangan pemasaran hasil produksi dan produk unggulan daerah
   b. Pelibatan dan peningkatan daya saing (keahlian) dan jiwa kewirausahaan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam
   c. Peningkatan dan pengembangan daya dukung sumberdaya buatan (prasarana dan sarana) dalam menunjang pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan kualitas masyarakat.
4. strategi "perkuatan struktur ekonomi berbasis agribisnis", prioritas pembangunan diarahkan kepada :
   a. Pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, kebudayaan dan pariwisata;
   b. Penataan ulang struktur industri yang berdaya saing dengan prioritas penggunaan bahan baku lokal unggulan;
   c. Pengembangan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi berbasis masyarakat.
5. Pengembangan pemasaran hasil pertanian/agro yang difokuskan untuk pembangunan Terminal Agro sebagai pasar induk/pemasaran hasil pertanian

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

Strategi yang dilakukan dalam menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 adalah:

1. Pengembangan ekonomi berbasis ekonomi lokal
2. Menempatkan pemerintah dari fungsinya sebagai penyedia (provider) menjadi fungsi pembantu (enabler) dan fasilitator dengan demikian subjek pembangunan yakni masyarakat dengan dukungan bersama dari pihak lain yang terlibat.
3. Konsep pengelolaan sumberdaya lokal dengan prinsip TRIBINA meliputi:
   a. Bina Manusia;
   b. Bina Sosial Ekonomi (Usaha); dan
   c. Bina Lingkungan.
4. Berdasarkan pada kemampuan masyarakat.
   - Peningkatan akses, mutu, relevansi dan tata kelola pelayanan pendidikan;

- Pengembangan Bridging Programme (kesetaraan / jembatan penghubung) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha;
- Peningkatan promosi, pelayanan kesehatan dan pengembangan usaha kesehatan berbasis masyarakat;
- Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan, kemasyarakatan dan adat.

5. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan lumbung pangan masyarakat.
6. Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
7. Pengembangan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala.
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga.
9. Pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan melalui pemberian penghargaan, promosi, kampanye dan pendampingan.
10. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan.
11. Peningkatan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen.
12. Peningkatan dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan air tanah untuk pengembangan komoditas pangan

	Tujuan 2. **Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua**

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Strategi yang dikembangkan untuk menjamin pendidikan semua anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar adalah :

1. Peningkatan akses, mutu, relevansi dan tata kelola pelayanan pendidikan;
2. Pengembangan Bridging Programme (kesetaraan / jembatan penghubung) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha;
3. Peningkatan promosi, pelayanan kesehatan dan pengembangan usaha kesehatan berbasis masyarakat;
4. Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan, kemasyarakatan dan adat.
5. Meningkatkan APM SD/MI/Paket A secara optimal dan mengurangi kesenjangan APM SD/MI/Paket A Kabupaten/Kota melalui:
   a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

b. Mendorong dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar pada Kabupaten/Kota yang APM-nya di bawah rata-rata Provinsi Banten.
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A.
d. Fasilitasi pembinaan siswa melalui penguatan bantuan biaya operasional sekolah pada pendidikan SD/MI/Paket A.
e. Mengembangkan kearifan lokal dengan berpedoman pada falsafah ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani'.
f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah (Provinsi, Kabupaten/Kota), masyarakat dan swasta.

6. Menjamin seluruh siswa kelas 1 SD/MI/Paket A dapat menamatkan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, melalui:
   a. Melanjutkan pemberian bantuan operasional sekolah kepada sekolah dasar.
   b. Memberikan dorongan kepada orangtua untuk tetap menyekolahkan anak sampai tamat SD/MI/Paket A.
   c. Penguatan pembinaan potensi siswa pendidikan dasar.
7. Mengoptimalkan pelestarian penduduk melek aksara, melalui:
   a. Memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan Kelompok Belajar Masyarakat (KBM).
   b. Memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan Kelompok Belajar Usaha (KBU).
   c. Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan yaitu Pemerintah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Masyarakat, LSM dan Swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan .

	Tujuan 3. **Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

Strategi pencapaian target menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan, dibidang ketenagakerjaan dan politik adalah:

1. Meningkatkan Rasio APM perempuan terhadap laki-laki untuk semua jenjang pendidikan, melalui:
   a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk peka gender dan menyekolahkan anak perempuan sampai perguruan tinggi.
   b. Memberikan bantuan kepada penduduk perempuan kurang mampu usia sekolah sampai pendidikan tinggi.

c. Pemberian beasiswa kepada penduduk perempuan untuk jenjang pendidikan menengah.

2. Meningkatkan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki serta mengoptimalkan pelestariannya, melalui:
   a. Peningkatan kesadaran penduduk perempuan usia 15 – 24 tahun buta aksara yang telah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) untuk tetap belajar menulis.
   b. Optimalisasi kelompok belajar usaha bagi buta aksara usia 15–24 yang telah memperoleh SUKMA.
3. Mengoptimalkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian, melalui:
   a. Mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam bekerja di sektor non pertanian.
   b. Meningkatkan produktivitas perempuan dalam bekerja.
   c. Memberikan perlindungan kerja terhadap tenaga kerja perempuan.
4. Mengoptimalkan proporsi perempuan yang duduk di DPRD di Wilayah Provinsi Banten, melalui:
   a. Penguatan kebijakan affirmative action untuk peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.
   b. Penguatan pengetahuan dan pemahaman politik perempuan sebelum mereka terjun ke dunia politik.
5. Peningkatan akses, mutu dan tata kelola pelayanan pendidikan
6. Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan, kemasyarakatan dan adat.

	Tujuan 4. **Menurunkan Angka Kematian Anak**

Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015

Strategi pencapaian target menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga sampai dengan 2015 adalah:

1. Pemenuhan buku KIA yang bermanfaat untuk monitoring perkembangan kesehatan anak dan sekaligus sebagai bahan komunikasi antara orangtua/pengasuh anak dengan petugas kesehatan.
2. Pemantapan komitmen dengan penentu kebijakan dan lintas sektor diarahkan pada akselerasi implementasi Peraturan Daerah antara lain melalui pembinaan pelayanan kesehatan neonatal; pembinaan pelayanan kesehatan bayi; pembinaan pelayanan kesehatan anak balita, pemenuhan kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM di Puskesmas, pemenuhan

kecukupan obat dan alat di puskesmas perawatan dan RS, Kabupaten/Kota sesuai dengan Buku Saku Kesehatan.

3. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan antara lain melalui pemenuhan kecukupan tenaga dokter spesialis anak di RS kabupaten/kota, pelatihan manajemen Asfiksia dan manajemen BBLR bagi perawat/bidan di Puskesmas, pelatihan kebutuhan perawat dan bidan di Desa dan faskes (PKM dan RS), pelatihan perinatologi bagi perawat/bidan di Puskesmas Perawatan dan RS, koordinasi Pengelola Data Kesehatan Kabupaten/Kota.
4. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta unit pelayanan rujukan (Rumah Sakit) antara lain melalui peningkatan mutu Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi dan advokasi pada perusahaan untuk menyediakan tempat memerah ASI pada perusahaan dan melaksanakan pemberian ASI segera setelah melahirkan dan pemberian ASI saja hingga bayi usia 6 bulan (esklusif), dilanjutkan hingga 2 tahun dengan memberikan makanan pendamping ASI, pemenuhan kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM di Puskesmas, pelayanan balita sakit di Puskesmas Perawatan dan RS Kabupaten/Kota sesuai standar.
5. Penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam revitalisasi Posyandu antara lain melalui peningkatan kemitraan dengan LSM/Dunia Usaha/Organisasi Keagamaan peningkatan mutu Puskesmas, optimalisasi peran dan fungsi Forum Kesehatan Desa.
6. Revitalisasi Posyandu dalam meningkatkan cakupan imnusasi antara lain melalui pelatihan pemberian imunisasi sesuai standar, pemberian imunisasi dasar lengkap, optimalisasai dan pemantapan peran dan fungsi Posyandu dalam penurunan AKBA.
7. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan bayi dan anak antara lain melalui pemberdayaan masyarakat tentang perawatan bayi, anak balita, penyediaan materi KIE tentang perawatan bayi dan anak balita, peningkatan kualitas lingkungan perumahan
8. Peningkatan akses, mutu, relevansi dan tata kelola pelayanan pendidikan;
9. Peningkatan promosi, pelayanan kesehatan dan pengembangan usaha kesehatan berbasis masyarakat;
10. Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan, kemasyarakatan dan adat.

	Tujuan 5. **Meningkatkan Kesehatan Ibu**

Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015

Strategi pencapaian target menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah:

1. Pemantapan komitmen dengan penentu kebijakan dan lintas sektor dalam rangka akselerasi implementasi Peraturan Daerah antara lain melalui (a) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan di Kabupaten/Kota prioritas; (b) Pemantapan Organisasi Profesi, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Banten dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Provinsi Banten Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya; (c) Meningkatkan kemitraan dengan LSM/Dunia Usaha/Organisasi Masyarakat/Organisasi Keagamaan dalam rangka penurunan kematian ibu; (d) Talkshow penanggulangan masalah kesehatan reproduksi wanita bagi kader PKK; (e) Penggerakan masyarakat melalui sosialisasi pembentukan kelompok peminat kesehatan ibu dan anak; dan (f) Pengembangan TOGA untuk mendukung pengobatan sendiri.
2. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan antara melalui (a) Peningkatan SDM dalam penanganan administrasi dan pengelolaan keuangan; (b) Peningkatan kualitas manajemen pembelajaran di Institusi pendidikan tenaga kesehatan; dan (c) Koordinasi pengelola data kesehatan Kabupaten/Kota.
3. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta unit pelayanan rujukan Poned dan Rumah Sakit antara lain melalui (a) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; (b) Pelatihan PONED termasuk evaluasi pasca latih bagi tim PONED di Puskesmas; (c) Pelatihan pelayanan pasca keguguran untuk tim PONED; (d) Penyediaan sarana & prasarana untuk PONED, KB, pelayanan pasca keguguran; (e) Penyediaan ambulans PONED untuk mendukung rujukan PONED; (f) Orientasi ANC terpadu bagi puskesmas PONED, Bintek Tim PONEK RS di Kabupaten/Kota, Pelatihan klinis pelayanan KB di RS Kabupaten/Kota, Pembinaan RS dan klinik swasta oleh RS PONEK (RS dan klinik yang ada di sekitar PONEK), Pemenuhan standar sarana dan peralatan RS PONEK di Kabupaten/Kota dan Pembuatan SK Tim PONEK kabupaten/kota; (g) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; dan (h) Peningkatan mutu RS dalam pelayanan sistem rujukan PONEK, (i) Peningkatan mutu pelayanan KIA perlu mempertimbangkan saat melakukan rotasi petugas

kesehatan di Pustu, Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan; (j). Menjaga mutu pelayanan KIA perlu dilakukan monitoring kunjungan rumah pasca persalinan di Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin, dan PKD; (k). Menjaga mutu pelayanan KIA perlu dilakukan standarisasi alat pelayanan PONED, PONEK melalui TERA ULANG fungsi, akurasi dan kelengkapan alat.

4. Penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam penajaman kegiatan Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) antara lain melalui (a) Pemeliharaan kesehatan ibu maternal dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi; (b) Orientasi dan peningkatan pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun; (c) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; dan (d) Fasilitasi perencanaan terpadu Kabupaten/Kota dalam pecepatan penurunan angka kematian ibu yang responsif gender (DTPS).
5. Penguatan semua kelembagaan lintas sektor yang ada di desa yang dapat dikoordinasi dalam satu wadah untuk upaya penyelamatan ibu antara lain melalui (a) Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun; (b) Optimalisasi peran dan fungsi Posyandu dlm penurunan angka kematian ibu bersalin; (c) Pemantapan peran danfungsi Posyandu dalam penurunan kematian ibu; dan (d) Optimalisasi peran dan fungsi FKD/FKK dalam penurunan Kematian Ibu.
6. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan ibu antara lain melalui (a) Optimalisasi peran dan fungsi Posyandu dalam penurunan angka kematian ibu bersalin; dan (b) pemantapan peran dan fungsi Posyandu dalam penurunan kematian ibu.
7. Pemerataan jangkauan jaminan pemeliharaan maternal antara lain melalui (a) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; (b) Pemeliharaan kesehatan ibu maternal dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi; (c) Penyediaan sarana & prasarana untuk PONED, KB, pelayanan pasca keguguran; dan (d) Penyediaan ambulans PONED untuk mendukung rujukan PONED, (e) apabila ibu telah memiliki anak sudah lebih dari 2, maka yang bersangkutan (ibu melahirkan) harus menggunakan KONTAP (Kontrasepsi Mantap).
8. Pengembangan Bridging Programme (kesetaraan / jembatan penghubung) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha;
9. Peningkatan promosi, pelayanan kesehatan dan pengembangan usaha kesehatan berbasis masyarakat;
10. Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan, kemasyarakatan dan adat.

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

Strategi pencapaian target mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 adalah:

1. Peningkatan promosi, pelayanan kesehatan dan pengembangan usaha kesehatan berbasis masyarakat;
2. Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan, kemasyarakatan dan adat.
3. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana.
4. Pemenuhan akses dan mutu pelayanan keluarga berencana antara lain melalui pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi untuk mendapatkan pelayanan antenatal, meningkatkan persentase Cakupan Peserta KB Aktif (CPR), Unmeet Need; pelayanan statis dan mobile KB MOW, MOP, IUD, Implan, Suntik, Pil dan cabut implan.
5. Peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat masyarakat antara lain melalui pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi dengan memberikan pelatihan fasilitas pelayanan yang ramah remaja bagi puskesmas, meningkatkan peran serta perusahaan dan masyarakat dalam program KB dengan advokasi penggerakan KB, penyediaan media promosi dan KIE, penggerakan lini lapangan, Peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR.

	Tujuan 6. **Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular**

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDs pada tahun 2015, Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010; dan Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberkolusis) hingga tahun 2015.

Strategi pencapaian target memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya adalah:

1. Pemantapan komitmen dengan penentu kebijakan dan lintas sektor melalui akselerasi implementasi Peraturan Daerah antara lain dengan advokasi, sosialisasi dan KIE,
2. Pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan antara lain dengan pelatihan surveilance, pelatihan pengurangan dampak buruk (harm reduction) bagi petugas di sarana kesehatan, Pelatihan VCT, CST dan IMS bagi petugas di fasilitas kesehatan, pelatihan PMTCT bagi petugas di sarana kesehatan, Program TB dengan strategi DOTS, pelatihan

management program baik HIV-AIDS, TB maupun malaria.

3. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) serta unit pelayanan rujukan (Rumah Sakit) antara lain dengan tersedianya dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan VCT, CST, PMTC dan IMS, dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan pengurangan dampak buruk dan PMTCT, pengadaan metadon, pengadaan sarana dan prasarana Pelayanan TB sesuai standar dan dengan strategi DOTS, penyelenggaraan DOTS di Puskesmas serta pengadaan mikroskop dan bahan laboratorium (reagen, pot sputum, slide, box slide) untuk pemeriksaan secara mikroskopis.
4. Penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular antara lain dengan pengembangan model intervensi lintas sektor dan keterlibatan LSM peduli AIDS dan penyakit lainnya (seperti PABM: pemulihan adiksi berbasis masyarakat , GKNB: Gerakan Korban Napza Banten) dan sosialisasi pencegahan penyakit Menular, dialog interaktif di televisi, media .
5. Penemuan kasus malaria secara ACD (Active Case Detection) dan PCD (Pasive Case Detection) dengan di Kabupaten/Kota endemis malaria, dengan pengadaan insektisida
6. Penyedian Obat-obatan dan logistik lainnya.
6. Peningkatan anggaran untuk survei dan penelitian untuk mendapatkan baseline atau data dasar seperti pengambilan darah massal (sero survey), operasional Riset, ACD dan PCD untuk, dll program malaria, Riskesdas

	Tujuan 7. **Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan

Strategi yang diterapkan adalah :

1. Revitalisasi Kawasan dan Wilayah diorientasikan pada pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada pengembangan dan pengintegrasian kawasan melalui pembentukan keterkaitan geografis dan fungsional antar kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (pusat pertumbuhan). Pengembangan kawasan terpadu pada prinsipnya mengandung makna bahwa upaya pengembangan kawasan dilaksanakan secara terpadu sehingga diharapkan

mampu : (1) meminimalkan (memecahkan) berbagai permasalahan mendasar pada setiap kawasan, (2) mengembangkan dan meningkatkan potensi pada setiap kawasan, dan (3) menciptakan sinergi dan integrasi (keterkaitan) fungsional yang kuat antar kawasan.

2. pada Pengembangan wilayah produktif (wilayah pertumbuhan ekonomi tinggi) dengan infrastruktur yang memadai; dan Pengembangan kawasan dan wilayah strategis melalui pola multigates system (3 pintu keluar-masuk wilayah Banten).
3. Pengembangan kawasan juga diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota pada kawasan tertinggal, kawasan pengembangan ekonomi, kawasan perbatasan dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Meningkatkan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan melalui pengelolaan lahan kritis dengan cara konservasi lahan kritis berupa usaha pencegahan kerusakan, memperbaiki kerusakan, pemeliharaan dan mempertahankan kesuburan lahan serta meningkatkan kesuburan lahan. Beberapa tindakan memperkuat konservasi tanah dan air dapat dilakukan melalui: (a) pengaturan pola tanam yang tepat; (b) pengolahan tanah menurut kontur; (c) penggunakan bahan organik; (d) peletakan sisa tanaman/mulsa sepanjang kontur; (e) diversifikasi usaha tani termasuk tanaman pohon; (f) pemeliharaan atau pembuatan hutan di atas lereng; (g) perlindungan tanah dengan tanaman penutup tanah; dan (h) peternakan dikandangkan.
5. Mengurangi emisi karbon dioksida melalui pembangunan jaringan dan pembangkit listrik dengan potensi sumber energi setempat dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber–sumber energi alternative ramah lingkungan yang telah banyak berkembang antara lain pemanfaatan biogas dari kotoran ternak, limbah tahu/tempe dan limbah domestik rumah tangga, serta mengembangkan pemakaian peralatan hemat energy
6. Mengurangi jumlah konsumsi bahan perusak ozon melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam kampanye lingkungan terkait dengan pengurangan penggunaan refrigant dalam bentuk penyebarluasan leaflet mengenai bahaya sinar UVB bagi kesehatan masyarakat yang salah satu penyebabnya karena adanya penggunaan refrigerant yang tidak ramah lingkungan serta melakukan pengawasan atas peredaran BPO melalui :
   a. Mendatangi bengkel mobil, kulkas dan AC guna mendata dan mengarahkan pemilik bengkel untuk menggunakan refrigerant yang ramah lingkungan.

b. Bekerjasama dengan Kabupaten/Kota, meminta data dari bengkel mobil, kulkas dan AC jumlah refrigerant yang terjual serta mendata alamat distributor/pemasok refrigerant tersebut.

7. Mempertahankan jumlah tangkapan ikan yang berada pada batasan yang aman melalui peningkatan pemanfaatan bantuan kapal penangkap ikan dengan melibatkan masyarakat.

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010.

Strategi untuk percepatan pencapaian target MDGs dalam menanggulangi kerusakan keanekaragaman hadyai adalah :

1. Revitalisasi Kawasan dan Wilayah diorientasikan pada pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada pengembangan dan pengintegrasian kawasan melalui pembentukan keterkaitan geografis dan fungsional antar kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (pusat pertumbuhan). Pengembangan kawasan terpadu pada prinsipnya mengandung makna bahwa upaya pengembangan kawasan dilaksanakan secara terpadu sehingga diharapkan mampu : (1) meminimalkan (memecahkan) berbagai permasalahan mendasar pada setiap kawasan, (2) mengembangkan dan meningkatkan potensi pada setiap kawasan, dan (3) menciptakan sinergi dan integrasi (keterkaitan) fungsional yang kuat antar kawasan.
2. Pengembangan kawasan juga diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota pada kawasan tertinggal, kawasan pengembangan ekonomi, kawasan perbatasan dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembangunan kawasan untuk sektor ekonomi dan non ekonomi dilaksanakan berlandaskan pada kerangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW masing-masing strata wilayah. Dalam kerangka pemerataan pembangunan daerah, perlu adanya keterkaitan antara pembangunan kawasan, pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan sektor-sektor pendukung lainnya melalui pendekatan kesisteman, yaitu : Sistem pengaturan tata ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang), Sistem pergerakan ekonomi (sistem pergerakan produk barang dan jasa), Sistem Jaringan Transportasi (sistem dukungan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kereta api dll), dan Sistem Pengaturan Kegiatan (sistem yang mengatur kewenangan masing-masing instansi dan stakeholder baik provinsi, kabupaten/kota maupun masyarakat). Melalui pendekatan kesisteman ini diharapkan akan terwujud pemerataan hasil pembangunan yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan sektor ekonomi dan stabilitas daerah. Dengan

penyebaran jaringan prasarana secara merata, maka kegiatan sektor-sektor ekonomi daerah cepat tumbuh akan lebih meningkat dan daerah-daerah tertinggal serta kantong-kantong kemiskinan akan lebih berkembang.

3. Mempertahankan fungsi hutan lindung dengan membangun komitmen dengan stakeholders untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas sumber daya hutan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan dengan melibatkan masyarakat desa di sekitar hutan, dan meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan kawasan lindung dengan melibatkan masyarakat lokal.
4. Meningkatkan fungsi kawasan lindung perairan dengan meningkatkan kesadaran dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan sumberdaya di kawasan konservasi sumberdaya laut.

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015

Strategi pencapaian target menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar yaitu:

1. Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air bersih melalui peningkatan layanan jaringan perpipaan air bersih PDAM di perkotaan; mengembangkan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas), peningkatan prasarana dan sarana air minum yang aman dan sehat, mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum; dan peningkatan kinerja pengelolaan air minum melalui pembinaan SDM.
2. Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar melalui peningkatan ketersediaan prasarana sarana sanitasi dasar yang memadai melalui partisipasi masyarakat; mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase; dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase melalui pembinaan SDM.
3. Meningkatkan kapasitas Pokja AMPL dalam penyusunan program/ Kegiatan

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

Strategi pencapaian target mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh yaitu mengurangi proporsi rumah tangga kumuh perkotaan melalui:

1. Mengoptimalkan peran stakeholder dalam pembangunan rumah.

2. Memanfaatkan potensi lembaga pembiayaan keuangan lokal (BKK, BPR, BMT), dalam pembiayaan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
3. Melanjutkan program program pensertifikatan tanah secara masal dan murah
4. Pembangunan rumah sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah

2.3. Target Kinerja Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) Banten

Target kinerja dalam pencapaian target indikator masing-masing tujuan MDGs adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Pencapaian MDGs Banten

	Tujuan 1 **Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan**

No	**Indikator MDGs**	**Kondisi saat Ini**	**Target**				
		2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan							
Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015							
1.1	Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional	7,16	6,32	6,02	5,72	5,42	5,02
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,00	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
Target 1B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda							
1.4	Laju PDRB per tenaga kerja	3,64 (2009)	3,91	4,18	4,46	4,73	5,00
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,55 (2009)	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	0,32 (2009)	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20
Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015							
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan	14,1% (Riskesdas 2007)	16,6%	16,0%	15,4%	14,8%	14,05%

	rendah / kekurangan gizi						
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	4,4 % (Riskesdas 2007)	3,9%	3,4%	2,9%	2,4%	2,15%
	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	95%	100%	100%	100%	100%	100%
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	12,20 % (Riskesdas 2007)	12,10%	12,0%	11,90%	11,80%	11,70%
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum						
	-1.400 Kkal/kapita/ hari	9,71 % (susenas 2009)	9,4%	9,1%	8,8%	8,5%	8,3%
	- 2.000 kkal/kapita/ hari	57,31 % (susenas 2009)	54%	49%	44%	39%	34%

	Tujuan 2. **Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua**

No	**Indikator MDGs**	**Kondisi saat Ini**	**Target**				
		2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua							
Target 2A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar							
2.1	APM SD/MI/Paket A (%)	98,76%	99,0%	99,5%	99,9%	99,9%	100%
2.2	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD	NA					
2.3	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	99,4%	99,9%	100%	100%	100%	100%
	-Laki-laki	99,96%	100%	100%	100%	100%	100%
	-Perempuan	99,92%	99,9%	100%	100%	100%	100%

	Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No	Indikator MDGs	Kondisi saat Ini	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan							
Target 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015							
3.1	Rasio perempua terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi :						
	- Rasio APM perempua n/laki-laki di SD	0,98	0,99	0,99	1	1	1
	- Rasio APM perempua n/laki-laki di SMP	0,78	0,95	0,97	0,99	1	1
	- Rasio APM perempua n/laki-laki di SMA	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94
	- Rasio APM perempua n/laki-laki di Perguruan Tinggi	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89
3.2	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki klp usia 15-24 tahun	0,99	1	1	1	1	1
3.3	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	14,62 % (2009)	11,05 % (2010)	14%	16%	18%	20%
3.4	Persentase kursi yang di duduki perempuan di DPRD	6,6 % (2004)	17,64 % (2009)	NA	NA	30%	30 % (2014)

	Tujuan 4. **Menurunkan Angka Kematian Anak**

No	Indikator MDGs	Kondisi saat Ini	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak							
Target 4A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015							
4.1	Angka Kematian Balita (AKABA) / 1.000 kelahiran hidup	58,9 (Riskedas 2007)	54	50	46	42	38
4.1.1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	76,26%	80%	81%	83%	85%	87%
4.2	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 kelahiran hidup	22,8	20,5	19,3	18,00	16,7	15,0
4.2.1	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	86,67%	88%	90%	91%	92%	93%
4.2.2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	83,90%	85%	86%	87%	90%	91%
4.3	Cakupan pelayanan antenatal (K4)	84,43	86	87	88	89	90
4.4	Persentase anak usia 1 th yang di imunisasi campak	96,3%	97%	99%	100%	100%	100%

	Tujuan 5. **Meningkatkan Kesehatan Ibu**

No	Indikator MDGs	Kondisi saat Ini	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu							
Target 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu Hingga Tiga Perempat dalam Kurun Waktu 1990-2015							
5.1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000	187,3	170,24	153,18	136,12	119,06	102

	Kelahiran Hidup						
5.2	Persentasi ibu bersalin yang di tolong tenaga kesehatan terlatih (PN)	85,5%	87%	88%	89%	90%	92%
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015							
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun	55,5	57,1	58,6	60,1	61,6	62,1
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)	21,6	21,1	20,7	20,2	19,7	19,2
5.5	Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)	9,0 (SDKI 2007)	7,3	6,7	6,1	5,5	4,9

	Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

No	**Indikator MDGs**	**Kondisi saat Ini**	**Target**				
		2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya							
Target 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS pada tahun 2015							
5.1	Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun	0,04	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
5.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir	WPS = 26% Psgn Tetap =2% Psgn ≠tetap = 36% (STBP 2009) SSP	P=35 L=20	P=45 L=20	P=55 L=40	P=65 L=50	P=75 L=6o

		2009 : L=2,9% P=14,3 %					
5.3	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	Mendengar =99,9% Tahu HIV Komperensif = 22,6% Tahu Penularan =48,1% Tahu Pencegahan =48,1%	75%	85%	90%	95%	100%
Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015							
6.4	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral	83,5%	90%	93%	95%	97%	99%
	Prosentase ODHA yang mendapat Anti Retriviral Treatment (ART)	83,5%	90%	93%	95%	97%	99%
Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015							
6.5	Angka kejadian tuberculosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/tahun)	80	78	76	74	72	70
6.6	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	343 (Kemenkes 1990)	231	228	226	224	222
6.7	Tingkat kematian karena tuberculosis (per 100.000 penduduk)	1,46%	1,20	1,00	0,80	0,60	0,40
6.8	Proporsi jumlah kasus tuberculosis	70%	74%	78%	82%	86%	90%

	yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)						
	Presentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan disembuhkan	86%	86%	87%	87%	88%	88%
6.9	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil di obati dalam program DOTS (sucses rate)	87%	87,5%	88%	88,5%	90%	90,5%
6.10	Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk	0,49	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
	Penyakit Lainnya						
-	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	57,49%	57%	56,5%	56%	55,5%	55%
-	Angka Kematian DBD (%)	0,85	0,6	0,4	0,2	0,1	0

	Tujuan 7. **Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

No	Indikator MDGs	Kondisi saat Ini	Target				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup							
Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang							
7.1	Ratio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan	16,68 % (2009)	18%	20%	22%	24%	26%
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2e)	NA					
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metric	NA					

	ton						
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	NA					
Target 7B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang siginfikan pada tahun 2010							
7.5	Rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	11,8%	12,5%	13%	14%	15%	16%
7.6	Ratio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan Banten	4,04%	4,30%	5%	5,30%	6%	6,30%
Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015.							
7.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	27,47 % (Susenas 2009)	29,79%	30,95%	32,87%	34,03%	35,19 %
	Perkotaan	27,54% (Susenas 2009)	32,43%	34,88%	37,33%	39,78%	42,23 %
	perdesaan	27,35 (Susenas 2009)	28,11%	28,49%	28,87%	29,25%	29,63 %
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak	58,82 % (Susenas 2009)	67,42%	71,72%	76,02%	80,32%	84,72 %
	Perkotaan	77,03% (Susenas 2009)	82,31%	84,95%	87,59%	90,23%	92,87 %
	Perdesaan	30,10% (Susenas 2009)	35,94%	38,86%	41,78%	44,70%	47,62 %
Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020							
7.9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	15,7 % (2009)	14,7%	14,2%	13,7%	13,2%	12,7%

2.4. Program dan Kegiatan Percepatan Pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)

	Tujuan 1. **Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan**

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015

Berbagai program dan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs Provinsi Banten dirinci per program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan masyarakat miskin :
   a. Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
   b. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut, air payau dan air tawar
   c. Bimbingan Sosial Motivasi Fakir Miskin dan Fasilitasi Bantuan KUBE
   d. KUBE Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Modal Stimulan UEP (BLPS)
   e. Bantuan UEP Program Pemberdayaan Sosial dan Bantuan UEP Keluarga Rawan Sosial Ekonomi
   f. Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bantuan Stimulan UEP KTK/PM
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
   a. Pemberdayaan Sosial Keterampilan dan Bantuan UEP Anak Jalanan
   b. Praktek Belajar Kerja (PBK) dan Bantuan UEP
   c. Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bantuan UEP Gepeng, remaja putus sekolah dan wanita tuna susila
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
   a. Pelatihan fasilitator santri bangun desa
   b. Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui pelatihan keuangan bagi pengelola kegiatan
   c. Bantuan Peralatan bagi KUB Komoditi TPT
   d. Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses Produksi IKM Pangan
   e. Pengembangan desain & diversifikasi komoditas kerajinan berbasis budaya daerah
   f. Bintek Diversifikasi Produk Rumput Laut, ikan laut dan eceng gondok
   g. Pelatihan berbasis masyarakat kejuruan: Sepeda motor, menjahit, audio, las, service HP

h. Informasi Bursa Tenaga Kerja melalui Bursa Kerja Online
i. Fasilitasi wisata Kuliner dan advokasi sadar wisata
j. Peningkatan kerjasama diklat dengan dunia usaha/industri serta penyediaan bantuan biaya operasional pelaksanaan magang/praktek kerja industri dalam maupun luar negeri

4. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
   a. Bantua usaha untuk ekonomi produktif
   b. Pelatihan untuk pendampingan kelompok UPPKS

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

Berbagai program dan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs Provinsi Banten dirinci per program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Produktivitas dan Perlindungan tenaga Kerja
   a. Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
   a. Pelatihan fasilitator santri bangun desa
   b. Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui pelatihan keuangan bagi pengelola kegiatan
   c. Bantuan Peralatan bagi KUB Komoditi TPT
   d. Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses Produksi IKM Pangan
   e. Pengembangan desain & diversifikasi komoditas kerajinan berbasis budaya daerah
   f. Bintek Diversifikasi Produk Rumput Laut, ikan laut dan eceng gondok
   g. Pelatihan berbasis masyarakat kejuruan: Sepeda motor, menjahit, audio, las, service HP
   h. Informasi Bursa Tenaga Kerja melalui Bursa Kerja Online
3. Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan Hidup
   a. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal serta pengembangan dan perluasan penyelenggaran Paket A, B,C
   b. Penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan non formal
   c. Penguatan kelembagaan pendidikan ketrampilan masyarakat dan kelembagaan pemberdayaan MPKN, MPKP dan MPKD

d. Peningkatan kerjasama diklat dengan dunia usaha/industry serta penyediaan bantuan biaya operasional pelaksanaan magang/praktek kerja industry dalam maupun luar negeri

3. Peningkatan peran serta pemuda
   a. Pelatihan ketrampilan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kader pemuda serta pengembangan sarana prasarana kepemudaan
4. Program perlindungan dan jaminan sosial
   a. Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat
   b. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dengan PNPM Mandiri serta Pengembangan BUMD dan lembaga keuangan mikro pedesaan
5. Program Pemberdayaan masyarakat miskin
   a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
   b. Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat
   c. Peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pemberdayaan dan pembinaan ekonomi masyarakat pesisir
   d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Agribisnis
6. Peningkatan produksi mutu produk pertanian tanaman bahan makanan, pengolahan pasca panen hasil pertanian hortikultura serta produksi peternakan
   a. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan
   b. Peningkatan pemanfaatan dan penerapan teknologi pertanian, percontohan kaji kerap teknologi serta pelatihan petani hutan dan kebun
   c. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian serta diklat sumberdaya manusia pertanian
   d. Pemberdayaan kelompok tani dan pekebun, kelompok usaha perhutanan rakyat, serta ekonomi masyarakat sekitar hutan dan kebun
   e. Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dan pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan dan nelayan perikanan tangkap serta pengembangan usaha perdagangan perikanan
7. Pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan

a. Pengendalian dan pembinaan mutu dan perekayasaan olahan hasil perikanan serta peningkatan pemasaran, standar mutu dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan

8. Peningkatan investasi dunia usaha
   a. Pengembangan perdagangan dan peningkatan akses informasi serta fasilitasi ekspor dan impor pelaku usaha kecil dan menengah
9. Pengembangan usaha dan kelembagaan UMKM-K
   a. Fasilitasi akses bagi UMKM-K terhadap sumberdaya produktif dan SDA serta dukungan mengatasi kesenjangan kredit
10. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha
   a. Pengembangan kelembagaan, produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
11. Peningkatan kualitas kelembagaan, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja
   a. Peningkatan, keahlian, akses tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
   b. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hokum di bidang norma ketenagakerjaan, K3, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak
   c. Fasilitasi hubungan industrial, pengupahan dan jamsostek serta persyaratan kerja dan pemasyarakatan pemasyarakatan hubungan industrial

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

Program dan kegiatan dalam menurunkan kelaparan adalah :

1. Program peningkatan ketahanan pangan
   a. Pengelolaan dan penanganan kerawanan dan kewaspadaan pangan
   b. Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keanekaragaman pangan
   c. Diversifikasi dan ketahahanan pangan masyarakat
   d. Pemanfaatan dan penerapan teknologi kehutanan, perkebunan, dan perikanan
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
   a. Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi puskemas perawatan dan RSUD, dan puskesmas non perawatan
   b. Penyediaan obat gizi buruk
   c. Pendampingan gizi buruk oleh kader
   d. Pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi petugas puskesmas
   e. Pelatihan ulang kader posyandu

f. Penyediaan sarana dan prasarana posyandu dan biaya operasional
g. Workshop Therapeutic Feeding Center
h. Pelacakan dan validasi balita gizi buruk
i. Penyediaan makanan tambahan ASI
j. Penyediaan makanan tambahan ibu hamil
k. Promosi program gizi

3. Program peningkatan keberdayaan masyarakat dan lembaga perdesaan
   a. Pengembangan forum kader posyandu dan model posyandu Asuhan DIni Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (ADITUKA)
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial
   a. Bantuan fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil
   b. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dengan PNPM Mandiri

	Tujuan 2. **Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua**

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Program dan kegiatan yang untuk menjamin pendidikan untuk anak-anak, laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar adalah :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
   a. Penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan pembelajaran PAUD
2. Pendidikan Wajar Dikdas 9 tahun dan Wajar Dikdas 12 tahun
   b. Penyediaan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sarana dan prasarana serta peningkatan pembelajaran, minat, bakat dan kreatifitas peserta pendidikan dasar
   c. Penerapan manajemen berbasis sekolah dan peningkatan wawasan kebudayaan pada pendidikan dasar
   d. Pembangunan unit sekolah baru dan unit kelas baru
3. Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
   a. Penyediaan sarana dan prasarana TBM, pemasyarakatan minat baca masyarakat serta pengembangan perpustakaan dan penyediaan koleksi bahan pustaka perpustakaan umum daerah
4. Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan
   a. Pengembangan diklat dan sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hokum bagi pendidik dan tenaga kependidikan

5. Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan Hidup
   a. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal serta pengembangan dan perluasan penyelenggaran Paket A, B,C
   b. Penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan non formal
   c. Penguatan kelembagaan pendidikan ketrampilan masyarakat dan kelembagaan pemberdayaan MPKN, MPKP dan MPKD
6. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah
   a. Pemberian Bantuan siswa miskin tingkat MI.MTs dan MA.

	Tujuan 3. **Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pendidikan Wajar Dikdas 9 tahun dan Wajar Dikdas 12 tahun
   a. Penyediaan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sarana dan prasarana serta peningkatan pembelajaran, minat, bakat dan kreatifitas peserta pendidikan dasar
   b. Penerapan manajemen berbasis sekolah dan peningkatan wawasan kebudayaan pada pendidikan dasar
   c. Pembangunan unit sekolah baru dan unit kelas baru
2. Pendidikan Menengah
   a. Penyediaan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sarana dan prasarana serta peningkatan pembelajaran, minat, bakat dan kreatifitas peserta pendidikan dasar
   b. Penerapan manajemen berbasis sekolah dan peningkatan wawasan kebudayaan pada pendidikan dasar
   c. Penyiapan bantuan operasional SMA CMBBS
   d. Pembangunan unit sekolah baru dan unit kelas baru
3. Pendidikan Tinggi
   a. Pengembangan dan penyediaan bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi
4. Pendidikan politik masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan
   a. Koordinasi, pembinaan dan pengembangan budaya politik dan demokrasi bagi ormas, LSM dan PErempuan
5. Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan Hidup

a. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal serta pengembangan dan perluasan penyelenggaran Paket A, B,C
b. Penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan non formal
c. Penguatan kelembagaan pendidikan ketrampilan masyarakat dan kelembagaan pemberdayaan MPKN, MPKP dan MPK

6. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
   a. Pengembangan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan
   b. Pengembangan pemberdayaan manajemen kesetaraan gender, P2WKSS dan advokasi lembaga/organisasi/dunia usaha dalam pelaksanaan PUG

	Tujuan 4. **Menurunkan Angka Kematian Anak**

Target 4A: menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015

Program dan kegiatang yang akan dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka kematian Balita adalah :

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
   a. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Neonatal
   b. Pemberian Asuhan bayi baru lahir sesuai standar
   c. Pemenuhan kebutuhan perawat dan bidan di desa dan fasilitas kesehatan
   d. Pelatihan manajemen asfiksia dan manajemen BBLR bagi bidan dan perawat di puskesmas
   e. Distribusi vaksin HB O
   f. Penyediaan perinatalogi set bagi puskesamas perawatan dan RS Kab/kota
   g. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan BBL
   h. Pelaksanaan Audit maternal perinatal (AMP) di Kab/Kota
   i. Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS
   j. Pemberian pelayanan kesehatan pada bayi sesuai standar
   k. Peningkatan jumlah puskesmas dengan rantai dingin yang efektif
   l. Pelatihan pemberian imunisasi sesuai standar
   m. Pemberian imunisasi campak pada bayi
   n. Distribusi vaksinasi dasar (BCG, Polio 1-4, campak)
   o. Pemberian imunisasi dasar lengkap
   p. Pemberian vitamin A 100.000 IU bagi bayi (6-11 bulan)
   q. Penyediaan oralit dan zink di puskesmas

r. Penyediaan buku KIA
s. Pemberian pelayanan kesehatan kepada balita sesuai standar
t. Pemberian vitamin A 200.000 IU bagu anak balita
u. Pelayanan MTBS di puskesmas untuk balita yang sakit
v. Pelatihan MTBS bagi perawat dan bidan di puskesmas
w. Pemenuhan kecukupan obat, alat dan form MTBS di puskesmas
x. Pemenuhan tenaga dokter spesialis anak di RS Kab/Kota

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
   a. Pembangunan dan peningkatan status puskesmas dan jaringannya
   b. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana rumah sakit rujukan tingkat provinsi serta pelayanan kesehatan rumah sakit dan laboraturium daerah
3. Penyediaan obat, perbekalan kesehatan, pengawasan makanan dan kefarmasian
   a. Pengadaan obat dan alat kesehatan serta pembinaan dan pengawasan an fasilitasi sediaan farmasi dan alat kesehatan
4. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan daerah
   a. Kajian perilaku sosial di pedesaan dan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak
5. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
   a. Fasilitasi pengembangan jaringan kerja Gerakan Sayang Ibu
   b. Fasilitasi pengembangan forum kader posyandu dan pengembangan model Posyandu Asuhan Dini Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (ADITUKA)

	Tujuan 5. **Meningkatkan Kesehatan Ibu**

Target 5A: menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015

1. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
   e. Pelatihan APN dan Evaluasi Pasca latih
   f. Kunjungan rumah untuk meningkatkan cakupan ibu nifas
   g. Advokasi pembentukan rumah tunggu bagi bumil risti di daerah tanpa fasilitas kesehatan
   h. Kemitraan bidan dan dukun
   i. Fasilitas pertolongan persalinan di puskesmas
   j. Fasilitasi pembentukan Perda persalinan, rumah tunggu dan PONED
   k. Kampanye KIE persalinan di fasilitas kesehatan

1. Pembinaan puskesmas

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak
   a. Pembinaan puskesmas dalam pemanfaatan buku KIA
   b. Pendataan ibu hamil
   c. Pengadaan paket kelas ibu untuk puskesmas
   d. Orientasi ANC terpadu bagi puskesmas PONED
   e. Pembentukan mobile team untuk memberikan pelayanan terpadu kesehatan ibu di DTPK
   f. Penyediaan KIT pelayanan KB di fasilitas kesehatan
   g. Orientasi ABPK bagi bidan dan pustu/poskesdes
   h. Orientasi pelayanan KB pasca persalinan
   i. Pengadaan buffer stock alokon di tingkat provinsi
   j. Sweeping pelayanan KB bagi Kab/Kot dengan unmeet tinggi
   k. Pelatihan PONED
   l. Pelatihan pelayanan pasca keguguran
   m. Orientasi PP-KtP terpadu di puskesma PONED
   n. Orientasi surveillances kematian ibu dan AMP bagi tim AMP Kab/Kota
   o. Bimtek tim PONED Kab/Kota
   p. Regional system rujukan maternal neonatal di Kab/Kota

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
   a. Penyediaan sarana dan prasarana PONED,KB dan pasca kelahiran
   b. Penyediaan ambulance PONED
   c. Orientasi PKRE terpadu di puskesmas PONED
   d. Pemenuhan standar sarana dan peralatan RS PONED
   e. Pembinaan RS dan klinik swasata oleh RS PONED

4. Peningkatan Pelayanan KEsehatan Ibu, Anak dan Revitalisasi KB
   a. evaluasi dan koordinasi program kesehatan keluaraga
   b. pemantapan implementasi kohort ibu, bayi, balita dan KB
   c. bimtek dan kosultasi keluarga berencana

5. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak
   a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi
   b. Fasilitasi pengembangan Jaringan Kerja Gerakan Sayang Ibu
   c. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu
   d. Fasilitasi peningkatan peran wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera

6. Program peningkatan keberdayaan masyarakat dan lembaga perdesaan

a. Pengembangan forum kader posyandu dan pengembangan model posyandu asuhan dini pertumbangan dan perkembangan anak (ADITUKA)
b. Pembinaan coordinator PPKBD

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

1. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
   a. Pembinaan kesertaan dan kemandiriaan ber KB melalui 769 klinik KB Pemerintah dan Swasta
   b. Pelayanan KB bagi keluarga miskin
2. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan revitalisasi keluarga berencana
   a. Fasilitasi Keluarga Berencana

	Tujuan 6. **Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya**

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015

1. Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
   a. Pengendalian penyakit menular langsun
   b. Pelatihan pengurangan dampak buruk (harm reduction) bagi petugas di sarana kesehatan
   c. Layanan kesehatan PTRM
   d. Pelatihan petugas pelaksana kegiatan PMTCT di sranana kesehatan
   e. Dukungan sarana dan prasarana untuk pembentukan layanan PMTCT
2. Program Pendidikan Dasar 9 tahun dan pendidikan menengah
   a. Sosialisasi penanggulanangan HIV/AIDS
   b. Bimtek penanggulangan HIV/AIDS di kalangan mahasiswa
   c. Sosialisasi pencegahan sejak dini HIV/AIDS
3. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
   a. Sosialisasi pemberdayaan perempuan dalam pencegahan HIV/AIDS
   b. KIE terkait issue perlindungan perempuan dan tindak kekerasan dan penyebaran HIV/AIDS
4. Program Peningkatan Peran serta Pemuda
   a. Sosialisasi penanggulangan bahaya HIV/AIDS bagi pemuda
   b. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

1. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan
   a. Pengendalian penyakit menular langsung
   b. Pelatihan tim CST bagi petugas di sarana kesehatan
   c. Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan pelayanan CST
   d. Pemeriksaan CD4
   e. Pemeriksaan Viral Load
   f. Pelaksanaan zero survey
   g. Pemeriksaan specimen HIV/AIDS
   h. Pelatihan VCT
   i. Pelatihan CST
   j. Pelatihan IMS
   k. Pelatihan Harm Reduction
   l. Pengadaan Reagent CD4
   m. Pengadaan obat esensial, obat program dan perbekalan kesehatan

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya

1. Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
   a. Pembagian kelambu masal pada daerah endemic malaria tinggi
   b. Pengadaan kelambu berinteksida di kab/kota endemic malaria
   c. Pembagian kelambu berinteksida bagi ibu hamil dan bayi
   d. Pengadaan Rapid Diagnostic Test (RDT) terutama untuk daerah perbatasan dan terpencil
   e. Pengadaan alat semprot dan perlengkapan alat penyemprotan
   f. Pelatihan tenaga mikroskopist malaria
   g. Pelatihan medis dan paramedic dalam tatalaksana kasus malaria
   h. Advokasi pengendalian penyakit TB
   i. Monitoring dan survelens penyakit
   j. Terlaksananya diagnostic TB dengan tuberculin test
   k. Fasilitasi pelayanan kesehatan yang melaksanakan layanan TB DOTS
   l. Pelatihan pengelolaan program TB (wasor)
   m. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan TB di Rumah sakit
   n. Penyediaan obat TB dengan strategi DOTS
   o. Pelatihan petugas kesehatan di Lapas/rutan dalam pelayanan TB DOTS

p. Penyediaan ruang isolasi untuk pasien TB-HIV dan MDR-TB

q. Penyediaan obat anti TB

2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

a. Pelatihan tatalaksana ISPA

b. Pelatihan tatalaksana Diare

c. Pelatihan pengelolaan DBD

d. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

3. Perbaikan gizi masyarakat

a. Peningkatan kualitas gizi masyarakat

4. Peningkatan mutu sumberdaya kesehatan

a. Pembinaan ketrampilan sumberdaya institusi kesehatan, profesionalisme tenaga kesehatan, organisasi profesi dan penelitian bidang kesehatan

	Tujuan 7. **Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

b. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

c. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

d. Peningkatan serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

e. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan

a. Pembinaan dan Pengujian hasil hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan

3. Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Sumber daya air

a. Pembangunan, Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penangkap air lainnya

b. Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai, danau dan sumber daya air lainnya

c. Rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai

4. Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam

a. Pengembangan, perlindungan dan konservasi sumberdaya air dan laut, udara, hutan, lahan, flora dan fauna serta pengembangan hutan dan kebun

b. Pengawasan dan konservasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

5. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
   a. Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan sumberdaya air dan laut, udara, hutan, lahan, flora dan fauna serta hutan dan kebun
   b. Peningkatan pengendalian pencemaran sumberdaya air dan laut, udara, hutan, lahan, flora dan fauna serta hutan dan kebun
   c. Fasilitasi komisi AMDAL Provinsi
6. Program Penataan Ruang
   a. Penyusunan/review/revisi dan sosialiasasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Wilyah lintas Kabupaten/Kota
   b. Penataan dan Pemanfaatan Ruang dan kawasan serta pengawasan dan arahan kebijakan dan zoning regulation pemanfaatan ruang
   c. Pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang
   d. Pengelolaan perijinan dan pengawasan teknis bidang bina marga dan tata ruang serta bidang sumber daya air dan permukiman

Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010.

1. Program penataan perumahan,pemukiman dan kawasan sentra Produksi
   a. Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih
2. Program Pengembangan Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
   a. Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan Bangunan Penampung Air lainnya
   b. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan Tanggul Sungai
   c. Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air
   d. Pengendalian banjir pada Daerah tangkapan air dan Badan -Bandan Sungai
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan
   a. Pembinaan dan Pengujian hasil hutan serta pengendalian peredaran hasil hutan
4. Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Sumber daya air
   a. Pembangunan, Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penangkap air lainnya
   b. Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai, danau dan sumber daya air lainnya
   c. Rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai
5. Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam

a. Pengembangan, perlindungan dan konservasi sumberdaya air dan laut, udara, hutan, lahan, flora dan fauna serta pengembangan hutan dan kebun
b. Pengawasan dan konservasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

6. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
   a. Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan sumberdaya air dan laut, udara, hutan, lahan, flora dan fauna serta hutan dan kebun
   b. Peningkatan pengendalian pencemaran sumberdaya air dan laut, udara, hutan, lahan, flora dan fauna serta hutan dan kebun
   c. Fasilitasi komisi AMDAL Provinsi
7. Program Penataan Ruang
   a. Penyusunan/review/revisi dan sosialiasasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Wilyah lintas Kabupaten/Kota
   b. Penataan dan Pemanfaatan Ruang dan kawasan serta pengawasan dan arahan kebijakan dan zoning regulation pemanfaatan ruang
   c. Pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang
   d. Pengelolaan perijinan dan pengawasan teknis bidang bina marga dan tata ruang serta bidang sumber daya air dan permukiman

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015

1. Program penataan perumahan,pemukiman dan kawasan sentra Produksi
   b. Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih
2. Program Pengembangan Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
   a. Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan Bangunan Penampung Air lainnya
   b. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan Tanggul Sungai
   c. Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air
   d. Pengendalian banjir pada Daerah tangkapan air dan Badan - Bandan Sungai
3. Program Penyehatan Lingkungan
   a. Pembangunan sarana air minum berkualitas
   b. Inspeksi sanitasi sarana air minum
   c. Advokasi penyediaan air minum berkualitas
   d. Pengawasan kualitas air minum perpipaan.
   e. Penyediaan water test kita untuk setiap puskesmas.
   f. Advokasi dan kampanye STOP BABS (buang air besar sembarangan)

g. Advokasi pelaksanaan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

1. Program penataan perumahan,pemukiman dan kawasan sentra Produksi
   c. Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih
2. Program Pengembangan Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
   e. Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan Bangunan Penampung Air lainnya
   f. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan Tanggul Sungai
   g. Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air
   h. Pengendalian banjir pada Daerah tangkapan air dan Badan - Bandan Sungai
3. Program Penyehatan Lingkungan
   h. Pembangunan sarana air minum berkualitas
   i. Inspeksi sanitasi sarana air minum
   j. Advokasi penyediaan air minum berkualitas
   k. Pengawasan kualitas air minum perpipaan.
   l. Penyediaan water test kita untuk setiap puskesmas.
   m. Advokasi dan kampanye STOP BABS (buang air besar sembarangan)
   n. Advokasi pelaksanaan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)
4. Program Penataan Ruang
   a. Penyusunan/review/revisi dan sosialiasasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Wilyah lintas Kabupaten/Kota
   b. Penataan dan Pemanfaatan Ruang dan kawasan serta pengawasan dan arahan kebijakan dan zoning regulation pemanfaatan ruang
   c. Pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang
   d. Pengelolaan perijinan dan pengawasan teknis bidang bina marga dan tata ruang serta bidang sumber daya air dan permukiman
   e. Peningkatan investasi pada prasarana dasar (kesehatan, air, sanitasi) terutama di daerah perdesaan dan perkampungan miskin di wilayah perkotaan

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan bagian yang penting dari sebuah siklus perencanaan. Sebuah rencana aksi yang telah disusun dengan matang akan menghadapi berbagai macam kendala dalam implementasi di lapangan, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang mampu memandu dan mengarahkan kembali program dan kegiatan agar dapat kembali kepada tujuan semula. Oleh karena itu Monev sudah mulai didesain sejak tahap awal perencanaan program.

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan pencapaian tujuan MDGs Provinsi Banten 2015 akan memuat beberapa hal sebagai berikut : Konsep Monitoring dan Evaluasi, Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, dan Diagram Alur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Goals (Millenium Development Goals/MDGs) pada dasarnya dilakukan oleh sekretariat Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten tahun 2011 – 2015 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No.050.05/Kep.494-Huk/2011. Kelompok Kerja Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup akan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program pada pencapaian Target MDGs.

Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

1. Berorientasi pada Peningkatan Mutu.

   Pemantauan dan evaluasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk percepatan pencapaian target MDGs pada tahun 2015. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara baik dan berkala dengan data yang berkualitas akan menyediakan berbagai macam informasi untuk peningkatan kualitas program dan kegiatan percepatan pencapaian target MDGs.

2. Partisipasi dan Transparansi/Akuntabilitas

   Merupakan dua prinsip dalam proses monitoring dan evaluasi. Percepatan pencapaian target MDGs merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyakarat,

Swasta dan masyarakat. Semua pemangku kepentingan harus secara aktif berkoordinasi dan melaporkan perkembangannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan MDGs kepada Pemerintah dalam hal ini Bappeda Provinsi selaku koordinator percepatan pencapaian target MDGs di Provinsi Banten. Pemantauan dan Evaluasi harus melibatkan semua pihak dengan prinsip keterbukaan dengan menerima semua kritik dan saran yang disampaikan oleh setiap pemangku kepentingan. Bappeda Provinsi Banten selaku koordinator harus secara berkala melaksanakan koordinasi dalam rangka perbaikan dan pemecahan semua masalah yang terkait dengan percepatan pencapaian target MDGs secara obyektif.

Pemantauan dilakukan oleh berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, LSM) secara aktif di semua tingkatan/level (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, sampai dengan tingkat masyarakat), Pemantauan dari semua pihak dan level terhadap program/proyek akan menjadi salah satu tolok ukur tinggi rendahnya kepemilikan masyarakat terhadap program/proyek yang dilaksanakan di masyarakat. Pengelola program dan kegiatan baik itu berasal dari SKPD ataupun dari pihak swasta dan LSM juga perlu menyampaikan informasi tentang hasil tindak lanjut yang telah dilakukan dari permasalahan yang diajukan oleh berbagai pihak.

3. Akurasi data dan informasi

   Semua pihak yang berkepentingan dengan MDGs hendaknya berupaya memberikan data dan informasi seakurat mungkin. Informasi perlu diuji silang (*crosscheck*) dengan sumber-sumber lain untuk memastikan dapat tidaknya data dan informasi tersebut dipercaya. Hanya data dan informasi yang akurat, berdasarkan fakta dan sumber-sumber terpercaya, yang dapat membantu meningkatkan percepatan pencapaian target MDGs.

4. Kapastian Tindak Lanjut

   Kepastian tindak lanjut terhadap permasalahan merupakan prinsip yang penting dalam pemantauan dan evaluasi. Adanya kepastian ini akan meningkatkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hasil tindak lanjut harus diinformasikan kepada semua pemangku kepentingan dan sebagai bahan pelajaran untuk permasalahan yang sama berikutnya.

1. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang direncanakan?
2. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan berhasil? Jika berhasil faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya? Dan apabila tidak berhasil, hal-hal apa saja yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut?
3. Apakah kita akan mengulanginya lagi dengan berbagai perbaikan atau melakukan hal yang berbeda? Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja baik indikator masukan, proses, keluaran dan manfaat maupun dampak. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah :
   a. Menilai kemajuan pelaksanaan program percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium.
   b. Mengetahui kendala-kendala dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program.
   c. Mengukur keluaran/ hasil/manfaat / maksud dan atau dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah di tetapkan.
   d. Sebagai umpan balik untuk peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten untuk periode sekarang maupun yang akan datang. Indikator kinerja upaya pencapaian target MDGs merupakan indikator proses dari setiap langkah program percepatan pencapaian target MDGs secara lintas sektor yang dilakukan oleh instansi-instansi di Provinsi Banten. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai sasaran pokok. Indikator kinerja upaya percepatan pencapaian target MDGs meliputi :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Pencapaian Target MDGs Banten

1 MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN	**Tujuan 1.** **Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan**	
No	**Indikator**	**Penanggung Jawab**
Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015		
1.1	Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional	TKPK, BPPMD, BPS, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,

		Dinas Kelautan & Perikanan, DPKAD, Bappeda
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	BPPMD, Dinkop & UMKM, Disnakertrans, Dinas Kelautan & Perikanan, Disperindag, Dinas Pertanian, Biro Perekonomian, Bappeda
Target 1B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda		
1.4	Laju PDRB per tenaga kerja	Semua SKPD
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Dinas Nakertrans, Dinkop & UMKM, Dinas Pertanian,Dinas Kelautan & Perikanan, BPPMD, Disperindag, Bappeda
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	
Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015		
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	Dinas kesehatan, BKKBN, Bappeda
1.8 a	Prevalensi balita gizi buruk	Dinas Kesehatan, Bappeda
1.8 b	Prevalensi balita gizi kurang	Dinas Kesehatan, Bappeda
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum :	Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan Dinas Pertanian, Bappeda
	- 1.400 kkal/kapita/hari	
	- 2.000 kkal/kapita/hari	

	**Tujuan 2.** **Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua**

No	Indikator	Penanggung Jawab
Target 2 : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar		
2.1	Pendidikan Dasar	Bappeda , Kemenag dan Dindik
2.2	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI/Paket A	Bappeda , Kemenag dan Dindik
2.3	Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	Bappeda , Kemenag dan Dindik
	- Laki-laki	Bappeda , Kemenag dan Dindik
	- Perempuan	Bappeda , Kemenag dan Dindik

	**Tujuan 3.** **Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	
No	**Indikator**	**Penanggung Jawab**
Target 3 : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015		
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi :	
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	BPPMD, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) dan Dindik, Bappeda
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	BPPMD, BPAD dan Dindik, Bappeda
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	BPPMD, BPAD dan Dindik, Bappeda
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	BPPMD, BPAD dan Dindik, Bappeda
3.2	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki Kelompok usia 15-24 tahun	BPPMD, BPAD dan Dindik, Bappeda
3.3	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	Disnakertrans, BPPMD, Bappeda
3.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Badan Kesbangpol, BPPMD, Bappeda

	**Tujuan 4.** **Menurunkan Angka Kematian Anak**	
No	**Indikator**	**Penanggung Jawab**
Target 4 : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 1015		
4.1	Angka Kematian Balita (AKBa) / 1.000 penduduk	Dinkes, Bappeda
4.2	Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 kh	Dinkes, Bappeda
4.3	Persentase anak usia 1 yang di Imunisasi campak	Dinkes, Bappeda

	**Tujuan 5.** **Menurunkan Angka Kematian Anak**	
No	**Indikator**	**Penanggung Jawab**
Target 5A : Menurukan angka kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015		

5.1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Dinkes, Bappeda
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN)	Dinkes, Bappeda
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015		
5.3	Angka pemakaian kontarsepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun	Dinkes, BKKBN, BPPMD, Bappeda
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)	Dinkes, BKKBN, BPPMD, Bappeda
5.5	Cakupan pelayanan antenatal (K4)	Dinkes, BKKBN, Bappeda
5.6	Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB) yang tidak terpenuhi	Dinkes, BKKBN, Bappeda

	**Tujuan 6.** **Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya**	
No	**Indikator**	**Penanggung Jawab**
Target 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015 yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015		
6.1	Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun	Dinkes, KPAD, Bappeda
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir	Dinkes, KPAD, Bappeda
6.3	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	Dinkes, KPAD, Bappeda
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV /AIDS bagi semua		
6.4	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral	Dinkes, KPAD, Bappeda
Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015		
6.5	Angka kejadian Tuberkulosis (insiden semua kasus/1.00.000 penduduk/ tahun)	Dinkes, Bappeda
6.6	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Dinkes, Bappeda
6.7	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Dinkes, Bappeda
6.8	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	Dinkes, Bappeda
6.9	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	Dinkes, Bappeda
6.10	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	Dinkes, Bappeda
	Penyakit Lainnya	
	Angka Ksakita DBD per 100.000 penduduk	Dinkes, Bappeda

	Angka Kematian DBD (%)	Dinkes, Bappeda

	Tujuan 7. **Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup**	
No	**Indikator**	**Penanggung Jawab**
Target 7A : Memadukan prinsif-prinsif pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang		
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonhan yang berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan	Dinhut, BLHD
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (Co2e)	BLHD, Distamben
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) DALAM Metrik ton	BLHD
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang ada berada dalam batasan biologis yang aman	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 7B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010		
7.5	Rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasn hutan	Dinhut, BLHD
7.6	Rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015		
7.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	Dinas SDAP, BPPMD, Dinkes
	Perkotaan	
	Perdesaan	
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak	Dinas SDAP, BPPMD, Dinkes
Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2010		
7.9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Dinas SDAP

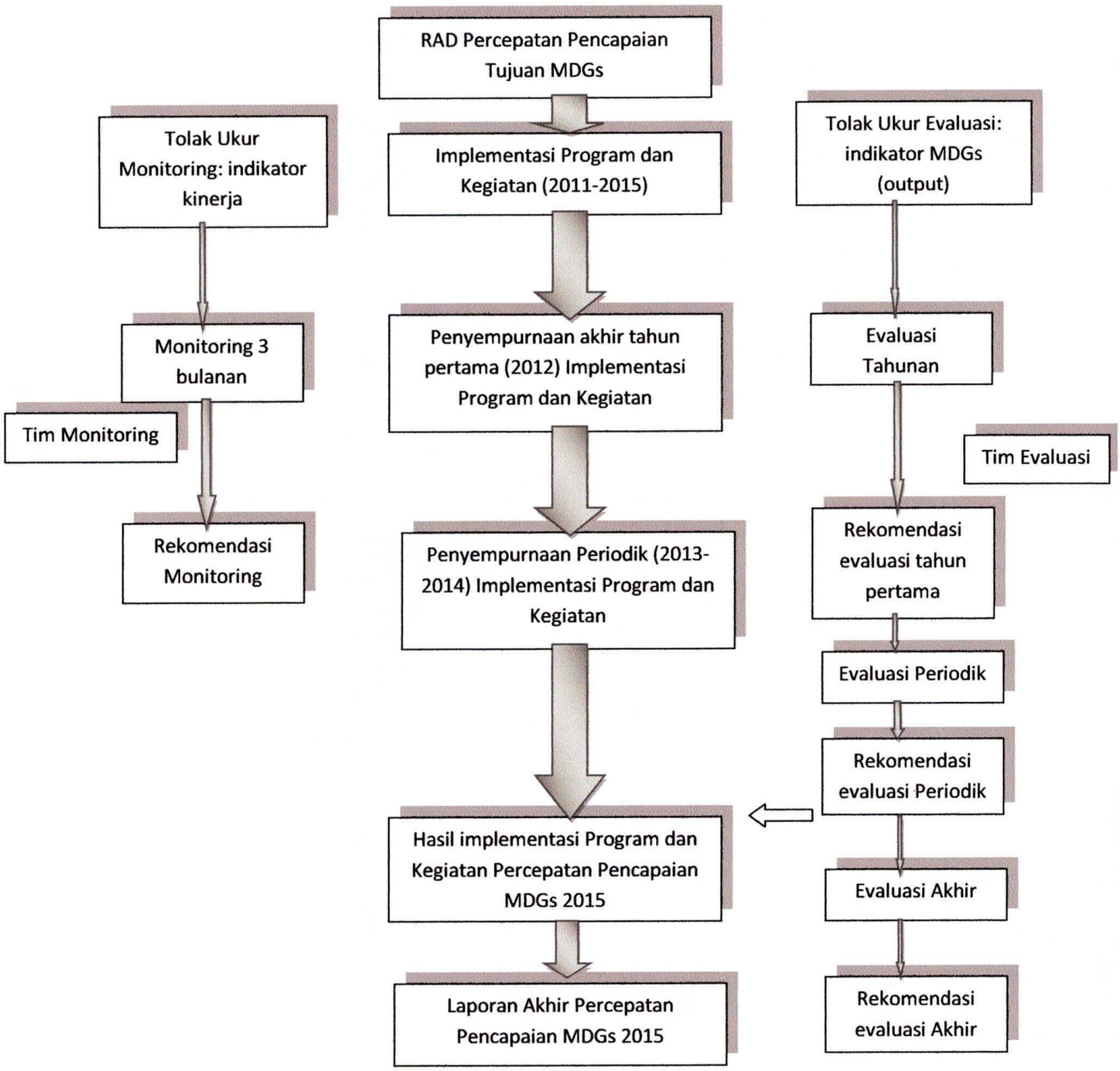
Indikator di gunakan untuk mengukur kemajuan capaian kinerja output dan merupakan kunci sistim pemantauan dan evaluasi sehingga indikator-indikator kinerja yang ada harus dapat diverifikasi secara obyektif. Indikator pencapaian hasil menentukan :

a) Apakah kegiatan dan masukan program percepatan pencapaian target MDGs menghasilkan keluaran/output yang diharapkan,
b) Apakah keluaran atau hasil program percepatan pencapaian target MDGs mencapai maksud /manfaat program,
c) Apakah maksud / manfaat program ini memberikan sumbangan kepada tujuan keseluruhan program percepatan pencapaian target MDGs.

Langkah dan Tindak Lanjut

1. Berkenaan dengan percepatan pencapaian target MDGs tahun 2015, Pemerintah Provinsi Banten telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian target tersebut. Beberapa indikator MDGs tahun 2015 telah dicapai oleh Provinsi Banten, akan tetapi masih ada beberapa indikator yang belum tercapai dan ada yang membutuhkan kerja keras untuk di capai seperti cakupan air bersih dan sanitasi dan angka kematian Balita. Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkonsentrasi penuh untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
2. Pemerintah Provinsi akan segera bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun status pencapaian target MDGs untuk setiap Kabupaten/Kota. Berdasarkan status capaian tersebut maka intervensi program dan kegiatan akan lebih terarah dalam percepatan pencapaian target MDGs.
3. Dalam rangka monitoring dan evaluasi, maka tiap-tiap pokja harus menyediakan anggaran untuk aktivitas tersebut yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Banten.

DIAGRAM ALUR MONITORING EVALUASI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs PROVINSI BANTEN 2011-2015



BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* (MDGs) Provinsi Banten 2011-2015 merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah dalam mendukung Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia yang telah di susun oleh Bappenas. RAD Percepatan pencapaian target MDGs ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2007-2012 dan rancangan RPJMD 2012-2017 yang akan disusun setelah Gubernur Banten terpilih pada Januari 2012.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* (MDGs) Provinsi Banten 2011-2015 telah memuat program dan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian 7 tujuan dari MDGs. Keberhasilan RAD Percepatan Pencapaian MDGs ini perlu didukung melalui integritas program dan pendanaan secara sinergis yang berasal dari Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD) yang dilakukan oleh SKPD terkait, swasta dan masyarakat. Dukungan dari DPRD sebagai wakil rakyat dalam penganggaran menjadi penting dalam mensukseskan keberhasial program yang telah disusun dalam RAD.

Matrik program dan kegiatan RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs yang telah disusun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD Provinsi Banten. Matrik ini merupakan dukungan nyata dari Pemerintah daerah dalam pencapaian target MDGs di level provinsi dan nasional.

Kelompok Kerja yang telah terbentuk dengan SK Gubernur Banten Nomor: 050.05/Kep.494-Huk/2011 menjadi bagian yang penting dalam memonitoring dan mengevaluasi perkembangan percepatan pencapaian target MDGs sampai dengan tahun 2015.

LAMPIRAN MATRIK

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target
MDGs Provinsi Banten 2011-2015

MATRIK RAD MDGs PROVINSI BANTEN 2011-2015

Tujuan 1 . MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 1 A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015															
Indikator MDGs	**1.1 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1 per kapita perhari (10,30%)**														
	1.2 Persentase penduduk yang hidup hidup di bawah garis kemiskinan nasional (7,55%)														
	1.3 persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 2 ,00 (PPP) per hari (berkurang)														
	1.4 Indeks kedalaman kemiskinan (berkurang)														
NASIOANAL															
Prorgam Kependudukan dan Keluarga Berencana															
Peningkatan Kemandirian ber-KB Keluarga Pra-s dan KS-1	1.PD jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif		34 (1Pusat dan 33 Provinsi)	34 (1 Pusat dan 33 Provinsi	34 (1 Pusat dan 33 Provinsi	34 (1Pusat dan 33 Provinsi)	34 (1Pusat dan 33 Provinsi)	34 (1Pusat dan 33 Provinsi)	25,3	27,2	29,3	31,5		APBN	BKKBN dan BKKBN Provinsi
	1a. TOT bagi pengelola pemberdayaan ekonomi keluarga		-	66	33	-									
	2.PD Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif		3	3	3	3	3	3							
	2a Pelatihan untuk pendampingan kelompok UPPKS														
PROVINSI BANTEN															
Program : Pemberdayaan Masyarakat Miskin															
Kegiatan															
Peningkatan Produktifitas Perika	Peningkatan Jumlah KUB yang Menerima Bantuan (KUB)	42	96	50	50				990.8						
Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan															
Program : Peningkatan Ketahanan Pangan															
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut		23,3	22	24	25				3.100						
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau															

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)													APBD	DKP Banten
Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar															
Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar															
Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air laut															
Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut															
Diversifikasi Produk Hasil Perikanan															
Program : Program Kependudukan dan Keluarga Berencana															
Kegiatan 1. Peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	1PD. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif	5	1	2	3	4	5	5	57.450	62.500	68.400	74.300	80.600	APBN	BKKBN Provinsi
	1a. TOT bagi pengelola pemberdayaan ekonomi keluarga	-	154	30	92	154	-	-	54.720	164.160	273.600	-	-	APBN	
	2PD. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif	-	9	2	2	4	6	9	11.220	11.220	44.880	67.320	100.980	APBN	
	2a. Pelatihan untuk pendampingan kelompok UPPKS	-	30	-	30	-	-	-	54.720	-	-	-	-	APBN	
Program : Pemberdayaan Masyarakat Miskin															
Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin	Bimbingan Sosial Motivasi Fakir Miskin dan Fasilitasi Bantuan KUBE	400 KK	200 KK	820 KK	1.000 KK	1.100 KK	1.200 KK	1.300 KK	2,2	2,42	2,662	2.928,2	3,221	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	KUBE Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Modal Stimulan UEP	-	-	420 KK	260 KK	510 KK	560 KK	610 KK	976,4	1.069,4	1.184,4	1.300,8	1.418,9	APBN (Dekon)	Dinas Sosial Provinsi Banten
Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	KUBE Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Modal Stimulan UEP	1.110 KK	960 KK	780 KK	860 KK	950 KK	1.050 KK	1.160 KK	1.874,4	2.029,9	2.240,8	2.474,9	2.732,4	APBN (Dekon)	Dinas Sosial Provinsi Banten
Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)	KUBE Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Modal Stimulan UEP (BLPS)	470 KK	590 KK	950 KK	600 KK	750 KK	800 KK	850 KK	1,77	4,3	5,25	5,9	6,55	APBN (Pusat)	Kementerian Sosial RI
Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil	Bantuan Bahan Bangunan Rumah dan Jaminan Hidup	70 KK	80 KK	160 KK	120 KK	125 KK	90 KK	90 KK	800	970	620	605	605	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Bimbingan Sosial dan Motivasi Berkala secara terpadu dan Bantuan Sosial	94 KK	120 KK	115 KK	150 KK	120 KK	100 KK	100 KK	1.387,4	1,825	1.731,5	1.569,1	1.569,1	APBN (TP)	Dinas Sosial Provinsi Banten
Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan	Bantuan UEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi	100 KK	100 KK	260 KK	260 KK	300 KK	300 KK	350 KK	600	630	747,5	895	960	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Bantuan UEP Program Pemberdayaan Sosial dan Bantuan UEP Keluarga Rawan Sosial Ekonomi	160 KK	270 KK	300 KK	350 KK	350 KK	400 KK	400 KK	420	500	500	600	700	APBN (Dekon)	Dinas Sosial Provinsi Banten
Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial															

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bantuan UEP KTK/PM	-	20 Org	20 Org	20 Org	30 Org	40 Org	50 Org	200	136,5	184,8	233	281,3	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bantuan Stimulan UEP KTK/PM	25 Org	20 Org	30 Org	30 Org	40 Org	50 Org	60 Org	601,5	622,8	867,7	1.152,5	1.477,3	APBN (Dekon)	Dinas Sosial Provinsi Banten
Program Keluarga Harapan (PKH)	Ibu Hamil yang Mempunyai Anak masih Sekolah (Bantuan Uang Tunai)	37.214 RTSM	45.792 RTSM	47.89 RTSM	50.007 RTSM	52.115 RTSM	54.223 RTSM	56.331 RTSM	53.960,9	56.284,6	58.608,3	60,932	63,255,6	APBN (Pusat)	Kementerian Sosial RI
Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial															
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia	Pemberdayaan Sosial Keterampilan dan Bantuan UEP Anak Jalanan	-	-	30 Org	30 Org	40 Org	50 Org	50 Org	1	1.031,2	1.079,1	1,121	1.168,8	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
	Bantuan Permakanan LU	175 Org	240 Org	-	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	-	20	20	20	20	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Bantuan Sosial Perlindungan Anak	-	-	-	100 Org	120 Org	150 Org	175 Org	-	251,9	279,9	318	351,1	APBN (Dekon)	Dinas Sosial Provinsi Banten
Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Bantuan UEP Lanjut Usia	102 Paket	102 Paket	75 Paket	100 Paket	100 Paket	125 Paket	150 Paket	328,6	357,6	419,3	476,3	533,2	APBN (Dekon)	Dinas Sosial Provinsi Banten
Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (PJSLU)	Bantuan Uang Tunai Lanjut Usia	500 Org	500 Org	630 Org	780 Org	930 Org	1.080 Org	1.230 Org	300	234	279	324	369	APBN (Pusat)	Kementerian Sosial RI
Program Bantuan Subsidi Panti	Bantuan Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti Sosial (Bantuan Uang Tunai)	207 Panti	226 Panti	273 Panti	303 Panti	323 Panti	353 Panti	373 Panti	298,9	331,7	353,6	386,5	408,4	APBN (Pusat)	Kementerian Sosial RI
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan eks Napza	Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bantuan UEP Eks Napi	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	40 Org	40 Org	200	200	200	400	400	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
	Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bantuan Peningkatan Gizi bagi Penderita ODHA	100 Org	50 Org	65 Org	70 Org	80 Org	100 Org	150 Org	45,5	49	60	80	120	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	Praktek Belajar Kerja (PBK) dan Bantuan UEP	-	4 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	150	150	151	151,4	154,4	APBN (Dekon)	Dinas Sosial Provinsi Banten
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Cacat eks Penyakit Kronis	Bimbingan Sosial Ketrampilan dan Bantuan UEP Eks Kusta	30 Org	30 Org	20 Org	30 Org	35 Org	40 Org	45 Org	300	520	580	640	736	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
Rehabilitasi Orang dengan Kecacatan	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Paca PBK, LBK, RBM dan Bantuan UEP (PBK dan LBK)	-	-	-	80 Org	80 Org	80 Org	80 Org	-	472	505	519	558	APBN (Dekon)	Dinas Sosial Provinsi Banten
Program Jaminan Sosial Paca (PJSPC) Berat	Bantuan UEP PJSPC Berat	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	APBN (Pusat)	Kementerian Sosial RI
Program Kesejahteraan Sosial Anak (Paca Ringan)	Bantuan UEP Paca Ringan	-	325 Org	325 Org	336 Org	336 Org	336 Org	336 Org	585	725,7	725,7	725,7	725,7	APBN (Pusat)	Kementerian Sosial RI
Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Klien BPS	Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bantuan UEP WKTK	-	30 Org	40 Org	40 Org	40 Org	40 Org	40 Org	195	225,7	241,9	281,8	374,6	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Penyakit Sosial pada BP2S	Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bantuan UEP Gepeng	30 Org	45 Org	30 Org	60 Org	60 Org	60 Org	60 Org	162	325	330	335	340	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bantuan UEP Remaja Putus Sekolah	30 Org	-	30 Org	60 Org	60 Org	60 Org	60 Org	163,8	330	335	340	345	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
	Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bantuan UEP Tuna Susila	30 Org	45 Org	30 Org	60 Org	60 Org	60 Org	60 Org	164,1	335	340	345	350	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
	Bimbingan Sosial Keterampilan dan Batuan UEP Eks Korban Penyalahgunaan Napza	-	-	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	160	162,5	164	165,5	167	APBD	Dinas Sosial Provinsi Banten
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan															
Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pedesaan	Pelatihan fasilitator santri bangun desa	100 Orang	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang		400	400	400	400	APBD	BPPMD
Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan	100 Orang	60 Orang		110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang		300	300	300	300	APBD	BPPMD
	Pelatihan Pengurus BKAD			180 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	300	300	300	300	300	APBD	
1.Peningkatan Hubungan Kemitraan Industri Hulu - Hilir															Dindag
(1) Dukungan pengembangan industri TPT aneka	Meningkatnya Peranan Industri Tekstil Prodak Tekstil dan Aneka yang Berdaya Saing Nasional Maupun Global								-						Dindag
	Bantuan Peralatan bagi KUB Komoditi TPT		1 (Satu) Kegiatan	1 (Satu) Kegiatan	2 (Satu) Kegiatan	3 (Satu) Kegiatan	4 (Satu) Kegiatan	5 (Satu) Kegiatan	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	APBD	Dindag
	Terlaksananya Pembinaan & Pelatihan Design Batik Bagi Pengrajin Batik		1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	64.1	64.1	64.1	64.1	64.1	APBD	Dindag
	Terlaksananya Pembinaan & Pelatihan Design Alas Kaki Bagi Pengrajin Alas Kaki		1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	1 (satu) Kegiatan, 30 Peserta	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	APBD	Dindag
	Terlaksananya Pembinaan & pengawasan Industri TPT		5 (lima) Kali Kunjungan	5 (lima) Kali Kunjungan	5 (lima) Kali Kunjungan	5 (lima) Kali Kunjungan	5 (lima) Kali Kunjungan	5 (lima) Kali Kunjungan	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	APBD	Dindag
(2) Pengembangan & peningkatan mutu & kualitas produk IKM pangan	Meningkatnya mutu dan kualitas produk IKM pangan								472						Dindag
	Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses Produksi IKM Pangan		20 Orang IKM	20 Orang IKM	20 Orang IKM	20 Orang IKM	20 Orang IKM	20 Orang IKM	472	472	472	472	472	APBD	Dindag
	Sosialisasi dan Fasilitasi HAKI		20 Orang IKM	20 Orang IKM	20 Orang IKM	20 Orang IKM	20 Orang IKM	20 Orang IKM						APBD	Dindag
	Partisipasi Pameran Pekan Raya Jakarta 2011		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan						APBD	Dindag
(3) Pengembangan desain & diversifikasi komoditas kerajinan berbasis budaya daerah	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing IKM														Dindag
	1. Partisipasi Pameran Inacraft		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	430	430	430	430	430	APBD	Dindag
	2. Bimtek Kerajinan Bahan Baku Eceng Gondok		1 Kegiatan (25 org)	1 Kegiatan (25 org)	1 Kegiatan (25 org)	1 Kegiatan (25 org)	1 Kegiatan (25 org)	1 Kegiatan (25 org)						APBD	Dindag

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	3. Pelatihan Desain dan Diversifikasi Produk Kerajinan Batu Mulia		1 Kegiatan (30 org)	1 Kegiatan (30 org)	1 Kegiatan (30 org)	1 Kegiatan (30 org)	1 Kegiatan (30 org)	1 Kegiatan (30 org)						APBD	Dindag
(4) Pengembangan diversifikasi produk & keamanan pangan spesifik daerah	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Produk IKM														Dindag
	Koordinasi Bidang Industri Makanan Minuman, Agro hasil Hutbun		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200	200	200	200	200	APBD	Dindag
	Bintek Diversifikasi Produk Rumput Laut		2 KUB @ 25 Peserta	2 KUB @ 25 Peserta	2 KUB @ 25 Peserta	2 KUB @ 25 Peserta	2 KUB @ 25 Peserta	2 KUB @ 25 Peserta						APBD	Dindag
	Bintek Diversifikasi dan Pengembangan Produk Ikan Laut		2 KUB @ 25 Peserta	2 KUB @ 25 Peserta	2 KUB @ 25 Peserta	2 KUB @ 25 Peserta	2 KUB @ 25 Peserta	2 KUB @ 25 Peserta						APBD	Dindag
(5) Meningkatnya Produksi Bahan Bakar Alternatif	Meningkatnya Produksi Bahan Bakar Alternatif														Dindag
	Operasional Pabrik Biodisel Provinsi Banten		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	250	250	250	250	250	APBD	Dindag
	Bimbingan Teknis Revitalisasi Alat Pengolahan Biodiesel (alat destilasi)		1 kegiatan (10 orang)	1 kegiatan (10 orang)	1 kegiatan (10 orang)	1 kegiatan (10 orang)	1 kegiatan (10 orang)	1 kegiatan (10 orang)						APBD	Dindag
	Bantuan Alat Pengolahan Bioethanol		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket						APBD	Dindag
	Bimbingan Teknis Operasional Pengolahan Alat Bioethanol		10 org (5 hr)	10 org (5 hr)	10 org (5 hr)	10 org (5 hr)	10 org (5 hr)	10 org (5 hr)						APBD	Dindag
	Inventarisasi Alat Press Biji Jarak Pagar		1 kegiatan (8 kab/kota)	1 kegiatan (8 kab/kota)	1 kegiatan (8 kab/kota)	1 kegiatan (8 kab/kota)	1 kegiatan (8 kab/kota)	1 kegiatan (8 kab/kota)						APBD	Dindag
(6) Standarisasi & sertifikasi industri	Meningkatkan daya saing produk IKM														Dindag
	Bintek dan Fasilitasi Desain Kemasan		16 IKM	16 IKM	16 IKM	16 IKM	16 IKM	16 IKM	250	250	250	250	250	APBD	Dindag
	Sosialisasi Sertifikasi Halal		40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang						APBD	Dindag
	Fasilitasi Uji Umur Simpan Produk IKM Pangan		16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang						APBD	Dindag
	Kunjungan Kerja dan Pengiriman Peserta Diklat Teknis Aparatur		7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang						APBD	Dindag
	Pembuatan Teknologi Tungku Hemat Energi		100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit						APBD	Dindag
	Kajian Rencana Induk Pengembangan UPT BPTSI		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket						APBD	Dindag
2. Peningkatan investasi dunia															Dindag
(1) Pengawasan barang jasa beredar & pemantauan kebutuhan pokok masyarakat	Meningkatnya pengamanan perdagangan dan pemantauan kebutuhan pokok masyarakat														Dindag

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	1. Terlaksananya Pengawasan Berkala		2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	450	450	450	450	450	APBD	Dindag
	2. Terlaksananya Pengawasan Khusus		1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan						APBD	Dindag
	3. Terlaksananya Crash Program Kegiatan Pengawasan		1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan						APBD	Dindag
	4. Terlaksanaya Pemantauan Kebutuhan Pokok Masyarakat Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)		2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan						APBD	Dindag
(2) Peningkatan akses distribusi & bina sarana pasar bagi komoditas andalan daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Daerah								-						Dindag
	1. Teselenggaranya Fasilitasi Distribusi bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis Lainnya		3 (Tiga) kegiatan x 1 (satu) Hari	3 (Tiga) kegiatan x 1 (satu) Hari	3 (Tiga) kegiatan x 1 (satu) Hari	3 (Tiga) kegiatan x 1 (satu) Hari	3 (Tiga) kegiatan x 1 (satu) Hari	3 (Tiga) kegiatan x 1 (satu) Hari	167.7	167.7	167.7	167.7	167.7	APBD	Dindag
	2. Terselenggaranya Bazar/Gelar Pasar Murah		8 (Delapan) kegiatan di Kab/Kota Se Provinsi Banten	8 (Delapan) kegiatan di Kab/Kota Se Provinsi Banten	8 (Delapan) kegiatan di Kab/Kota Se Provinsi Banten	8 (Delapan) kegiatan di Kab/Kota Se Provinsi Banten	8 (Delapan) kegiatan di Kab/Kota Se Provinsi Banten	8 (Delapan) kegiatan di Kab/Kota Se Provinsi Banten	1817.2	1817.2	1817.2	1817.2	1817.2	APBD	Dindag
1. Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat															
(1) Pelayanan Kesehatan Bagi keluarga Miskin	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin														Dinkes
	Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan Kesehatan Bagi Gakin		6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	APBD	Dinkes
	Bantuan Operasi katarak Bagi Gakin		400 Gakin	400 Gakin	400 Gakin	400 Gakin	400 Gakin	400 Gakin	372.6	372.6	372.6	372.6	372.6	APBD	Dinkes
	Bantua Operasi Bibir Sumbing Bagi Gakin		60 Gakin	60 Gakin	60 Gakin	60 Gakin	60 Gakin	60 Gakin	240.1	240.1	240.1	240.1	240.1	APBD	Dinkes
	Bantuan Khitanan Masal Bagi gakin		400 Gakin	400 Gakin	400 Gakin	400 Gakin	400 Gakin	400 Gakin	195.1	195.1	195.1	195.1	195.1	APBD	Dinkes
	Pengobatan Bagi gakin		1.535 Desa se Provinsi Banten	1.535 Desa se Provinsi Banten	1.535 Desa se Provinsi Banten	1.535 Desa se Provinsi Banten	1.535 Desa se Provinsi Banten	1.535 Desa se Provinsi Banten	4985.1	4985.1	4985.1	4985.1	4985.1	APBD	Dinkes
	Monitoring dan Evaluasi Pengobatan Bagi Gakin		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	123.2	123.2	123.2	123.2	123.2	APBD	Dinkes
	Monitoring dan Evaluasi Jamkesda		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	APBD	Dinkes
	Rapat Koordinasi dan evaluasi program Jamkesda		3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	APBD	Dinkes
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan															
(1) Pembangunan dan Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya di Wilayah Perbatasan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya														
	Pembangunan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan		12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	24965.9	24965.9	24965.9	24965.9	24965.9	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Pembangunan Poskesdes		8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	1789.5	1789.5	1789.5	1789.5	1789.5	APBD	Dinkes
1. Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha															
1. Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka														
	1. Penjajagan Lokasi Transmigrasi		1 (satu) Lokasi	1 (satu) Lokasi	1 (satu) Lokasi	1 (satu) Lokasi	1 (satu) Lokasi	1 (satu) Lokasi	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	APBD	Disnakertrans
	2. Mediasi Kerjasama Antar Daerah		1 (satu) Lokasi	1 (satu) Lokasi	1 (satu) Lokasi	1 (satu) Lokasi	1 (satu) Lokasi	1 (satu) Lokasi	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	APBD	Disnakertrans
	3. Fasilitasi Pendaftaran dan Seleksi Transmigrasi		1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	APBD	Disnakertrans
	4. Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat		15 (lima belas) KK	15 (lima belas) KK	15 (lima belas) KK	15 (lima belas) KK	15 (lima belas) KK	15 (lima belas) KK	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	APBD	Disnakertrans
	5. Fasilitasi Layanan Perbekalan		15 (Lima Belas) KK	15 (Lima Belas) KK	15 (Lima Belas) KK	15 (Lima Belas) KK	15 (Lima Belas) KK	15 (Lima Belas) KK	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	APBD	Disnakertrans
2. Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha															
2. Pengembangan Kelembagaan produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha														
	1. Survey/Identifikasi Potensi Padat Karya Infrastruktur		1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	APBD	Disnakertrans
	2. Sosialisasi/Penyuluhan Padat KaryaInfrastruktur		1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	1 (satu) Kegiatan	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	APBD	Disnakertrans
	3. Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur		16. 150 Hari Orang Kerja (HOK)	16. 150 Hari Orang Kerja (HOK)	16. 150 Hari Orang Kerja (HOK)	16. 150 Hari Orang Kerja (HOK)	16. 150 Hari Orang Kerja (HOK)	16. 150 Hari Orang Kerja (HOK)	762.9	762.9	762.9	762.9	762.9	APBD	Disnakertrans
	4. Pendataan Rencana Kegiatan Bidang Perluasan Kesempatan Kerja untuk Tahun 2012		1 (satu) Kegiatan / 1 Dokumen	1 (satu) Kegiatan / 1 Dokumen	1 (satu) Kegiatan / 1 Dokumen	1 (satu) Kegiatan / 1 Dokumen	1 (satu) Kegiatan / 1 Dokumen	1 (satu) Kegiatan / 1 Dokumen	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	APBD	Disnakertrans
3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga															
1. Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja														
	1. Terlaksananya Pelatihan berbasis masyarakat kejuruan Service TV		16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	APBD	Disnakertrans

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	2. Terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat kejuruan Konstruksi Kayu		16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	43.8	43.8	43.8	43.8	43.8	APBD	Disnakertrans
	3. Terlaksananya Pelatihan berbasis masyarakat kejuruan Sepeda motor		16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	80	80	80	80	80	APBD	Disnakertrans
	4. Terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat kejuruan Audio		16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	43.7	43.7	43.7	43.7	43.7	APBD	Disnakertrans
	5. Terlaksananya Pelatihan berbasis masyarakat kejuruan Menjahit		32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	117.4	117.4	117.4	117.4	117.4	APBD	Disnakertrans
	6. Terlaksananya Pelatihan berbasis masyarakat kejuruan Service HP		32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	APBD	Disnakertrans
	7. Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las		80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	788	788	788	788	788	APBD	Disnakertrans
5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja															Disnakertrans
2. Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja														Disnakertrans
	1. Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Terhadap Perusahaan Pemborong Pekerjaan dan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja		HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	APBD	Disnakertrans
	2. Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Syarat Kerja Bagi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Pengusaha		HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	HRD, SP/SB PEKERJA (50% : 50%)	92.9	92.9	92.9	92.9	92.9	APBD	Disnakertrans
	3. Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Syarat Kerja di Bidang Non Diskriminasi Bagi Pengusaha /Pekerja		PIMPINAN PERUSAHAAN , HRD, SP/SB, PEKERJA, (50% : 50%)	PIMPINAN PERUSAHAAN , HRD, SP/SB, PEKERJA, (50% : 50%)	PIMPINAN PERUSAHAAN , HRD, SP/SB, PEKERJA, (50% : 50%)	PIMPINAN PERUSAHAAN , HRD, SP/SB, PEKERJA, (50% : 50%)	PIMPINAN PERUSAHAAN , HRD, SP/SB, PEKERJA, (50% : 50%)	PIMPINAN PERUSAHAAN , HRD, SP/SB, PEKERJA, (50% : 50%)	91.1	91.1	91.1	91.1	91.1	APBD	Disnakertrans
6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga															Disnakertrans

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja														Disnakertrans
	1. Pelatihan Pengarus Utamaan Gender (PUG) Bagi Pengusaha Pengguna Tenaga Kerja Perempuan		1 Kegiatan (45 orang peserta)	1 Kegiatan (45 orang peserta)	1 Kegiatan (45 orang peserta)	1 Kegiatan (45 orang peserta)	1 Kegiatan (45 orang peserta)	1 Kegiatan (45 orang peserta)	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	APBD	Disnakertrans
	2. Sosialisasi dan Advokasi Kesehatan Sekaligus Pemasangan Alat Kontrasepsi Bagi Pekerja Perempuan di Perusahaan		1 Kegiatan (8 Lokasi Perusahaan) 400 Orang Calon Aseptor	1 Kegiatan (8 Lokasi Perusahaan) 400 Orang Calon Aseptor	1 Kegiatan (8 Lokasi Perusahaan) 400 Orang Calon Aseptor	1 Kegiatan (8 Lokasi Perusahaan) 400 Orang Calon Aseptor	1 Kegiatan (8 Lokasi Perusahaan) 400 Orang Calon Aseptor	1 Kegiatan (8 Lokasi Perusahaan) 400 Orang Calon Aseptor	105.1	105.1	105.1	105.1	105.1	APBD	Disnakertrans
7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga															Disnakertrans
Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja														Disnakertrans
	1. Terciptanya Kelancaran Prosedur K3 Dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja		40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	APBD	Disnakertrans
8. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga															Disnakertrans
Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja														Disnakertrans
	1. Terealisasinya pengawasan norma ketenagakerjaan		Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	104.9	104.9	104.9	104.9	104.9	APBD	Disnakertrans
	2. Tersedianya Prosedur Tetap (Protap) Pengawasan dan Perlindungan Serta Penegakan Hukum Terpadu Pelaksanaan UMK dan THR		1 Kali Dengan Peserta 25 Orang Dengan Hasil 1 Dokumen & Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Pelaksanaan UMK dan THR Pada Perusahaan	1 Kali Dengan Peserta 25 Orang Dengan Hasil 1 Dokumen & Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Pelaksanaan UMK dan THR Pada Perusahaan	1 Kali Dengan Peserta 25 Orang Dengan Hasil 1 Dokumen & Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Pelaksanaan UMK dan THR Pada Perusahaan	1 Kali Dengan Peserta 25 Orang Dengan Hasil 1 Dokumen & Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Pelaksanaan UMK dan THR Pada Perusahaan	1 Kali Dengan Peserta 25 Orang Dengan Hasil 1 Dokumen & Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Pelaksanaan UMK dan THR Pada Perusahaan	1 Kali Dengan Peserta 25 Orang Dengan Hasil 1 Dokumen & Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Pelaksanaan	222.7	222.7	222.7	222.7	222.7	APBD	Disnakertrans

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
9. Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha															
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka														
	1. Penyusunan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) Prov. Banten Triwulan I Tahun 2011			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	APBD	Disnakertrans
	2. Informasi Bursa Tenaga Kerja melalui Bursa Kerja Online		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2	APBD	Disnakertrans
	3. Pameran Bursa Kerja/ Job Fair		1 Kegiatan (15.000 Pencari Kerja)	1 Kegiatan (15.000 Pencari Kerja)	1 Kegiatan (15.000 Pencari Kerja)	1 Kegiatan (15.000 Pencari Kerja)	1 Kegiatan (15.000 Pencari Kerja)	1 Kegiatan (15.000 Pencari Kerja)	1027.8	1027.8	1027.8	1027.8	1027.8	APBD	Disnakertrans
	4. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN)		1 Kegiatan (60 Orang)	1 Kegiatan (60 Orang)	1 Kegiatan (60 Orang)	1 Kegiatan (60 Orang)	1 Kegiatan (60 Orang)	1 Kegiatan (60 Orang)	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	APBD	Disnakertrans
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI															
Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten	Pembuatan Sumur Produksi Bagi Masyarakat			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	350	350	350	350	350		Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
Sosialisasi Pembangunan Listrik Perdesaan di Provinsi Banten Tahun 2012	Sosialisasi Pembangunan Listrik Perdesaan di Provinsi Banten Tahun 2012			180 Lokasi	180 Lokasi	180 Lokasi	180 Lokasi	180 Lokasi	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
Pembangunan IR dan SR di Provinsi Banten Tahun 2012	Pembangunan IR dan SR di Provinsi Banten Tahun 2012			20.500 Satuan	20.500 Satuan	20.500 Satuan	20.500 Satuan	20.500 Satuan	15.573	15.573	15.573	15.573	15.573	APBD	Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
	Pemutakhiran Calon Konsumen untuk Pembangunan Listrik Perdesaan di Provinsi Banten Tahun 2013				25.000 Calon	25.000 Calon	25.000 Calon	25.000 Calon		250	250	250	250	APBD	Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
Penyambungan Instalasi Listrik Perdesaan	Penyambungan Instalasi Listrik Perdesaan				20.500 Satuan	25.000 Calon	25.000 Calon	25.000 Calon		9.197	9.197	9.197	9.197	APBD	Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan	Perencanaan Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan				1 Dokumen Perencanaan Pembanguna					300				APBD	Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
	Perencanaan Pemasangan IR dan SR untuk Listrik Perdesaan				25.000 Satuan	25.000 Satuan	25.000 Satuan	25.000 Satuan		700	700	700	700	APBD	Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan	Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan				9 Dokumen Pengawasan Pekerjaan					700				APBD	Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
Pengembangan Energi Terbarukan di Provinsi Banten	Pembangunan PLTS/SHS di Daerah Terpencil di Provinsi Banten				268 Unit PLTS/SHS di	268 Unit PLTS/SHS di	268 Unit PLTS/SHS di	268 Unit PLTS/SHS di		1.930	1.930	1.930	1.930	APBD	Distamben
															Distamben
															Distamben
	Pembangunan Pikohidro di Daerah Terpencil di Provinsi Banten				15 Unit Pikohid	15 Unit Pikohi	15 Unit Pikohi	15 Unit Pikohidro		1.000	1.000	1.000	1.000	APBD	Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
Pengawasan Pembangunan PLTS/SHS di Provinsi Banten	Pengawasan Pekerjaan Pembangunan PLTS/SHS di Daerah Terpencil di Provinsi Banten				2 Dokumen Pengawasan Pekerjaan					92				APBD	Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
															Distamben
Inventarisasi pemanfaatan dan pengembangan potensi MIGAS	Pendataan MIGAS dan Penggunaan Energi				1 Dokumen Data MIGAS					420				APBD	Distamben
															Distamben
															Distamben
	Bimbingan Teknis Pemanfaatan BIOGAS				25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	550	550	550	550	APBD	Distamben
Pemberdayaan Masyarakat Miskin															
Pengembangan Kewirausahaan dan Kemitraan	Pelatihan Agribisnis Pertanian (Peluang Bisnis Pertanian Organik)								147						DINAS PERTANIAN &PETERNAKAN PROVINSI BANTEN
Pengembangan Agribisnis															
Pemberdayaan Kelompok Tani	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat								120,7						DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN PROVINSIBANTEN

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Pembinaan & Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Kehutanan Perkebunan								60,9						DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN PROVINSIBANTEN
Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Koperasi dan UMK															
Penumbuhan Wirausaha Baru	BINTEK Peningkatan Kualitas Usaha MIKRO Kecil								182,5						DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN
Pengembangan Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Kecil Bidang Industri Non Pertanian								75,5						DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN
Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata															
Pengembnagan Usaha Jasa Pariwisata	Terlaksananya Fasilitasi wisata Kuliner								553						DISBUDPAR PROVINSI BANTEN
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Advokasi Sadar Wisata								90						DISBUDPAR PROVINSI BANTEN

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 1 B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda															
Indikator MDGs	1.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja (-) 1.2 Rasio Kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (meningkat) 1.3 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (menurun)														
NASIONAL															
Kerangka Kebijakan Nasional	Pertumbuhan Ekonomi (%)			6,0-6,3	6,4-6,9	6,7-7,4	7,0-7,7								
	Pertumbuhan investasi (%)			7,9-10,9	8,4-11,5	10,2-12,0	11,7-12,1								
	Pertumbuhan PDB sisi produksi (%)														
	Pertanian			3,4-3,5	3,5-3,7	3,6-3,8	3,7-3,9								
	Industri pengolahan			5,9-5,4	5,7-6,5	6,2-6,8	6,5-7,3								
	Lainnya			7,0-7,3	7,3-7,7	7,5-8,4	7,8-8,6								
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)			7,3-7,4	6,7-7,0	6,0-6,6	5,0-6,0								
PROVINSI BANTEN															
Penyebarluasan	Menurunnya Tingkat Pengangguran	0,21%	1,29%	1,35%	1,50%	1,60%	1,85%	2,00%	1342	1490	1639	1787	1965	APBD	Disnakertrans
Informasi Bursa Tenaga	Terbuka 9,5 %														Provinsi Banten
Kerja															
Kegiatan :	Jumlah Tenaga Kerja yangTerserap	325 Orang	363 Orang	360 Orang	420 Orang	480 Orang	540 Orang	-	840	1000	1500	2000			
Pengembangan Kelembagaan															
Produktivitas dan															
Pelatihan Kewirausahaan															
Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Produktivitas dan Perlindungan tenaga Kerja															
Kegiatan :	Pelatihan Berbasis masyarakat dan	-	-	208 Orang	250 Orang	300 Orang	360 Orang	432 Orang	1170	1404	1684	2021	2426	APBD	BLKI
Pendidikan dan Pelatihan	berbasis kompetensi														
Keterampilan bagi															
Pencari Kerja															
Peningkatan Kompetensi	Pelatihan Berbasis Kompetensi	-	-	160 Orang	280 Orang	256 Orang	320 Orang	336 Orang	457.97	549.56	659,47	758.39	910		
Tenaga Kerja dan															
Produktivitas															
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan															
Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pedesaan	Pelatihan fasilitator santri bangun desa	100 Orang	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang		400	400	400	400	APBD	BPPMD
Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan	100 Orang	60 Orang		110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang		300	300	300	300	APBD	BPPMD
															BPPMD
	Pelatihan Pengurus BKAD				200 Orang	200 Orang	200 Orang			300	300	300	300		BPPMD
				180 Orang					300					APBD	BPPMD
Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan	Pelatihan Lumbung Desa		60 Orang	60 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100	150	150	150	150	APBD	BPPMD

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan	Pelatihan Kader PKK	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	270	270	270	270	270	APBD	BPPMD
Penguatan Organisasi Perempuan dalam Dunia Usaha	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan			80 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150	180	180	180	180	APBD	BPPMD
															BPPMD
	Pelatihan Manajemen bagi Kader Perempuan														BPPMD
				160 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	270	300	300	300	300		BPPMD
														APBD	BPPMD
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin															
Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Air Bersih	50 Orang	50 Orang	40 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100	90	100	100	100	APBD	BPPMD
Program Peran serta Kepemudaan															
Kegiatan Kepedulian Pemuda	1. Fasilitasi Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	23	29	30	30	30	30	30	1.216,0	1.200	1.200	1.200	1.200	APBN	
Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1. Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Wirausaha Pemuda	30	30	35	35	30	30	30	234.39	250	230	230	230	APBN	
Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	1. Bantuan organisasi Kepemudaan	2 okp	2 okp	2 okp	2 okp	2 okp	2 okp	2 okp	20	20	20	20	20	APBN	
Kegiatan Pemgembangan Life Skill Pemuda	1. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Pengembangan wawasan Kewirausahaan pemuda	30	30	40	30	30	20	20	200	250	200	150	150	APBD	
Peningkatan Investasi Dunia Usaha															
Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan	Fasilitasi Kerja Sama Perdagangan antar pelaku Usaha Provinsi Anggota MPU								63,7						DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN
Pengembangan dan Pengendalian Bidang Pertambangan Energi															
Pengembangan Energi Terbarukan di Provinsi Banten	terlaksananya Pemabngunan PLTS/SHS di Daerah Terpencil di Provinsi Banten								2076,9						DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI BANTEN
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah															
Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan	Korelasi Tenaga Kerja dan Ketersedian Lapangan Pekerjaan								76						BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BANTEN
	Ketersedian Tenaga Kerja dan Pembentukan Nilai Tambah Terhadap Investasi di Sektor Industri								75,2						BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BANTEN

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (Rp.Juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015															
Indikator MDGs	**1. Prevalensi balita kekurangan gizi** **2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum**														
NASIONAL															
Program 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Persentase balita gizi buruk yang mendapatr perawatan			100	100	100	100	-	536,0	564,0	643,0	668,0	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)			70	75	80	85	-							
PROVINSI BANTEN															
Program 1. Peningkatan Ketahanan Pangan															
Kegiatan 1.															
Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan	1. Indek Tingkat Kerentanan Pangan	3,96 97,06%	3,96 90,41%	4,69	5,07	5,47	5,90	6,37	215	236.5	260.15	286.16	314.78	APBD	BKPD Banten
Kegiatan 2.	2. Indek Akses Pangan dan Pendapatan Masyarakat	5,42	4,63	4,89	4,98	5,08	5,18	5,28	305	335.5	369	405,9	446,5	APBD	BKPD Banten
Pengembangan Sistem Distribusi , Harga dan Akses Pangan		115,32%	96,46%												
Kegiatan 3.	3. Indek Ketersediaan Pangan	3,13	4,00	4,83	5,33	6,13	7,05	8,11	1.973	2.171	2.388	2.627	2.890	APBD	BKPD Banten
Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan Cadangan Pangan		81,72%	92,38%												
Kegiatan 4.	4. Indek Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan	2,60	3,80	3,73	4,26	5,32	6,65	8,31	678	745	820	902	992	APBD	BKPD Banten
Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan		97,74%	118,75%												
Kegiatan 5.									437	481	529	582	640	APBD	BKPD Banten
Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan															
Kegiatan 6.									310	341	375	413	454	APBD	BKPD Banten
Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi Pangan															
Kegiatan 7.									401	441	485	534	587	APBD	BKPD Banten

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (Rp.juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan															
Program 2.															
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat															
Kegiatan 1.															
Pengembangan Ketersediaan Penanganan Rawan Pangan									683	751	826	908	999	APBN	Kab/Kota
Kegiatan 2									2.935	3.229	3.552	3.907	4.298	APBN	BKPD Provinsi
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan															
Kegiatan 3.									1.510	1.661	1.827	2.010	2.211	APBN	BKPD Provinsi
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar															
Kegiatan 4.									955	1.051	1.156	1.271	1.398	APBN	BKPD Provinsi
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan															
Program 1. Peningkatan Ketahanan Pangan															
Kegiatan 1															
Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan teknologi Kehutanan dan Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan pangan dari kawasan hutan dan kebun	500 ton	361	500	600	750	850	1	500	600	750	850	1000	APBD	Dishutbun
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan															
Kegiatan Pengembangan Forum Kader Posyandu dan Pengembangan Model Posyandu Asuhan Dini Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (ADITUKA)	Pelatihan Kader Posyandu	150 Orang	300 Orang	80 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	580	160	580	580	580	APBD	BPPMD
	Berkembangnya Model Posyandu ADITUKA	100 Orang	100 Orang	80 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	120	100	120	120	120		
Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan	Pelatihan Kader PKK	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	270	270	270	270	270	APBD	BPPMD

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (Rp.juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Pembinaan P2WKSS	12 Lokasi	15 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	350	350	350	350	350	APBD	BPPMD
Kegiatan Fasilitasi Keluarga Berencana	Pembinaan Koordinator PPKBD		150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150	150	150	150	150	APBD	BPPMD
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak															
Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan			100	100	100	100	100	536	564	643	668	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S)			70	75	80	85	**85**							
Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan			100	100	100	100	100	2397,7	1998,3	2185,9	2185,9	2137,5	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
Sub kegiatan 1.a: Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas perawatan dan RSUD	1.a. Cakupan puskesmas perawatan dan RSUD memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.			30	50	75	100	100	567	378	472,5	472,5	472,5	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
				50	75	90	100	100	72	48	48	48	0	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
Sub kegiatan 1.b: Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas non perawatan	1.b. Cakupan puskesmas non perawatan memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.			20	50	75	100	100	106,2	159,3	132,7	132,7	132,7	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
Sub kegiatan 1.c: Pengadaan alat dapur dan sarana	1. c. Cakupan puskesmas perawatan yang memiliki alat dapur dan sarana melaksanakan tatalaksana gizi buruk			30	50	75	100	100	630	420	525	525	525	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
				30	50	75	100	100	88,5	59	73,7	73,7	73,3	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (Rp.Juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 1.d: Penyediaan obat gizi buruk	1.d. Cakupan kasus gizi buruk yang memperoleh obat gizi buruk			100	100	100	100	100	90	90	90	90	90	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
Sub kegiatan 1.e: Pendampingan gizi buruk oleh kader	1.e. Cakupan kasus gizi buruk paska perawatan yang didampingi oleh kader			100	100	100	100	100	844	844	844	844	844	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat	2. Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S)			70	75	80	85	85	12940,7	12751,7	16805,2	16805,2	16805,2	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
Sub kegiatan 2.a: Pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi petugas puskesmas dan kabupaten kota	2.a. Cakupan puskesmas kabupaten/kota yang telah dilatih dengan pemantauan pertumbuhan baru.			25	50	75	100	100	567	378	472,5	472,5	472,5	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
Sub kegiatan 2.b: Pelatihan ulang kader posyandu	2.b. Cakupan posyandu yang melakukan pelatihan ulang kader.			30	60	100	100	100	2.969,70	2.969,7	3.959	3.959	3.959	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
Sub kegiatan 2.c: Pembinaan kader posyandu	2.c. Cakupan posyandu yang dilakukan pembinaan kader.			40	70	100	100	100	1.979,8	1.979,8	4.949,5	4.949,5	4.949,5	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
Sub kegiatan 2.d: Penyediaan sarana dan prasarana kader posyandu	2.d. Cakupan posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan			25	50	75	100	100	2.474,7	2.474,7	2.474,7	2.474,7	2.474,7	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
Sub kegiatan 2.e: Penyediaan dana operasional posyandu	2.e. Cakupan posyandu yang memperoleh dana operasional			100	100	100	100	100	4.949,5	4.949,5	4.949,5	4.949,5	4.949,5	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Gizi Dinkes Provinsi Banten
9. Perbaikan Gizi Mayarakat															
(1) Perbaikan Gizi Masyarakat	*Meningkatnya kualitas gizi masyarakat*														
	Menurunnya jumlah kasus balita gizi buruk dan kurang														Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran (Rp.juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Koordinasi Perencanaa Program Gizi Provinsi dengan Kab/Kota			35 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	35 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	35 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	35 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	35 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	85.2	85.2	85.2	85.2	85.2	APBN / APBD Provinsi Banten	Dinkes
	Workshop Therapeutic Feeding Center (TFC)			30 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	30 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	30 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	30 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	30 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	165.7	165.7	165.7	165.7	165.7	APBN / APBD Provinsi Banten	Dinkes
	Pelacakan dan Validasi Kasus Balita Gibur ke Kab/Kota			64 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	64 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	64 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	64 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	64 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	APBN / APBD Provinsi Banten	Dinkes
	Konsultasi Program Gizi ke Pusat			40 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	40 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	40 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	40 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	40 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	17	17	17	17	17	APBN / APBD Provinsi Banten	Dinkes
	Rapat Koordinasi Teknis ProgramTingkat Nasional			3 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	3 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	3 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	3 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	3 orang (Provinsi dan Kab/Kota)	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	APBN / APBD Provinsi Banten	Dinkes
	Penyediaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)			5000 Balita (Provinsi dan kab/Kota)	5000 Balita (Provinsi dan kab/Kota)	5000 Balita (Provinsi dan kab/Kota)	5000 Balita (Provinsi dan kab/Kota)	5000 Balita (Provinsi dan kab/Kota)	6009.7	6009.7	6009.7	6009.7	6009.7	APBN / APBD Provinsi Banten	Dinkes
	Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil (Nutrisi Seluler)			700 Bumil (Provinsi dan Kab/Kota)	700 Bumil (Provinsi dan Kab/Kota)	700 Bumil (Provinsi dan Kab/Kota)	700 Bumil (Provinsi dan Kab/Kota)	700 Bumil (Provinsi dan Kab/Kota)	1013.9	1013.9	1013.9	1013.9	1013.9	APBN / APBD Provinsi Banten	Dinkes
	Penyediaan sarana promosi program gizi			5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	75.3	75.3	75.3	75.3	75.3	APBN / APBD Provinsi Banten	Dinkes
	Penyediaan Sarana prasarana Posyandu			6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	1135.9	1135.9	1135.9	1135.9	1135.9	APBN / APBD Provinsi Banten	Dinkes
Pemberdayaan Masyarakat Miskin															
Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (WRSE)								139,5						DINSOS Prov.Banten
	Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3)								57,1						
	Pemberian Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Operasional LK3								403,2						

MATRIK RAD MDGs PROVINSI BANTEN 2011-2015

Tujuan 2 . MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2010		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target2A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar per hari dalam kurun waktu 1990-2015															
Indikator MDGs	**2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar (100%)** **2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (100%)** **2.3 Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki**														
NASIONAL															
Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar															
Kegiatan 1 :Penjaminan Kepastian Layanan Pendidiklan SD	APM SD/SDLB			84,74%	85,10%	85,19%	85,36%	2.394.5	1.619.1	2.394.5	2.929.2	3.537.1		APBN	Kementerian Pendidikan Nasional
Kegiatan 2 : Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS													APBN	Kementerian Pendidikan Nasional
A. Pendidikan non Formal, informal dan Kecakapan	APM SD/MI sederajat (%)	98,48	98,76	98	99										
	APK SMP/MTs sederajat (%)	98,17	98,88	98,45	99,25										
	Rasio Lulusan SD/MI sederajat yang melanjutkan ke SMP/MTs sederajat														
PROVINSI BANTEN															
Program Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pendidikan Menengah															
Peningkatan Mutu Akses dan Tata Kelola SMA	Bantuan khusus murid miskin (BKMM)		**6.098 siswa**	**6.098 siswa**	**6.098 siswa**	**6.098 siswa**	**6.098 siswa**	**6.098 siswa**	**4119.18**	**4119.18**	**4119.18**	**4119.18**	**4119.18**	**APBN**	**Dindik**
Peningkatan Mutu Akses dan Tata Kelola SMP	Bantuan Gubernur untuk siswa SMP (BAGUS SMP)	**2.050 siswa**	**2.265 siswa**	**395 siswa**					**1.230**	**1.359**	**237**			**APBD**	**Dindik**
	Bantuan khusus murid miskin (BKMM)	**35.348 siswa**	**26.632 siswa**						**18769.78**	**14647.6**				**APBN**	**Dindik**
Peningkatan Mutu Akses dan Tata Kelola SD	Bantuan Gubernur untuk siswa SMP (BAGUS SMP)	**2.000 siswa**	**2.000 siswa**	**2.000 siswa**	**2.000 siswa**	**2.000 siswa**	**2.000 siswa**	**2.000 siswa**	**720**	**720**	**720**	**720**	**720**	**APBD**	**Dindik**
	Bantuan khusus murid miskin (BKMM)	**91.636 siswa**	**91.505 siswa**	**92.000 siswa**	**92.000 siswa**	**92.000 siswa**	**92.000 siswa**	**92.000 siswa**	**36886.32**	**36886.32**	**36886.32**	**36886.32**	**36886.32**	**APBN**	**Dindik**
Pendidikan non Formal, informal dan Kecakapan Hidup															
A. Gerakan Pemberantasan Buta Aksara	Angka Buta Aksara Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas			5,5 %										APBD	DINDIK

Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2010		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1. Lomba Kreatifitas Peserta Didik Keaksaraan Fungsional	Jumlah Peserta Lomba Kreatifitas Peserta Didik Keaksaraan Fungsional			80 Orang					150					APBD	DINDIK
2. Pengadaan Bahan Ajar Keaksaraan	Jumlah Penerima Bahan Ajar Keaksaraan			9900 Eksemplar					300					APBD	DINDIK
B. Pendidikan Berkebutuhan Khusus	**APM SD/SDLB**			**98%**										APBD	DINDIK
	APK SMP/SMPLB			**98,45 %**										APBD	DINDIK
1. OPERASIONAL BPPK	Jumlah Operasional BPPK			12 Bulan					4.320					APBD	DINDIK
2 .RAKORNIS BPPK	Jumlah Rakornis BPPK			75 Orang					81.685					APBD	DINDIK
3. OPERASIONAL PENGAWAS PK dan PLK	Jumlah Pengawas PK dan PLK			12 Bulan					37.72					APBD	DINDIK
C. WAJAR DIKDAS 9 Tahun dan WAJAR 12 Tahun	**APK SMP**			98,45 %										APBD	DINDIK
	Rata-rata Nilai UN SMP			7										APBD	DINDIK
1. Perluasan Program Sekolah Standar Nasional (SSN)	Jumlah Perogram SSN			50 sek, 100 org					136					APBD	DINDIK
2. Sosialisasi Wajar Dikdas 9 Tahun dan 12 Tahun	Jumlah Sosialisasi Dikdas 9 Thn dan 12 Thn			2 Keg					139.69					APBD	DINDIK
E. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	**Ketersediaan Data dan Kebutuhan Fasilitas TIK Sekolah serta Manajemen Peningkatan Mutu Guru TIK**			100%										APBD	DINDIK
1. PELATIHAN MEDIA PRESENTASI UNTUK PEMBELAJARAN BERBASIS TIK	Jumlah Pelatihan Pembelajaran			150 Org					250					APBD	DINDIK
3. PELATIHAN PENGELOLAAN FASILITAS ICT	Jumlah Peserta Pengelolaan Fasilitasi ICT			120 Org					214.29					APBD	DINDIK
4. WORKSHOP TEKNIS PENYUSUNAN MODEL BAHAN AJAR BERBASIS TIK	Jumlah Peserta Teknis Penyusunan Modal Bahan Ajar Berbasis TIK			170 Ogr					267					APBD	DINDIK
5. PENGADAAN PERLENGKAPAN ICT	Jumlah Pengadaan Perlengkapan ICT			1 Keg					666.35					APBD	DINDIK
6. PENGADAAN BUKU CARA CEPAT BELAJAR KOMPUTER	Jumlah Pengadaan Buku Cara Belajar Cepat			1 Keg					101.65					APBD	DINDIK
7. PEMENUHAN KEBUTUHAN FASILITAS ICT SEKOLAH	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas ICT Sekolah			1 Keg					71.65					APBD	DINDIK
8. MEDIA PUBLIKASI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT (RADIO)	Jumlah Publikasi Layanan Masyarakat			1 Keg					680					APBD	DINDIK
G. Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	**Tenaga Kependidikan Formal**			**60%**										APBD	DINDIK

Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2010		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
2. Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah Jenjang SD, SMP	Jumlah TA Sekolah Jenjang SD, SMP			100 Org					284.18					APBD	DINDIK
3. Pemilihan Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi Jenjang TK/SD, SMP	Jumlah Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi			32 Pengawas					402.21					APBD	DINDIK
2. Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Jenjang TK/SD, SMP	Jumlah Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi			40 Kepala Sekolah					416.52					APBD	DINDIK
3. Validasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Non Formal	Jumlah Validasi Data Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Formal Non Formal			1 Kegiatan					191.4					APBD	DINDIK
4. Workshop Pengembangan Kepemimpinan Kependidikan bagi UPT	Jumlah Workshop Pengembangan Kepemimpinan Kependidikan bagi UPT			90 UPT					436.5					APBD	DINDIK
5. Penguatan Assosiasi Tenaga Kependidikan (AKSI/APSI Provinsi Banten)	Jumlah Penguatan Assosiasi Tenaga Kependidikan			18 AKSI/APSI					841.6					APBD	DINDIK
6. Workshop Pengembangan Standar Nilai Moral pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Jumlah Workshop Pengembangan Standar Nilai Moral pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah			75 Orang					425.9					APBD	DINDIK
7. Pemilihan Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan	Jumlah Pemilihan Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan			9 Kepala Sekolah					150,00					APBD	DINDIK
8. Pemilihan Tenaga Laboratorium Berprestasi	Jumlah Laboratorium Berprestasi			9 Laboran					150,00					APBD	DINDIK
H. WAJAR DIKDAS 9 Tahun dan WAJAR 12 Tahun	**APM SD**			**98%**										APBD	DINDIK
														APBD	DINDIK
	Rata-rata nilai UASBN SD			**7,75**										APBD	DINDIK
1. Workshop Pengembangan KTSP (Model Pembelajaran Kelas Awal dan Kelas Tinggi)	Workshop Pengembangan KTSP			300 Org					388.1					APBD	DINDIK
2. Workshop Pengembangan RKS	Jumlah Workshop Pengembangan RKS			125 Org					169.9					APBD	DINDIK
3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Provinsi, Pembinaan dan Pengiriman Peserta O2SN ke tingkat Nasional	Jumlah Cabang Olahraga			13 Cabang Olahraga					1.092,00					APBD	DINDIK
4. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi, Pembinaan dan Pengiriman Peserta OSN ke Tingkat Nasional	Jumlah Mata Pelajaran OSN			2 Mata Pelajaran					249.39					APBD	DINDIK
5. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Provinsi, Pembinaan dan Pengiriman Peserta FLS2N ke Tingkat Nasional	Jumlah FLS2N Tingkat SD			8 Lomba					448.4					APBD	DINDIK
6. Festival Kesenian Tradisional SD	Jumlah Kegiatan Festival Kesenian Tradisional SD			1 Keg					186.7					APBD	DINDIK
7. Lomba Gugus SD	Jumlah Lomba Gugus SD			8 Sekolah					53.7					APBD	DINDIK
8. Lomba Kinerja SD	Jumlah Lomba Kinerja SD			8 Sekolah					53.7					APBD	DINDIK
9. Lomba Sekolah Sehat SD	Jumlah Lomban Sekolah Sehat			8 Sekolah					53.7					APBD	DINDIK
10. Lomba Club Olahraga SD	Jumlah Lomba Perpustakaan SD			8 Sekolah					53.7					APBD	DINDIK
11. Lomba Perpustakaan SD	Jumlah Lomba Perpustakaan SD			8 Sekolah					53.7					APBD	DINDIK
12. Bimbingan Teknis Pembinaan Karakter Budaya Bangsa	Jumlah Peserta Bimbingan Karakter Budaya Bangsa			250 Orang					329.62					APBD	DINDIK

Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2010		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
13. Verifikasi Alat Bantu Pendidikan SD	Jumlah Verifikasi Alat Bantu Pendidikan SD			1 Keg					56.28					APBD	DINDIK
14. Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Penggunaan Alat Bantu Pendidikan SD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Penggunaan Alat Bantu Pendidikan SD			150 orang					151.78					APBD	DINDIK
16. Alat Peraga KIT IPA (Sains) / KIT Matematika SD	Jumlah Alat Peraga KIT IPA / KIT			150 Set					1.445,00					APBD	DINDIK
17. Buku Tematik SD Kelas 1, 2, dan 3 jilid 4	Jumlah Buku Tematik SD			102.000 Eks					134.75					APBD	DINDIK
18. Sosialisasi Wajar Dikdas 9 Tahun Melalui Media Elektronik (Radio)	Jumlah Paket Sosialisasi Diklat 9 Tahun			1 Paket										APBD	DINDIK
Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah															
Kegiatan 1 Pemberian Bantuan siswa miskin tingkat MI.MTs dan MA.	1. presentase siswa miskin masuk sekolah lagi	70	70	75	80	85	90	95	47.724.160	49.795.368	52.285.136	54.899.393	57.644.363	APBN	Kanwil Kemenag
	2. Presentase penurunan siswa putus sekolah	65	70	75	80	85	90	95							
Program : Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat															
Penyediaan Bahan Deposit dan Otomasi Perpustakaan	**Jumlah Pengunjung pada TBM, Perpusda dan Perpustakaan Keliling**		**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**295,0**	**360,0**	**424,8**	**509,8**	**611,7**	**APBD**	**BPAD**
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan daerah Provinsi Banten			**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**637,1**	**400,0**	**917,4**	**1100,9**	**1321,3**	**APBD**	**BPAD**
Pemasyarkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat			**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**312,9**	**190,9**	**4506,8**	**540,8**	**648,9**	**APBD**	**BPAD**
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat			**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**246,1**	**246,1**	**538,6**	**646,3**	**775,6**	**APBD**	**BPAD**
Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan			**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**643,8**	**643,8**	**783,0**	**939,6**	**1127,6**	**APBD**	**BPAD**
Pembangunan Sisitem Layanan Perpustakaan Berbasis TIK			**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**160,0**	**160,0**	**217,2**	**260,7**	**312,9**	**APBD**	**BPAD**
							Jumlah		**2313,8**	**2000,8**	**3331,9**	**3998,3**	**4798,0**		
Program : Pengembangan Perpustakaan															
Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	**Jumlah Anggota Jejaring Perpustakaan**		**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	2163,8	2.596.668.000	3.116.001.600	3.739.201.920	4.487.042.304	**APBN**	**Perpusnas**
Pengembangan Layanan Perpustakaan Pendukung Pendidikan	**Jumlah Perpustakaan masyarakat Pendukung Pendidikan**		**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**20%**	**1.370.000.000**	**1.644.000.000**	**1.972.800.000**	**2.367.360.000**	**2.840.832.000**	**APBN**	**Perpusnas**
Kajian Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan	Research Design Kajian Dampak Sertifikasi Guru Terhadap														BADAN PENELITIAN
	Kajian Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Mutu														BADAN PENELITIAN

MATRIK RAD MDGs PROVINSI BANTEN 2011-2015

Tujuan 3 . MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 3 A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada 2005, dan di															
Indikator MDGs	**3.1 Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi** **- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (100%)** **- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (100%)** **- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (100%)** **- Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi (100%)** **3.1 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia15-24 tahun (100%)** **3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian (meningkat)** **3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (meningkat)dalam kurun waktu 1990-2015**														
PROVINSI BANTEN															
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan															
Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan	Pelatihan Kader PKK	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	154 Orang	270	270	270	270	270	APBD	BPPMD
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender	Workshop Kesetaraan Gender		50 Orang	40 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	70	100	100	100	100	APBD	BPPMD
Pemberdayaan Masyarakat Miskin															
Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil	Peningkatan SDM KUB Pengolah								40,8						DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
Peningkatan Ketahanan Pangan															
Diserfikasi Produk Hasil Perikanan	Lomba Cipta Menu Berbahan Baku Ikan								23,3						DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
Peningkatan Ketahanan Pangan															
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal	Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal kepada Kelompok di Pendidikan Formal dan Non Formal								200						DINAS KELAUTAN & PERIKANAN PROVINSI BANTEN

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Pembinaan /Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal kepada Kelompok/Organisasi Wanita dan Pada UMKM Pengolah/Pengusaha Pangan Lokal								200						
Peningkatan Kualitas kelembagaan Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja															
Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Pelatihan PUG bagi Pengusaha Pengguna NAKER Perempuan								60,4						DISNAKERTRANS PROVINSI BANTEN
	Pembinaan dan Pengawasan TK Perempuan dan Anak								34,3						DISNAKERTRANS PROVINSI BANTEN
	Sosialisa dan Advokasi Kesehatan sekaligus PemasanganALKON bagi Pekerja Perempuan di Perusahaan								105,1						DISNAKERTRANS PROVINSI BANTEN
Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan															
Pembinaan Organisasi Politik,Monitoring dan Fasilitasi PEMILUKADA GUBERNUR dan WAGUB BANTEN	Sosialisasi PEMILUKADA 2011 bagi Organisasi Perempuan I								132,9						BADAN KESBANG & POLITIK PROVINSI BANTEN
	Sosialisasi PEMILUKADA 2011 bagi Organisasi Perempuan II								127,3						BADAN KESBANG & POLITIK PROVINSI BANTEN
	Peningkatan Partisipasi politik Perempuan bagi Partai Politik								131,2						BADAN KESBANG & POLITIK PROVINSI BANTEN
Pemeliharaan Keamanan,Ketentraman,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat															
Fasilitas BADAN NARKOTIKA PROVINSI BANTEN (BNP)	Penyuluhan P4GN bagi Wanita Gender di Wilayah Tangerang								66,8						BADAN KESBANG & POLITIK PROVINSI BANTEN
	Penyuluhan P4GN bagi Wanita Gender di Wilayah Kab/Kota Serang,Kota Cilegon.Kab.Pandeglang dan Lebak								68,2						BADAN KESBANG & POLITIK PROVINSI BANTEN
Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat															

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah Provinsi Banten	Penambahan Koleksi Perpustakaan Daerah Provinsi Banten								282,1						BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI BANTEN
Peningkatan Kualitas Layanan perpustakaan	Hari Kunjungan Perpustakaan								129,1						BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI BANTEN
Perencanaan Pembangunan Daerah															
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Perencanaan Pembangunan PUG dan PA								248						BAPPEDA PROVINSI BANTEN
	Perecanaan Pembangunan KHPPIA								223,8						BAPPEDA PROVINSI BANTEN
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah															
Pembinaan dan peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Pegawai Setda	Rapat koordinasi Pembinaan Aparatur Berbasisi Gender di lingkungan Setda Provinsi Banten								23,1						BIRO ORGANISASI PROVINSI BANTEN
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah															
Inventarisasi dan Pengolahan Data Pembangunan	Analisis Responsif gender								43,6						BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN
Pendidikan Nonformal,Informal dan Kecakapan Hidup															
Pembinaan Pendidikan Kursus 7 Kelembagaan	Penyelenggaraan PUS Tingkat Provinsi								691,4						DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN
	Penguatan Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2011								287,3						DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN
Perluasan & Penyelenggaraan Paket A,B, & C	Sosialisasi dan Verifikasi Program pendidikan Kesetaraan								193						DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN
Peningkatan peran serta Kepemudaan															

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Fasilitas Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) Provinsi Banten								96,8						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
Peningkatan Kapsitas Lembaga Pemerintah Daerah															
Peningkatan sarana dan Prasarana Ketatausahaan Pimpinan	BINTEK Peningkatan Kapasitas Etika Kepribadian Aparatur Responsif Gender								159,9						DISHUBKOMINFO PROVINSI BANTEN
Program 1 : Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan															
Kegiatan 1 : Pembinaan Organisasi Politik,Monitoring dan Fasilitasi PemiluKada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten	1. Pembinaan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan bagi Partai Politik	70 orang	90 orang	100 orang	180 orang	200 orang	250 orang	300 orang	131.22	360	450	600	700	APBD	KESBANGPOL
	2. Sosialisasi dan Pembinaan Pemilukada bagi Organisasi Perempuan	0	0	200 ORANG	0	0	0	0	260.24	0	0	0	0	APBD	KESBANGPOL

MATRIK RAD MDGs PROVINSI BANTEN 2011-2015



Tujuan 4 . MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 4A : Menurunkan angka kematian balita hingga dua pertiga dalam kurun waktu 1990-2015															
Indikator MDGs	**4.1. Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup** **4.2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 kelahiran hidup** **4.3. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup** **4.4. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dalam kurun waktu 1990-2015**														
NASIONAL															
Program 1 : Bina gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak															
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN 1)			86	88	89	90	-	370,0	402,0	418,0	433,0	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi			85	86	87	90	-							
	3. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita			80	81	83	85	-							
PROVINSI BANTEN															
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerja Gerakan Sayang Ibu (GSI)		1 Keg		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		70	70	70	70	APBD	**BPPMD**
	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)														

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Penilaian GSI														
										70	70	70	70		
	Pembentukan POKJATAP GSI		1 Keg		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg						APBD	
	Rakor TKP3									100	100	120	120		
			1 Keg		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg						APBD	
	Rakor POKJATAP GSI														
			1 Keg							60	60	60	60		
										80	80	80	80		
			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	60					APBD	
									70						
				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg						APBD	
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Pembinaan P2WKSS		15 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	350	350	350	350	350	APBD	BPPMD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan															
Kegiatan Pengembangan Forum Kader Posyandu dan Pengembangan Model Posyandu Asuhan Dini Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (ADITUKA)	Pelatihan Kader Posyandu	150 Orang	300 Orang	80 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	580	160	580	580	580	APBD	BPPMD
	Berkembangnya Model Posyandu ADITUKA		100 Orang	80 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	120	100	120	120	120		
														APBD	
Program Revitalisasi Keluarga Berencana															

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Kegiatan Fasilitasi Keluarga Berencana	Pembinaan Koordinator PPKBD	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150	150	150	150	150	APBD	BPPMD
NASIONAL															
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak															
Kegiatan 1: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	1.Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)			86	88	89	90	-	370	402	418	433	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi Yang Ditangani														
	3.Cakupan pelayanan kesehatan bayi (K By)			85	86	87	90	-							
	4.Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (K Bal)			80	81	83	85	-							
DAERAH															
Kegiatan 1: Pembinaan Pelayanan Kesehatan neonatal	**1.Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)**			86	88	89	90	92	6.174	7.284	7.284	7.284	6.224		
Sub Kegiatan 1a. Pemberian asuhan bayi baru lahir sesuai standar	Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini			86	88	89	90	92							
	Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan suntikan vitamin K1			86	88	89	90	92	600	600	600	600	600	APBN/APBD	Subbid Kesga

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 1b. Pemenuhan kebutuhan perawat dan bidan di desa dan faskes (PKM dan RS)	Prosentase desa yg mempunyai tenaga bidan /perawat			90	95	100	100	100						APBN/APBD	Subbid Kesga
Sub Kegiatan 1c. Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Manajemen BBLR bagi perawat/bidan di Puskesmas	Prosentase tenaga kesehatan (perawat/bidan) yang terlatih manajemen Asfiksia dan manajemen BBLR			40	50	60	70	80	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 1d. Distribusi Vaksin HB O	Prosentase Poskesdes/bidan desa yang mempunyai jumlah vaksin HB 0 sesuai sasaran (**Lihat dari IMUNISASI)**			100	100	100	100	100	250	300	300	300	300	APBD/APBN	Subbid Survailans Epid & Imunisasi
Sub kegiatan 1e. Penyediaan perinatologi set bagi Puskesmas perawatan dan RS Kab/kota	Prosentase Puskesmas PONED yg mempunyai minimal 1 perinatologi set (meja resusitasi dengan penghangat, inkubator, alat resusitasi, KMC set) yang siap pakai dan aman			100	100	100	100	100						APBD/APBN	Subbid Yankes Dasar

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Prosentase RS Kab/kota yg mempunyai minimal 1 perinatologi set (Infant incubator, Baby puff, Bubble CPAP, transport incubator, alat resusitasi, KMC set, Infant warmer, Ventilator Neonatus) yang siap pakai			100	100	100	100	100	0	1.060	1.060	1.060	-	APBD/APBN	Subbid Yankes Rujukan
Sub kegiatan 1f. Pemberdayaan masyarakat tentang perawatan BBL	Prosentase Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu			70	80	90	100	100	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub Kegiatan 1g. Pelaksanaan Audit maternal perinatal (AMP) di Kab/Kota	Prosentase Kab/Kota yang melaksanakan AMP 4 x setahun			100	100	100	100	100	400	400	400	400	400	APBD/APBN	Subbid Kesga
Kegiatan 2: Pembinaan Pelayanan Kesehatan bayi	**2.Cakupan pelayanan kesehatan bayi**			85	86	87	90	91	6.131	6.816	7.140	7.176	5.775	APBD/APBN	
Sub Kegiatan 2a. Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS ke anak	Prosentase kab/kota yang melakukan sosialisasi mengenai pencegahan HIV/AIDS dari ibu terinfeksi HIV/AIDS													APBD/APBN	Subbid P2

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 2b. Pemberian pelayanan kesehatan pada bayi sesuai standar	Cakupan bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar (Imunisasi dasar lengkap, Vit. A, SDIDTK 4 x/tahun, dan perawatan serta penyuluhan pada ibu)			85	86	87	90	92	426,0	426,0	426,0	426,0	426,0	APBD/APBN /Jamkesmas /Jamkesda/b ok	Subbid Kedga
Sub kegiatan 2c. Peningkatan jumlah Puskesmas dengan rantai dingin yang efektif	Prosentase Puskesmas dengan rantai dingin efektif			100	100	100	100	100	450	1.100	1.100	1.100	1.100	APBD/APBN	Subbid Survailans Epid & Imunisasi
Sub kegiatan 2d. Pelatihan Pemberian Imunisasi Sesuai Standar	Prosentase Puskesmas yang memiliki minimal 2 - 3 tenaga kesehatan yang terlatih memberikan imunisasi sesuai			50	60	60	70	70	250,0	250,0	300,0	300,0	300,0	APBD/APBN	Subbid Survailans Epid & Imunisasi
Sub kegiatan 2e. Pemberian imunisasi campak pada bayi	Prosentase bayi yang diimunisasi campak			90	90	90	90	90	250,0	250,0	300,0	300,0	300,0	APBD/APBN	Subbid Survailans Epid & Imunisasi
Sub kegiatan 2f. Distribusi Vaksinasi Dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, Campak)	Prosentase puskesmas yang mempunyai semua jenis vaksinasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak)			100	100	100	100	100	600	600	700	700	700	APBD/APBN	Subbid Survailans Epid & Imunisasi

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 2g. Pemberian imunisasi dasar lengkap	Cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak) dalam			80	85	90	95	100	400	400	500	500	500	APBD/APBN	Subbid Survailans Epid & Imunisasi
Sub kegiatan 2h. Pemberian vit A 100.000 IU bagi Bayi (6-11 bulan)	Cakupan bayi (6-11 bulan) yang mendapat Vit A 100.000 IU			75	78	80	83	85	904	939	963	999	1.024	APBD/APBN	Subbid Gizi
Sub kegiatan 2i. Pelatihan SDIDTK bagi petugas kesehatan	Prosentase Puskesmas yang memiliki minimal 3 tenaga kesehatan terlatih SDIDTK			20	40	60	80	90	2.851	2.851	2.851	2.851	1.425	APBD/APBN	Subbid Kesga
Kegiatan 3: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	**3.Cakupan pelayanan kesehatan Anak balita**			80	81	83	85	-	13.474	15.599	18.423	18.447	17.999	APBD/APBN	
Sub kegiatan 3a. Desa yang memiliki kelompok peminat KIA	Prosentase Desa yang memiliki Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) / Kelas Ibu Balita, PAUD, BKB			70	80	90	100	100	150	150	150	150	150	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 3b. Penyediaan Buku KIA	Prosentase Desa yang memiliki Buku KIA			100	100	100	100	100	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 3c. Penyediaan oralit dan zink di Posyandu	Prosentase Posyandu yang memiliki ketersediaan oralit dan zinc bagi balita			100	100	100	100	100	300	300	400	400	400	APBD/APBN	Subbid P2

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 3 d. Pemberian pelayanan kesehatan pada anak balita sesuai standar	Cakupan anak balita (12-59 bulan) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (pertumbuhan minimal 8 kali/tahun, pemantauan pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 2 kali/tahun dan vitamin A minimal 2 kali tahun)			80	81	83	85	87	600	600	600	600	600	APBD/APBN /Jamkesmas /Jamkesda/b ok	Subbid Kesga
Sub kegiatan 3e. Pemberian Vitamin A 200.000 IU bagi Anak Balita	Cakupan anak balita yang mendapat Vitamin A 200.000 IU pada bulan Februari dan Agustus			100	100	100	100	100						apbd/apbn	
Sub kegiatan 3f. Pelayanan MTBS di Puskesmas untuk balita sakit sesuai standar	Prosentase Puskesmas yang melayani balita sakit dengan pendekatan MTBS			50	60	70	80	85	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	apbd/apbn/ bln	
Sub kegiatan 3g. Pelatihan MTBS bagi perawat dan Bidan	Prosentase Puskesmas yang memiliki minimal 3 perawat atau bidan terlatih MTBS			50	60	70	80	85	300,0	300,0	300,0	300,0	150,0	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 3h. Pemenuhan kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM di puskesmas	Prosentase Puskesmas yang memiliki kecukupan obat, alat dan form MTBS/MTBM			50	60	70	80	85	50,0	50,0	50,0	50,0	25,0	APBD/APBN	Subbid Kesga
				100	100	100	100	100						APBD/APBN	Subbid Kesga

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 3i. Pelayanan Balita sakit di Puskesmas Perawatan dan RS Kab/Kota sesuai standar	Prosentase RS Kab/Kota yang menerapkan " Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS "			100	100	100	100	100	250,0	250,0	-	-	-	APBD/APBN	Subbid Yankes Rujukan
	Prosentase Puskesmas Perawatan yang menerapkan " Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di RS"			100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	-	-	APBD/APBN	Subbid Yankes Dasar
Sub kegiatan 3j. Pemenuhan kecukupan obat dan alat di puskesmas perawatan dan RS Kab/Kota sesuai dengan Buku Saku	Prosentase RS Kab/Kota yang memenuhi kecukupan obat dan alat sesuai dengan " Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di			75	100	100	100	100	10.000,0	12.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	APBD/APBN	Subbid Yankes Rujukan
Sub kegiatan 3k. Pemenuhan kecukupan tenaga dokter spesialis anak di RS Kab/Kota	Prosentase RS Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis anak minimal 1 orang			100	100	100	100							APBD/APBN	Subbid Yankes Rujukan
Sub kegiatan 3l. Pelaksanaan PWS KIA di puskesmas	Prosentase Puskesmas menggunakan kecukupan kohort bayi dan kohort anak balita.			50	70	80	100	100	25	150	124	248	25	APBD/APBN	Subbid Kesga

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 3m. Pelaksanaan sistem rujukan secara berjenjang	Prosentase RS kab/kota yang melaksanakan sistim rujukan (protap/pedoman/ SOP dan instrumen) sesuai dengan standar			100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	APBD/APBN	Subbid Yankes Rujukan
	Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistim rujukan (protap/pedoman/ SOP dan instrumen) sesuai dengan standar			50	70	90	100	100	150	150	150	150	100	APBD/APBN	Subbid Yankes Dasar
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah															
Kajian Prilaku Sosial di Pedesaan dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak	Research Design Kajian Prilaku Sosial di Pedesaaan dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak								100						BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI BANTEN
	Kajian prilaku Sosial di Pedesaan dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak								100						BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI BANTEN
Peningkatan Sarana dan Prasarana kesehatan															
Pembangunan dan Peningkatan PUSKESMAS dan Jaringannya di Wilayah Perbatasan	Pembangunan/Pengembangan PUSKESMAS & POSKESDES di Wialyah Perbatasan								26755,4						DINKES PROVINSI BANTEN

MATRIK RAD MDGs PROVINSI BANTEN 2011-2015



Tujuan 5 . MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015															
Indikator MDGs	**5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup** **5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih dalam kurun waktu 1990-2015**														
NASIONAL															
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak															
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)	86	88	89	90	-			490,0	520,0	537,0	547,0	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)	88	90	93	95	-									
	3. Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	40	75	90	100	-									
	4. Presentase Puskesmas rawat inap yang mamppu melaksanakan Pelayanan Obstertrik Neonatal emergensi dasar (PONED)	70													
	5. Presentase RS kabupaten/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi komprehensif (PONEK)	85													
PROVINSI BANTEN															
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerja Gerakan Sayang Ibu (GSI)		1 Keg		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		70	70	70	70	APBD	BPPMD
	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)														
	Penilaian GSI														
	Pembentukan POKJATAP GSI		1 Keg		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		70	70	70	70	APBD	
	Rakor TKP3									100	100	120	120		
	Rakor POKJATAP GSI		1 Keg		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg						APBD	
			1 Keg							60	60	60	60		
			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	60	80	80	80	80	APBD	
				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	70					APBD	
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Pembinaan P2WKSS	12 Lokasi	15 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	350	350	350	350	350	APBD	BPPMD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan															

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Kegiatan Pengembangan Forum Kader Posyandu dan Pengembangan Model Posyandu Asuhan Dini Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (ADITUKA)	Pelatihan Kader Posyandu	150 Orang	300 Orang	80 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	580	160	580	580	580	APBD	BPPMD
	Berkembangnya Model Posyandu ADITUKA		100 Orang	80 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	120	100	120	120	120	APBD	
Program Revitalisasi Keluarga Berencana															
Kegiatan Fasilitasi Keluarga Berencana	Pembinaan Koordinator PPKBD		150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150	150	150	150	150	APBD	BPPMD
Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak															
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	1. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih			86	88	89	90	95	490,0	520,0	537,0	547,0	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal			88	90	93	95	95							
	3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan			40	75	90	100	-							
	4. Presentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan			70	80	90	100	100							
	5. Presentase RS kabupaten/ kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik			70	80	90	100	100							
DAERAH															
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)			81	83	85	92		28.562	66.961	69.262	29.624	50.633		
Sub kegiatan 1.a ; Pelatihan APN dan Evaluasi Pasca Latih	Jumlah Bidan yang dilatih APN			40	50	60	70	75	450	450	450	450	450	APBD/APBN	Subbid Kesga

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 1.b ; Kunjungan rumah untuk meningkatkan cakupan ibu nifas	Jumlah ibu nifas yang dikunjungi			85	87	89	91	93	451	451	451	451	451	APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 1.c ; Advokasi pembentukan Rumah Tunggu bagi bumil risti dan seluruh bumil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas kesehatan di Kabupaten	Jumlah pertemuan advokasi pembentukan Rumah Tunggu bagi Bumil Risti dan seluruh bumil di daerah geografis sulit tanpa fasilitas kesehatan di kabupaten			100	100	100	100	100	558	558	558	558	558	APBD	Subbid Kesga
Sub kegiatan 1.d ; Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan Bidan	Jumlah Dukun yang bermitra dengan Bidan			70	72	75	77	78	-	70,0	70,0	70,0	70	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 1.e. Penyediaan fasilitas pertolongan persalinan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mempunyai ruang bersalin dan peralatan.			35	50	70	90	100	20.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0	40.000,0	APBD/APBN	Subbid Yankes Dasar
Sub kegiatan 1f. Fasilitasi Pembuatan SK Bupati Walikota/ Perda Persalinan, rumah tunggu dan	Jumlah SK Bupati Walikota/Perda tentang Persalinan, Rumah tunggu dan PONED			12,5	25	50	62,5	100	144	288	340	144	340	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 1.g. Kampanye KIE persalinan di fasilitas kesehatan dan kesiapan menghadapi komplikasi persalinan	Jumlah kampanye KIE persalinan di fasilitas yang dilakukan			100	100	100	100	100	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	APBD/APBN	Subbid Promkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 1.h. Orientasi Bikor dalam melaksanakan Supervisi Fasilitatif	Jumlah Bidan koordinator yang melaksanakan Supervisi Fasilitatif			50	60	70	80	85	1.277	250	250	250	125	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 1.i. Pembinaan Puskesmas dalam pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) termasuk	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PWS			25	40	50	60	70	2.682	894	1.043	1.341	1.639	APBD/APBN	Subbid Kesga
Kegiatan 1 : Pembinaan	2. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal			83	84	86	87	88	1.328	2.453	2.628	1.603	1.658	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 2.a; Pembinaan Puskesmas dalam pemanfaatan Buku KIA	Jumlah Puskesmas yang dibina dalam pemanfaatan buku KIA			100	100	100	100	100	103	103	103	103	103	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 2.b ; Pendataan Ibu Hamil	Jumlah desa yang melaksanakan pendataan Ibu Hamil			100	100	100	100	100	0	125	175	225	280		Subbid Kesga
Sub kegiatan 2.c. Pengadaan Paket Kelas Ibu untuk Puskesmas	Jumlah Paket kelas ibu yang diadakan			100	100	100	100	100	0	575	575	575	575	APBD	Subbid Kesga
Sub kegiatan 2.d. Orientasi pembentukan kelas Ibu di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu			50	70	80	100	100	50	225	350	400	400	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 2.e. Orientasi ANC terpadu bagi puskesmas PONED	Jumlah Puskesmas PONED yang melaksanakan ANC terpadu			13,5	30,5	50,5	70,5	100	0	100	100	100	100	APBD/APBN	Subbid Yandas
Sub kegiatan 2.f. Fasilitasi perencanaan terpadu kab/kota dalam pecepatan penurunan angka kematian ibu yang responsif gender	Provinsi : Jumlah kab/kota yang melaksanakan DTPS			100	100	100	100	100	50	200	200	200	200	APBD/APBN	Subbid Kesga

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 2.g; Pembentukan mobile team untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu di DTPK	Provinsi : Jumlah kabupaten DTPK yang mempunyai mobile tim			100	100	100	100	100	1125	1125	1125	0	0	APBD/APBN	Subbid Yandas
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	3. Persentase cakupan peserta KB aktif (Contraceptive prevalence Rate = CPR)			57,1	58,6	60,1	61,6	63	6050	2380	2380	2380			
Sub kegiatan 3.a ; Penyediaan Kit pelayanan KB di faskes dasar yang memberikan	Jumlah Faskes dasar yang mendapat Kit Pelayanan KB			100	100	100	100	100	1500	1500	1500	1500	1500	APBD	Subbid Kesga
Sub kegiatan 3.b ; *Update* (pemutakhiran) keterampilan pelayanan KB bagi Dokter dan Bidan di tingkat pelayanan	Jumlah dokter dan bidan yang telah mengikuti update ketrampilan pelayanan KB			60	70	80	90	100	2800	480	480	480	480	APBD/APBN /BKKBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 3.c ; Orientasi ABPK bagi Bidan Pustu/Poskesdes	Jumlah bidan Pustu/Poskesdes yang telah mengikuti orientasi ABPK			50	60	70	80	90	1750	400	400	400	400	APBD/APBN /BKKBN	Subbid Kesga
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	4. Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan alokon (Unmet need)			5,7	5,6	5,5	4,9	4,8	400	350	350	350	350		Subbid Kesga
Sub kegiatan 4.a. Orientasi Pelayanan KB pasca persalinan	Jumlah Puskesmas yang mengikuti orientasi pelayanan KB pasca persalinan			100	100	100	100	100	400	200	200	200	200	APBD/APBN /BKKBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 4.b. Pengadaan buffer stock alokon di tingkat Provinsi	Jumlah alokon buffer stock yang diadakan di Propinsi			20											Subbid Farmasi

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 4.c. Sweeping pelayanan KB bagi kab/kota dengan unmet need tinggi.	Jumlah sweeping pelayanan KB yang dilaksanakan di Kab/Kota			100	100	100	100	100	-	150	150	150	150	APBD/APBN /bok	Subbid Kesga
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	5. Tingkat kelahiran pada remaja							7,5%	575	575	575	575	575		
Sub Kegiatan 5.a Orientasi/pelatihan fasilitas pelayanan yang ramah remaja bagi Puskesmas di Kab/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKPR			100	100	100	100	100	400	400	400	400	400	APBD/APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 5.b Pembinaan di sekolah lanjutan oleh puskesmas	Cakupan sekolah menengah atas/MA/ sederajat yang mendapat informasi kesehatan reproduksi			40	50	60	70	75	175	175	175	175	175	APBD/APBN	Subbid Kesga
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	6. Presentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED)			60%	80%	100%	100%	100%	400	4.580	4.580	4.580	4.580		
Sub kegiatan 6.a; Pelatihan PONED termasuk evaluasi pasca latih bagi tim PONED di	Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dilatih PONED			100	100	100	100	100	-	400	400	400	400	APBD	Subbid Yandas
Sub kegiatan 6.b. Pelatihan pelayanan pasca keguguran untuk tim PONED	Jumlah Puskesmas PONED yang dilatih Pelayanan Pasca Keguguran (Post Abortion Care)			100	100	100	100	100	-					APBD	Subbid Yandas
Sub kegiatan 6.c ; Penyediaan sarana & prasarana untuk PONED , KB, Pelayanan pasca keguguran	Jumlah Puskesmas PONED yang memiliki sarana dan prasarana untuk PONED, KB dan pelayanan pasca keguguran			100	100	100	100	100	-	1080	1080	1080	1080	APBD/APBN	Subbid Yandas

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 6.d. Penyediaan Ambulans PONED untuk mendukung rujukan PONED	Jumlah Puskesmas PONED yang memiliki ambulans PONED			100	100	100	100	100	-	2400	2400	2400	2400	APBD/APBN	Subbid Yandas
Sub kegiatan 6.f Orientasi PKRE terpadu di Puskesmas PONED	Jumlah Puskesmas PONED yang mampu memberikan PKRE terpadu			10	20	30	50	60	-	100	100	100	100	APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 6.g; Orientasi PP-KtP terpadu di Puskesmas PONED	Jumlah Puskesmas PONED yang mampu tatalaksana PP-KtP			10	20	30	50	60	-	100	100	100	100	APBN	Subbid Kesga
Sub kegiatan 6.h. Orientasi Surveilans kematian ibu dan AMP bagi tim AMP di kab/kota	Jumlah AMP termasuk surveilans kematian ibu yang dilaksanakan			100	100	100	100	100	400	400	400	400	400	BOK	Subbid Kesga
Sub kegiatan 6.i. Pengolahan data kematian ibu di kab/kota	Jumlah rekapitulasi data kematian ibu			100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	APBD/APBN	Subbid Kesga
Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	7. Presentase RS kabupaten/ kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)			85%	90%	95%	100%	100%	60	2.740	2.850	2.930	3.010		
Sub kegiatan 7.a; Bintek Tim PONEK RS di Kab/Kota	Jumlah RS yang melaksanakan PONEK sesuai standar			45%	60%	75%	90%	100%	-	100	100	100	100	APBD	Subbid Yankes Rujukan
Sub kegiatan 7.b. Evaluasi pasca pelatihan tim PONEK RS (On the Job Training)	Jumlah RS yang melaksanakan PONEK sesuai standar			20%	40%	60%	80%	100%	60	80	100	120	140	APBD	Subbid Yankes Rujukan
Sub kegiatan 7.c ; Pembinaan 4 Puskesmas oleh Tim PONEK RS (minimal 4 kali setahun per RS)	Jumlah kunjungan pembinaan Tim PONEK RS ke Pkm PONED			20%	40%	60%	80%	100%	-	120	150	170	190	APBD	Subbid Yankes Rujukan
Sub kegiatan 7.d. Pelatihan klinis pelayanan KB di RS kab/kota	Jumlah RS yang dilatih klinis pelayanan KB sesuai standar.			100%	100%	100%	100%	100%	-	200	200	200	200	APBD	Subbid Yankes Rujukan

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 7.e. Pembinaan RS dan klinik swasta oleh RS PONEK (RS dan klinik yang ada di sekitar PONEK)	Jumlah kunjungan pembinaan tim PONEK			100%	100%	100%	100%	100%	-	100	120	140	160	APBD	Subbid Yankes Rujukan
Sub kegiatan 7.f; Pemenuhan standar sarana dan peralatan RS PONEK di kab/kota	Jumlah RS PONEK di kab/kota yang memiliki sarana dan peralatan sesuai standar.			20%	40%	60%	80%	100%	-	2000	2000	2000	2000	APBD	Subbid Yankes Rujukan
Sub kegiatan 7.g; Pembuatan SK Tim PONEK Kab/kota	Jumlah RS yang sudah memiliki SK Tim PONEK RS			85%	90%	95%	100%	100%	-	60	80	100	120	APBD	Subbid Yankes Rujukan
Sub kegiatan 7.h. Regional sistem rujukan maternal neonatal di kab/kota	Jumlah kab/kota yang melaksanakan regionalisasi sistem rujukan maternal neonatal			20%	40%	60%	80%	100%	-	80	100	100	100	APBD	Subbid Yankes Rujukan
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu - Anak dan Revitalisasi Keluarga Berencana															Dinkes
(1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu,Anak dan Revitalisasi KB	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak								0						Dinkes
	- Evaluasi dan Koordinasi Program kesehatan keluarga			1 Dokumen					34.8						Dinkes
	- Pemantapan Implementasi Kohort ibu, bayi, balita dan KB			1 kegiatan					35.7						Dinkes
	- Koordinasi dan sinkronisasi dalam Pencapaian indikator MDGs			1 kegiatan					39.0						Dinkes
	- Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional			1 kegiatan					179.3						Dinkes
	- Penunjang Program dan Kegiatan Kesehatan KIA			1 tahun					1.7						Dinkes
	- Bimtek dan Konsultasi Program Kesehatan keluarga			1 kegiatan					37.4						Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	- Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan keluarga			1 paket (ANC KIT, USILA KIT, UKS KIT, Buku KIA dan Stiker P4K, Kohort Ibu, Bayi dan Balita)					3160.3						Dinkes

MATRIK RAD MDGs PROVINSI BANTEN 2011-2015

Tujuan 6 . **MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT YANG MENULAR LAINNYA**

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 per hari dalam kurun waktu 1990-2015															
Indikator MDGs	**6.1 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi** **6.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir** **6.3 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS** **- Menikah** **- Menikah**														
NASIONAL															
Program 1 ; Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan															
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Prevalensi kasus HIV			<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	-	265	293,0	289,0	307,0	-	APBN	Kemenkes
	2. Persentase penduduk 15 tahun ke atas memiliki pengetahuan tentang HIV dan AIDS			75	85	90	95	-							
	3. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV			400,000	500,000	600,000	700,000	-							
	4. Persentase kabupaten /kota yang melaksanakan pencegahan dan penularan HIV sesuai pedoman			60	70	80	100	-							
	5. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)			35 (Perempuan 20 (laki-Laki)	45 (Perempuan 30 (Laki-Laki)	55 (Perempuan 40 (Laki-Laki)	65 (Perempuan 50 (Laki-Laki)	-							
PROVINSI BANTEN															
Program Pendidikan Dasar 9 tahun Pendidikan Menengah															
Peningkatan Mutu Akses dan Tata Kelola SMA	Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS		**80 siswa**	**160 siswa**	**160 siswa**	**160 siswa**	**160 siswa**	**160 siswa**	**114.26**	**250.26**	**250.26**	**250.26**	**250.26**	**APBD**	**Dindik**
Pendidikan Tinggi/Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	Bintek Penanggulangan HIV-AIDS dikalangan Mahasiswa									**180**	**180**	**180**	**180**	**APBD**	**Dindik**
Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan Hidup / Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana BPPNF	Sosialisasi Pencegahan Sejak Dini HIV/AIDS bagi PTKPNF se-Provinsi Banten Tahun 2012									**275**	**275**	**275**	**275**	**APBD**	**Dindik**
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam pencegahan HIV/AIDS		100 Orang	800 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	250	300	300	300	300	APBD	BPPMD

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	KIE terkait issue perlindungan perempuan dan tindak kekerasan dan penyebaran HIV AIDS			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	50	50	50	50	50		
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan															
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Prevalensi kasus HIV			<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	-	265	293,0	298,0	307,0	-	APBN	Dinkes
	2. Persentase penduduk 15 - 24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS			75	85	90	95	-							Dinkes
	3. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan test HIV			400.000	500.000	600.000	700.000	800.000							Dinkes
	4. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman			60	70	80	100	100							Dinkes
	5. Persentase Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)			35 (Perempuan) 20 (Laki-laki)	45 (Perempuan) 30 (Laki-laki)	55 (Perempuan) 40 (Laki-laki)	65 (Perempuan) 50 (Laki-laki)	-							STBP & STHP : Kemernkes SCP : KPAN
Sub kegiatan 1e. Pelatihan pengurangan dampak buruk (harm reduction) bagi petugas di sarana kesehatan	Jumlah orang yang dilatih program pengurangan dampak buruk (HR)	25	36	25	11	0	0	0	0	100	0	0	0	GF- AIDS / HCPI	Dinkes
Dukungan sarana dan operasional untuk program pengurangan dampak buruk (HR)	Jumlah kegiatan dalam Program pengurangan dampak buruk (HR) yang mempunyai sarana dan operasional di suatu Kab/Kota	16	36	16	20	0	0	0	250	500	700	800	900	APBN/APBD /BLN	Dinkes
Layanan kesehatan yang melakukan layanan PTRM	Jumlah layanan yg melakukan program PTRM	6	9	8	1	0	0	0	200	223	200	200	200	APBN/APBD / GF AIDS	Dinkes
Pelatihan petugas pelaksana kegiatan PMTCT di sarana kesehatan	Jumlah petugas yang dilatih PMTCT di suatu kab/kota	8	32	8	16	8	0	0	0	100	50	0	0	APBN/APBD/ GF AIDS	Dinkes
Dukungan sarana dan operasional untuk pembentukan layanan PMTCT	Jumlah layanan PMTCT yang mempunyai sarana dan operasional	1	8	1	2	2	2	1	36	108	180	252	288	APBN/APBD/ GF AIDS	Dinkes
Program : pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat															
Kegiatan 1 : Fasilitasi BNP Banten	1. Penyuluhan P4GN bagi ORMAS,LSM dan Elemen Masyarakat	0	0	60 ormas	70 ormas	70 ormas	70 ormas	70 ormas	75	80	80	85	85	APBD	Kesbangpol
	2. Penyuluhan P4GN bagi Wanita (Gender)		50 orang	120 orang	100 orang	75 orang	75 orang	75 orang	135	120	120	120	120	APBD	Kesbangpol
	3. Operasi Penegakkan Hukum Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba		10 kali	8kali	0	0	0	0	38	0	0	0	0	APBD	Kesbangpol
	4. Pemeriksaan Urine di Kab.dan Kota	2.240 orang	2.000 orang	1.200 orang	750 orang	600 orang	600 orang	600 orang	133	100	80	80	80	APBD	Kesbangpol

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	5. Penyuluhan P4GN bagi Pelajar/Mahasiswa di Kab. dan Kota	350 orang	400 orang	400 orang	600 orang	600 orang	600 orang	600 orang	172	250	250	250	250	APBD	Kesbangpol
Program 1 : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan															
Kegiatan 1 : Pembinaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	1. Fasilitasi peserta BPAP	40	24	24	24	24	24	24	62,2	75	75	75	75	APBD	Dispora Provinsi Banten
	2. Fasilitasi Peserta PPAN	3	3	3	3	3	3	3	82	85	85	85	85		
	3. Fasilitasi Peserta KPN	2	2	2	2	2	2	2	69,2	70	70	70	70		
	4. Fasilitasi Pemuda Pelopor	5	5	5	5	5	5	5	66,3	70	70	70	70		
Kegiatan 2 : Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda	1. Fasilitasi Kegiatan Paskibraka	102	102	102	102	102	102	102	553	650	650	650	650	APBD	Dispora Provinsi Banten
Pembinaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Tersosialisasikannya Penanggulangan Bahaya HIV/AIDS bagi Pemuda									100	100	100	100	APBD	Dispora Provinsi Banten
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial															
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial dan Eks Napza	Bimbingan Teknis Pelatihan Keterampilan bagi Penderita ODHA dan HIV/AIDS; Pemberian Bantuan Peningkatan Gizi Bagi Penderita ODHA									550					Dinas Sosial
Program Peningkatan kapasitas lembaga Pemerintah Daerah															
Penyusunan kebijakan Kesehatan	Rakor Penanggulangan HIV/AIDS tk.Provinsi Banten Tahun 2012									450					Biro Kesra
Perencanaan Pembangunan Daerah															
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial, dan PP-AP	Penyusunan Perencanaan Pembangunan KHPPIA									225,7					Bappeda

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010															
Indikator MDGs	**6.4 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral**														
Nasional															
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan															
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART)			75	80	85	90	-	265	293,0	298,0	307,0	-	APBN	Kemenkes
Program 2 : Pembinaan Upaya Kesehatan															
Kegiatan 1 : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	1. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)			70	80	90	100	-	79	80,0	94,0	106,0	-	APBN	Kemenkes
PROVINSI BANTEN															
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan															
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan *Anti Retroviral Treatment* (ART)			75	80	85	90	90	265	293	298	307	-	APBN	Dinkes
DAERAH															
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1. Presentase ODHA yang mendapatkan pengobatan *Anti Retroviral Treatment* (ART)		83	75	80	85	90	90	941	5575	5475	3475	2275	APBN	Dinkes
Sub kegiatan 1a. Pelatihan Tim CST bagi petugas di sarana kesehatan	Jumlah sarana kesehatan yang dilatih untuk melakukan pengobatan ARV	6	8	10	16	18	20	0	0	100	0	0	0	APBN / APBD / GF - AIDS	Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 1b. Dukungan sarana dan operasional operasional untuk pembentukan layanan CST	Jumlah layanan pengobatan ARV yang mempunyai sarana dan operasional	4	6	7	8	9	10	10	940	1075	1075	1075	1075	APBN / APBD / GF - AIDS	Dinkes
Sub kegiatan 1c. Pemeriksaan CD4	Jumlah Kab-Kota yang mampu akses untuk pemeriksaan CD4	1	8	1	2	2	2	1	0	2400	2400	2400	1200	APBN / APBD / GF - AIDS	Dinkes
Sub kegiatan 1e. Pemeriksaan Viral Load	Jumlah propinsi yang mampu akses untuk pemeriksaan Viral Load	0	0	0	1	1	1	1	1	2.000	2.000	0	0	APBN/APBD / GF - AIDS	Dinkes
Nasional															
Program 2 : Pembinaan Upaya Kesehatan															
Kegiatan 1 : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	1. Persentase RS Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	RS pemerintah yang sudah dilatih perawatan dukungan dan pengobatan (PDP) untuk ODHA	Jumlah RS pemerintah di Indonesia	70	80	90	100	100	79	80	94	106	-	APBN	Dinkes
DAERAH															
	1. Persentase RS Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	4	8	62,5	75	87,5	100	100	0	15	15	15			Dinkes
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Pelaksanaan Zero Survey									25	50	60	75	85	Dinkes
	Pemeriksaan specimen HIV/AIDS									50	25	25	30	40	Dinkes
	Pelatihan VCT									70	70	75	85	95	Dinkes
	Pelatihan CST									75	63	75	85	95	Dinkes
	Pelatihan IMS									75	65	75	85	95	Dinkes
	Pelatihan Harm Reduction									75	60	65	70	75	Dinkes
	Pelatihan PITC									75	49	50	55	60	Dinkes
	Pengadaan Reagent CD4									400	600	700	750	800	Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Makanan dan Kefarmasian	Pengadaan Obat Essential, Obat Program dan Perbekalan Kesehatan									500	700	800	850	900	Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015															
Indikator MDGs	**6.5 Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria** **6.6 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida** **6.7 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat** **6.8 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis** **6.9 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS** **6.9a Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS** **6.9b Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**														
NASIONAL															
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan															
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit menular Langsung	1. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk			231	228	226	224	-	265,0	293,0	298,0	307,0	-	APBN	Kemenkes
	2. Persentase kausu baru TB Paru (BTApositif) yang ditemukan			75	80	85	90	-							
	3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan			86	87	87	88	-							
Kegiatan 2 : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk			1,75	1,5	1,25	1	-	177,4	297,0	303,0	311,0	-	APBN	Kemenkes
PROVINSI BANTEN															
Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit menular Langsung	1. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk			231	228	226	224	-						APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1a. Advokasi Pengendalian Penyakit TB melalui Gerdunas/ wadah koordinasi lain yang sudah ada	Indikator: 1) Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kegiatan advokasi pengendalian TB melalui Gerdunas/wadah lain yang ada minimal 2 kali setahun, 2) Persentase Kab/Kota/Prov. yang menyediakan dana pengendalian TB	4Kab/kt	8Kab/kt	50,00	100,00	100,00	100	100	0,0	160	170			APBD	Dinkes
Sub kegiatan1b. Monitoring dan surveilens penyakit	Indikator: Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pertemuan monev dan atau validasi data setiap 6 bulan	8Kab/kt	8Kab/kt	100	100	100	100	100	640	350	350			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1c. Terlaksananya diagnostik TB anak dengan tuberkulin test	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan diagnostik TB anak dengan tuberkulin tes	59	274	21	100	100	100	100	-	120	132			APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Kegiatan 2 :	2. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	75	80	85	90	-								APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan layanan TB DOTS	Indikator: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan melaksanakan layanan DOTS.	222	274	81	85	90	95	100	-	300	315			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2 b. Pelatihan pengelola Program TB (wasor) kab/ kota	Indikator: Persentase pengelola Program TB (wasor) Kab/ Kota yang sudah dilatih Program TB	8Kab/kt	8Kab/kt	100	100	100	100	100	28	29	30			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2c. Pelatihan Teknis Pelayanan TB di RS dengan Strategi DOTS	Indikator : Persentasi Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki tim DOTS terlatih	4	7	60	80	80	80	80	-	40	45			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2d. Pelaksanaan pengendalian infeksi di RS dalam implementasi DOTS.	Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Pengendalian infeksi airborne dalam implementasi DOTS	30	59	50	70	80	90	100	-	200	220			APBD	Dinkes
	Persentase laboratorium RS yang melaksanakan pengendalian infeksi TB dalam pemeriksaan kultur	29	59	50	70	80	90	100	-	100	100			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2e. Advokasi manajemen Rumah Sakit untuk membangun komitmen dalam strategi DOTS melalui Lokakarya pelayanan TB oleh Tim DOTS RS	Indikator: Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki SK Direktur tentang pembentukan Tim DOTS.	7	7	100	100	100	100	100	-	50	55			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan TB sesuai standar	Indikator: Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota yang memiliki sarana yang dapat memberi Pelayanan TB dengan strategi DOTS	7	7	100	100	100	100	100	-	350	360			APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 2g. Penyediaan Obat TB dengan Strategi DOTS	Indikator: Persentase Rumah Sakit Pemerintah kab/kota yang yang memiliki formularium obat TB sesuai paduan standar pengobatan TB strategi DOTS	7	7	100	100	100	100	100	-	300	350			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2h. Pertemuan jejaring internal dan eksternal RS dalam implementasi strategi DOTS	Indikator: Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kab/ Kota yang melaksanakan pertemuan jejaring internal dan eksternal masing-masing minimal 2 kali setahun	4	7	60	100	100	100	100	41	42	45			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2i. Pelatihan Pengawas Minum Obat (PMO) dalam rangka memantau Kepatuhan Pasien TB	Persentase PMO terlatih diantara seluruh pasien TB yang ditemukan	6.000	6.000	100	100	100	100	100	-	50	55			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2j. Pelatihan Petugas Kesehatan di Lapas/rutan dalam pelayanan TB DOTS	Indikator : Persentase Rutan/Lapas yang memiliki tim DOTS terlatih	7	11	60	80	80	80	80	-	15	20			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2k. Pelatihan tenaga laboratorium dalam meningkatkan kualitas diagnostik TB	Indikator: Presentase tenaga Lab yang dilatih dan mengirimkan slide untuk dilakukan cross check secara teratur setiap triwulan di seluruh laboratorium TB (PPM dan PRM)	200	200	100	100	100	100	100	-	75	80			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 2l. Ketersediaan mikroskop dan bahan laboratorium yang sesuai standard (reagen, pot sputum, slide, box slide) untuk pemeriksaan sputum	Indikator: 1) Persentase Puskesmas Rujukan Mikroskop/Puskesmas Pelaksana Mandiri/Lab RS yang memiliki mikroskop standar dan berfungsi baik	200	200	100	100	100	100	100	-	400	420			APBD	Dinkes
	2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang DOTS memiliki bahan Lab sesuai dengan fungsinya dalam jumlah yang cukup	200	200	100	100	100	100	100	-	200	210			APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 2m. Ruang Isolasi untuk pasien TB-HIV dan MDR-TB	Jumlah RS yang memiliki ruang isolasi untuk TB-HIV	6	8	-	1	1	2	2	-	1200	1200			APBD	Dinkes
	Jumlah RS yang memiliki ruang isolasi untuk MDR-TB	6	8	-	1	1	2	2	-	1200	1200			APBD	Dinkes
Kegiatan 3 :	3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan			93	95	100	100	100		50	53			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 3a. Penyediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) sesuai standard	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan DOTS yang memiliki stok OAT			100	100	100	100	100	655	687	722			APBD	Dinkes
Sub kegiatan 3b. Promosi kesehatan tentang TB	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang memiliki media KIE untuk program TB			100	100	100	100	100	-	200	220			APBD	Dinkes
Kegiatan 2 : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk		0	1,75	1,5	1,25	1	-	177	297	303	311	-	APBN	Kementerian Kesehatan
DAERAH															
Kegiatan 2 : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk			0,49	0,50	0,40	0,30	0,20						APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1a. Kampanye Pembagian Kelambu Massal daerah endemis malaria tinggi	Provinsi : Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Pembagian Kelambu Massal di daerah endemis malaria tinggi	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	1	2	-	-	-	100	400	-	-	-	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1b. Pengadaan Kelambu berinsektisida di kab/kota endemis malaria	Jumlah pengadaaan/pembelian Kelambu berinsektisida	2500	356801	200	2500	2500	2500	2500	100	1250	1250	1250	1250	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1c. Pembagian kelambu berinsektisida ibu hamil dan bayi	Jumlah pembagian Kelambu kepada Ibu Hamil dan Bayi	1566	356801	200	1566	1566	1566	1566	100	783000	1783000	783000	783000	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1d. Pengambilan darah massal (sero survey) (MBS, MFS, MSE, TMC, dll)	Jumlah pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah (SD Diperiksa)	3714	250	356801	250	350	400	400	50	200	250	250	300	APBN / APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 1e. Pengadaan Rapid diagnostic test (RDT) (terutama untuk Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan)	Jumlah pembelian RDT malaria (rapid diagnostik test/alat diagnostik cepat)	4350	3714 (Jumlah Klinis)	1175	142720	142720	142720	142720	350	4,251E+10	297872	800	800	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1f. Pengobatan (MBS, MFS, MSE, TMC, dll)	Jumlah pengobatan dengan ACT (Arthemisinine based Combination Therapy)	436	436 (Penderita Positif)	240	358	450	450	470	200	378	500	500	550	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1g. Penyemprotan rumah pd desa dengan malaria tinggi	Jumlah rumah yang dilakukan penyemprotan dengan insektisida (indoor resdiual spraying)		20 (Daerah Endemis)	170	250	350	450	500	1500	2700	3500	3780	4000	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1h. Pengadaan insektisida	Jumlah pengadaan/pembelian insektisida.	20 drum (@ 200 lt)	4000 ltr	50	140	155	185	250	0	700	930	1000	1500	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1i. Pengadaan alat semprot (spraycan) dan perlengkapan alat penyemprot	Jumlah pengadaan/pembelian alat semprot (spraycan)	20 Unit (@ untuk 1 daerah endemis)	25 Unit (5 unit Buferstok)	50	200	200	200	200	0	100	100	100	100	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1j. Pelatihan tenaga mikroskopist malaria	Jumlah mikroskopist malaria dilatih	6 (1 Kab/Kota = 2 org)	6 (1 Kab/Kota = 2 org)	-	15	15	15	15	0	100	100	100	100	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1k.Pelatihan medis dan paramedis dalam tatalaksana kasus malaria	Jumlah tenaga dokter dan paramedis yang dilatih dalam manajemen tatalaksana kasus malaria	6 (1 Kab/Kota = 2 org)	6 (1 Kab/Kota = 2 org)	-	40	40	40	40	0	250	250	250	250	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1l. Pelatihan pengelola malaria dalam manajemen program malaria	Jumlah tenaga pengelola malaria yg dilatih	23 (20 org PKM, 3 org Dinkes Kab /Kota)	23	-	23	23	23	23	0	100	100	100	100	APBN / APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1m. Pengembangan model intervensi lintas sektor (seperti Larvaciding, biological control/penebaran ikan pemakan jentik, source reduction, dll)	Provinsi: Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan intervensi vector control dan pengembangan model pengendalian malaria.	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	-	8	8	8	8		75	75	75	75	APBN / APBD	Dinkes
1. Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat															
(1) Pelayanan Kesehatan Bagi keluarga Miskin	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin								6.037						Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan Kesehatan Bagi Gakin			6 Kali					62.8						Dinkes
	Bantuan Operasi katarak Bagi Gakin			400 Gakin					372.6						Dinkes
	Bantua Operasi Bibir Sumbing Bagi Gakin			60 Gakin					240.1						Dinkes
	Bantuan Khitanan Masal Bagi gakin			400 Gakin					195.1						Dinkes
	Pengobatan Bagi gakin			1.535 Desa se Provinsi Banten					4985.1						Dinkes
	Monitoring dan Evaluasi Pengobatan Bagi Gakin			1 Keg					123.2						Dinkes
	Monitoring dan Evaluasi Jamkesda			1 Keg					18.3						Dinkes
	Rapat Koordinasi dan evaluasi program Jamkesda			3 Kali					40.0						Dinkes
(2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat								0						Dinkes
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar			25 orang					36.2						Dinkes
	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar			3 orang					24.8						Dinkes
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan															Dinkes
(1) Pembangunan dan Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya di Wilayah Perbatasan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya								0						Dinkes
	Pembangunan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan			12 unit					24965.9						Dinkes
	Pembangunan Poskesdes			8 unit					1789.5						Dinkes
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit															Dinkes
(1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Tertanggulanginya penyakit menular								0						Dinkes
	Pelatihan tatalaksana ISPA			1 x (24 orang)					71.3						Dinkes
	Rapat koordinasi dan evaluasi program ISPA			1 x (24 orang)					53.5						Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	Bintek dan Supervisi program ISPA dan Diare			3 x (2 orang)					18.7						Dinkes
	Konsultasi ke Pusat P2 ISPA dan Diare			2 x (2 orang)					3.4						Dinkes
	Rapat koordinasi dan evaluasi program Kusta			1 x (24 orang)					51.6						Dinkes
	Bintek dan Supervisi program Kusta			3 x (2 orang)					18.7						Dinkes
	Konsultasi ke pusat P2 Kusta			2 x (2 orang)					3.4						Dinkes
	Bintek TB Remote Area District			2 x (2 orang)					27.9						Dinkes
	Pertemuan Koordinasi TB			1 x (16 orang)					40.6						Dinkes
	Pelatihan tatalaksana Diare			1 x (24 orang)					71.2						Dinkes
	Zero Survey HIV AIDS			1 paket					25.0						Dinkes
	Pemeriksaan specimen HIV AIDS			1 paket					50.0						Dinkes
	Pelatihan VCT			1 x (24 orang)					80.5						Dinkes
	Penyediaan bahan Laboratorium TB			1 Paket					655.0						Dinkes
	Penyediaan bahan-bahan Penunjang Diare			1 Paket					422.2						Dinkes
	Penyediaan alat-alat penunjang HIV AIDS			1 Paket					2128.5						Dinkes
(1) Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (PPBB)	Tertanggulanginya Penyakit Bersumber Binatang								2.500						Dinkes
	Rapat koordinasi penanggulangan DBD, Malaria dan Filariasis			1 kl (32 orang)					40.8						Dinkes
	Pelatihan pengelolaan DBD			1 kl (28 orang)					66.5						Dinkes
	Konsultasi ke pusat P2B2			2 kl (3 orang)					5.1						Dinkes
	Bintek dan supervisi ke kab/kota			2 kl (3 orang)					12.5						Dinkes
	Alat-alat penunjang DBD			1 paket					1.800						Dinkes
	Alat penunjang Malaria			1 paket					450						Dinkes
	Alat penunjang Filariasis			1 paket					250						Dinkes
(2) Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penangulangan Wabah	Meningkatnya Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi														Dinkes
	- Terlaksananya Pelaksanaan Program Surveilans Epidemiologi			1 paket					163.9						Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	- Terlaksananya Pelaksanaan Program Imunisasi			1 paket					1059.7						Dinkes
(3)Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Tertanggulanginya penyakit menular								75,00						Dinkes
	Pelatihan tatalaksana ISPA			1 x (24 orang)					71.3						Dinkes
	Rapat koordinasi dan evaluasi program ISPA			1 x (24 orang)					53.5						Dinkes
	Rapat koordinasi dan evaluasi program Kusta			1 x (24 orang)					51.6						Dinkes
	Pertemuan Koordinasi TB			1 x (16 orang)					40.6						Dinkes
	Pelatihan tatalaksana Diare			1 x (24 orang)					71.2						Dinkes
	Zero Survey HIV AIDS			1 paket					25						Dinkes
	Pemeriksaan specimen HIV AIDS			1 paket					50						Dinkes
	Pelatihan VCT			1 x (24 orang)					80.5						Dinkes
6.Peningkatan Kemitraan Dalam Pelayanan Kesehatan															Dinkes
(1) Peningkatan Promosi dan Surveilance Kesehatan Kerja	Meningkatnya pelayanan kesehatan kerja pada masyarakat pekerja formal dan informal								43						Dinkes
	1. Rapat Evaluasi Survailans Kesehatan Kerja Tk. Provinsi Banten			2 Kali, 20 Orang					43						Dinkes
	4. Penyediaan Alat Pelindung Diri Percontohan			1 Paket					28.6						Dinkes
	5. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Kerja			1 Dokumen					49.2						Dinkes
7. Peningkatan Mutu Sumberdaya Kesehatan															Dinkes
(1) Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatnya Sumber Daya, Sistem Informasi dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat														Dinkes
	1. Penyediaan Data Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Banten			1 Dokumen					72.3						Dinkes
8. Pengembangan Lingkungan Sehat															Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
(1) Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan														Dinkes
	Penyediaan sarana air bersih percontohan di masyarakat			50 Percontohan					1828.7						Dinkes

MATRIK RAD MDGs PROVINSI BANTEN 2011-2015



Tujuan 7 . MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 7A : Memadukan prinsif-prinsif pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang															
Indikator MDGs	**7.1 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan** **7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)** **7.2a Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)** **7.2b Intensitas Energi** **7.2c Elastisitas energi** **7.2d Bauran energi untuk energi terbarukan** **7.3 Jumlah konsusmsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton** **7.4 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman** **7.5 Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan**														
Program Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup															
NASIONAL DAN DAERAH															
Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1.jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim			5	3	3	3	3	24,0	25,0	26,0	26,5		APBN	KLH
	2. %penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO		100%												
	3. Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan infentori GRK & BPO			3	3	6	6	6							
	4. % Penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi bahan perusak Ozon (BPO)-HCFC		100%												
	5. %pengurangan konsumsi bahan perusak Ozon (BPO)-HCFC			1%	2%	3%	10%	10%							

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	6. Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan		3	5	7	9	11	11							
	7. Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim		5	5	10	15	15	15							
	8. Implementasi konsep Program Kampung Iklim			5	5	5	5	5							
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil															
NASIONAL DAN DAERAH															
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi kawasan dan jenis	1. Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha		900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	Meningkat	109,8	151,2	190,2	220,7		APBN	KKP
	2. Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat		9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	Meningkat							
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap															
NASIONA L DAN DAERAH															
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	1. Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI (prov)		6	33	33	33	33	33	53,4	71,4	88,4	103,9		APBN	KKP
	2. Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)		8	8	8	8	8	33							
	3. Jumlah perairan teritorial dan kepulauian yng terridentifikasi sumber dayanya		1 WPP	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov							
	4. Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya (prov)		11	4	4	4	4	Meningkat							
PROVINSI BANTEN															
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam															

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Kegiatan 1 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas rehabilitasi hutan dan lahan terbuka/tidak produktif	22.000 ha	28.370 ha	12.000 ha	13.000 ha	13.000 ha	14.000 ha	15.000 ha	1200	1300	1300	1400	1500	APBD	Dishutbun
Kegiatan 2 Perlindungan dan Pengamanan Hutan .	Terjaganya keutuhan fungsi sumber daya alam baik eksitu maupun insitu	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	500	600	600	800	800	APBD	Dishutbun
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam															
Kegiatan															
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Peningkatan Luas Lahan yang Dikonservasi (Ha)		2,1	1	1				700					APBD	DKP Banten
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam															
Peningkatan serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa Hutan								282,1						BLHD
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air	Pembinaan Masyarakat Pengelola Ekosistem Situ								86,7						BLHD
	Pembinaan Masyarakat Pengelola Ekosistem Pesisir								87,9						
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah															
Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	Bintek Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan								198,2						BLHD
Program Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup															
NASIONAL DAN DAERAH															
Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1.jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim			5	3	3	3	3	24,0	25,0	26,0	26,5		APBN	KLH
	2. %penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO		100%												
	3. Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan infentori GRK & BPO			3	3	6	6	6							

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	4. % Penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi bahan perusak Ozon (BPO)-HCFC		100%												
	5. %pengurangan konsumsi bahan perusak Ozon (BPO)-HCFC			1%	2%	3%	10%	10%							
	6. Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim		3	5	7	9	11	11							
	7. Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim		5	5	10	15	15	15							
	8. Implementasi konsep Program Kampung Iklim			5	5	5	5	5							
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil															
NASIONAL DAN DAERAH															
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi kawasan dan jenis	1. Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha		900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	Meningkat	109,8	151,2	190,2	220,7		APBN	KKP
	2. Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat		9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	9 kawasan dan 3 jenis	Meningkat							
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap															
NASIONAL DAN DAERAH															
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	1. Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI (prov)		6	33	33	33	33	33	53,4	71,4	88,4	103,9		APBN	KKP
	2. Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)		8	8	8	8	8	33							
	3. Jumlah perairan teritorial dan kepulauian yng tyeridentifikasi sumber dayanya		1 WPP	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov	11 WPP 33 prov							

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	4. Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya (prov)		11	4	4	4	4	Meningkat							

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 7 B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010															
Indikator MDGs	7.1 Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan 7.2 Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan Banten														
Program penataan perumahan,pemukiman dan kawasan sentra Produksi	Rasio keterbatasan air bersih dan sanitasi di WKP I,II dan III														
1. Penyedeiaan Prasarana dan sarana Air Bersih	Tersedianya prasarana dan sarana air bersih prioritas penanggulangan kemiskinan bagi daeah pedesaan dan perkotaan di 8 Kab/kota (kegiatan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.139,4	17.977,1	187.559,9	20.602,1	24.000	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
	1. Penyedian Air Bersih Prioritas Penanggulangan Kemiskinan bagi Daerah Pedesaan dan Perkotaan (Unit)														
	-Kabupaten Serang		6,00	20,00		5,00			1.787,6		750,4				
	-Kota Serang		4,00	10,00		5,00			893,4		750,4				
	-Kota Cilegon				10,00					1.801,0					
	-Kabupaten Pandeglang		10,00	15,00		5,00	10,00	10,00	1.348		750,4	1.801,0	2,000		
	-Kabupaten Lebak		10,00	20,00		5,00	10,00	10,00	1.790,7		750,4	1.801,0	2,000		
	-Kabupaten Tangerang				10,00	20,00				1.072,0	3.001,8				
	-Kota Tangerang				10,00	20,00				1.072,0	3.001,8				
	-Kota Tangerang Selatan		10,00	5,00	10,00	5,00			468,5	1.072,0	750,4				
	2. Terbentuknya Pembuatan Sumur bor Produksi bagi masyarakat di kab/kota Provinsi Banten (Ls)														
	-Kabupaten Serang	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	768,5	922,2		1.750,0	2,000		
	-Kota Serang				1,00		1,00	1,00		922,2		1.750,0	2,000		
	-Kabupaten Pandeglang	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		922,2	1.500	1.750,0	2,000		
	-Kabupaten Lebak				1,00	1,00	1,00	1,00		922,2	1.500	1.750,0	2,000		
	3. Terbangunnya bronchapt,reservoir dan perpipaan di Kab/Kota Provinsi Banten														
	- Kabupaten Serang				1,00					500					

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	- Kabupaten Pandeglang	1,00	3,00	2,00	4,00		4,00		774,2	1.500		2,000			
	- Kabupaten Lebak	1,00		4,00	1,00			2,00	1.472,5	500		2,000	1.000		
	- Kota Tangerang Selatan				4,00			2,00		1.500			1.000		
	4. Terbangunnya Pemasangan Pipa Jaringan Transmisi dan Distribusi Air Bersih (Pipa 6,4.3 dan 2) (Ls)	1.500													
	- Kabupaten Serang		1,00	4,00			1,00	1,00	3.839,3			2,000	2,000		
	- Kota Serang			1,00			1,00	1,00	1.016,4				2,000		
	- Kota Cilegon				1,00					2,000	2,000				
	- Kabupaten Pandeglang		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	907,4	2,000	2,000	2,000	2,000		
	- Kabupaten Lebak	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1.072,7		2,000	2,000	2,000		
	- Kabupaten Tangerang				1,00		1,00	1,00		2,000			2,000		
Program Pengembangan Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Air	Rasio Peningkatan Perlindungan sumber-sumber air di WKP I, II dan III														
1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan Bangunan Penampung Air lainnya	Terehabilitasinya embung/situ untuk berbagai keperluan sebagai usaha konservasi air dan sumber air (Ha)	1,00	1.50		5,00	6,00	6,00	8,10		6.000	8.000	8.500	9.000	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
	- Rehabilitasi Bendung Sarakan (keg.)														
	- Rehabilitasi Rawa Arum (17 Ha)				5	6,00	6,00			6.000	8.000	8.500			
	- Rehabilitasi Situ Ciwaka dan bangunan Penunjang (4.5 Ha)	1,00	1.50												
	- Rehabilitasi Situ Ciledug (14.1 Ha)							8,10					9.000		
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan Tanggul Sungai	Meningkatkan kapasitas tampung sungai :	1,22	1,02	1,05	3,00	4,00	4,00	4,00	18.650	1.300	20.300		20.000	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
	a. Kabupaten Lebak														
	- Sudetan Sungai Cibinuangeun 92,9 km)	1,07	1,02	0,22					4.152,7						
	b. Kabupaten Pandeglang														

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	- Normalisasi Sungai Cilemer (42.8)	0,15		0,60	2,00	2,00	2,00		12.500	9.000	9.900	10.890			
	- Normalisasi Sungai Ciliman (55 km)					1,00	1,00	2,00			6.000	6.000	10.000		
	c. Kabupaten /Kota Serang														
	- Normalisasi Sungai Cibanten (32 km)				1,00	1,00	1,00	2,00		4.000	4.400	4.840	10.000		
	d. Kota Tangerang														
	- Normalisasi Sungai Sabi			0,23					1.997,3						
3. Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan infrastruktur Sumber Daya Air di (kegiatan)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	10.666,8	11.332,4	12.465,7	13.712,3	15.083,5	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
	a. Wilayah SungaiCidurian - Cisadane	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.378,7	5.000	55.000	6.050	6.655		
	b. Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.788,0	3.832,4	4.215,7	4.637,3	5.101		
	c. Wialyah sungai Ciujung-Cidanau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.500	2.500	2.750	3.025	3.327,5		
4. Pengendalian banjir pada Daerah tangkapan air dan Badan - Bandan Sungai	Tersedianya data hidrometri,kualitasair dan curah hujan (kegiatan)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2.840,3	3.300	3.630	3.993	4.392,3	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
	a. Wilayah Sungai Cidurian -Cisadane	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000	1.200	1.320	1.452	1.597,2		
	b. Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	650	850	935	1.028,5	1.131,3		
	c. Wialyah sungai Ciujung-Cidanau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.190,3	1.250	1.375	1.512,5	1.663,7		
Penataan Perumahan,Pemukiman dn Kawasan Sentra Produksi															
Penyedian Prasarana dan Sarana Air Bersih	Penyedian Air Bersih Prioritas Penangulangan Kemiskinan bagi Daerah Pedesaan dan Perkotaan								5588,2						DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015															
Indikator MDGs	7.7 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 7.7a Perkotaan 7.7b Perdesaan 7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan 7.8a Perkotaan 7.8b Perdesaan														
PROVINSI BANTEN															
Program penataan perumahan,pemukiman dan kawasan sentra Produksi	Rasio keterbatasan air bersih dan sanitasi di WKP I,II dan III														
1. Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih	Tersedianya prasarana dan sarana air bersih prioritas penanggulangan kemiskinan bagi daeah pedesaan dan perkotaan di 8 Kab/kota (kegiatan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16.139,4	17.977,1	187.559,9	20.602,1	24.000	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
	1. Penyedian Air Bersih Prioritas Penanggulangan Kemiskinan bagi Daerah Pedesaan dan Perkotaan (Unit)														
	-Kabupaten Serang		6,00	20,00		5,00			1.787,6		750,4				
	-Kota Serang		4,00	10,00		5,00			893,4		750,4				
	-Kota Cilegon				10,00					1.801,0					
	-Kabupaten Pandeglang		10,00	15,00		5,00	10,00	10,00	1.348		750,4	1.801,0	2,000		
	-Kabupaten Lebak		10,00	20,00		5,00	10,00	10,00	1.790,7		750,4	1.801,0	2,000		
	-Kabupaten Tangerang				10,00	20,00				1.072,0	3.001,8				
	-Kota Tangerang				10,00	20,00				1.072,0	3.001,8				
	-Kota Tangerang Selatan		10,00	5,00	10,00	5,00			468,5	1.072,0	750,4				
	2. Terbentuknya Pembuatan Sumur bor Produksi bagi masyarakat di kab/kota Provinsi Banten (Ls)														
	-Kabupaten Serang	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	768,5	922,2		1.750,0	2,000		
	-Kota Serang				1,00		1,00	1,00		922,2		1.750,0	2,000		
	-Kabupaten Pandeglang	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		922,2	1.500	1.750,0	2,000		
	-Kabupaten Lebak				1,00	1,00	1,00	1,00		922,2	1.500	1.750,0	2,000		
	3. Terbangunnya bronchapt,reservoir dan perpipaan di Kab/Kota Provinsi Banten														
	- Kabupaten Serang				1,00					500					

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	- Kabupaten Pandeglang	1,00	3,00	2,00	4,00		4,00		774,2	1.500		2,000			
	- Kabupaten Lebak	1,00		4,00	1,00			2,00	1.472,5	500		2,000	1.000		
	- Kota Tangerang Selatan				4,00			2,00		1.500			1.000		
	4. Terbangunnya Pemasangan Pipa Jaringan Transmisi dan Distribusi Air Bersih (Pipa 6,4.3 dan 2) (Ls)	1.500													
	- Kabupaten Serang		1,00	4,00			1,00	1,00	3.839,3			2,000	2,000		
	- Kota Serang			1,00			1,00	1,00	1.016,4				2,000		
	- Kota Cilegon				1,00					2,000	2,000				
	- Kabupaten Pandeglang		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	907,4	2,000	2,000	2,000	2,000		
	- Kabupaten Lebak	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1.072,7		2,000	2,000	2,000		
	- Kabupaten Tangerang				1,00		1,00	1,00		2,000			2,000		
Program Pengembangan Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Air	Rasio Peningkatan Perlindungan sumber-sumber air di WKP I, II dan III														
1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan Bangunan Penampung Air lainnya	Terehabilitasinya embung/situ untuk berbagai keperluan sebagai usaha konservasi air dan sumber air (Ha)	1,00	1.50		5,00	6,00	6,00	8,10		6.000	8.000	8.500	9.000	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
	- Rehabilitasi Bendung Sarakan (keg.)														
	- Rehabilitasi Rawa Arum (17 Ha)				5	6,00	6,00			6.000	8.000	8.500			
	- Rehabilitasi Situ Ciwaka dan bangunan Penunjang (4.5 Ha)	1,00	1.50												
	- Rehabilitasi Situ Ciledug (14.1 Ha)							8,10					9.000		
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan Tanggul Sungai	Meningkatkan kapasitas tampung sungai :	1,22	1,02	1,05	3,00	4,00	4,00	4,00	18.650	1.300	20.300		20.000	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
	a. Kabupaten Lebak														
	- Sudetan Sungai Cibinuangeun 92,9 km)	1,07	1,02	0,22					4.152,7						
	b. Kabupaten Pandeglang														

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	- Normalisasi Sungai Cilemer (42.8)	0,15		0,60	2,00	2,00	2,00		12.500	9.000	9.900	10.890			
	- Normalisasi Sungai Ciliman (55 km)					1,00	1,00	2,00			6.000	6.000	10.000		
	c. Kabupaten /Kota Serang														
	- Normalisasi Sungai Cibanten (32 km)				1,00	1,00	1,00	2,00		4.000	4.400	4.840	10.000		
	d. Kota Tangerang														
	- Normalisasi Sungai Sabi			0,23					1.997,3						
3. Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan infrastruktur Sumber Daya Air di (kegiatan)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	10.666,8	11.332,4	12.465,7	13.712,3	15.083,5	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
	a. Wilayah SungaiCidurian - Cisadane	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.378,7	5.000	55.000	6.050	6.655		
	b. Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.788,0	3.832,4	4.215,7	4.637,3	5.101		
	c. Wialyah sungai Ciujung-Cidanau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.500	2.500	2.750	3.025	3.327,5		
4. Pengendalian banjir pada Daerah tangkapan air dan Badan - Bandan Sungai	Tersedianya data hidrometri,kualitasair dan curah hujan (kegiatan)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2.840,3	3.300	3.630	3.993	4.392,3	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
	a. Wilayah Sungai Cidurian -Cisadane	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000	1.200	1.320	1.452	1.597,2		
	b. Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	650	850	935	1.028,5	1.131,3		
	c. Wialyah sungai Ciujung-Cidanau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.190,3	1.250	1.375	1.512,5	1.663,7		
Penataan Perumahan,Pemukiman dn Kawasan Sentra Produksi															
Penyedian Prasarana dan Sarana Air Bersih	Penyedian Air Bersih Prioritas Penangulangan Kemiskinan bagi Daerah Pedesaan dan Perkotaan								5588,2						DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan	**1. Persentase penduduk yang memiliki akses**														
	Provinsi Banten			62,5	63	63,5	67	70	490	6887,4	7280,8	8474,5	9660,8	APBN & APBD	Dinas Kesehatan Provinsi
	1. Kabupaten Serang			62,5	63	63,5	67	70	1600	1935	2260	2585	2910	APBD	
	2. Kabupten Tangerang			62,5	63	63,5	67	70	655,9	759,2	802,8	846,4	890	APBD	
	3. Kabupaten Pandeglang			62,5	63	63,5	67	70	25,4	124,1	133,5	143,1	152,6	APBD	
	4. Kabupaten Lebak			62,5	63	63,5	67	70	4235	5005	5766	6540	7303	APBD	
	5. Kota Serang			62,5	63	63,5	67	70	1642,7	705	707	708	709	APBD	
	6. Kota Tangerang			62,5	63	63,5	67	70	137,1	79,5	95,4	111,7	127,2	APBD	
	7. Kota Cilegon			62,5	63	63,5	67	70	31,3	313,8	576,3	838,8	1101,3	APBD	
	8. Kota Tangerang Selatan			62,5	63	63,5	67	70	160	294,2	393,5	472,8	577,1	APBD	
Sub kegiatan 1a. Pembangunan sarana air	Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun														

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
minum berkualitas	Provinsi Banten			62	52	58	64	70	6600	7196	8500	9900	11641	APBN APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			25	30	35	40	45	1500	1800	2100	2400	2700	APBD	Dinkes & Setda
	2. Kabupten Tangerang			214	230	245	260	275	266,9	285,2	303,8	322,4	341	APBD	Cipta Karya
	3. Kabupaten Pandeglang			-	14	15	16	17	-	96	102,7	109,6	116,4	APBD	Cipta Karya
	4. Kabupaten Lebak			16	19	22	25	28	4000	4750	5500	6250	7000	APBN & APBD	PU
	5. Kota Serang			50	55	60	65	70	1000	100	100	100	100	APBD	PU
	6. Kota Tangerang			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	PU
	7. Kota Cilegon			-	5	10	15	20	-	250	500	750	1000	APBD	PU
	8. Kota Tangerang Selatan			7	14	21	28	35	100	200	300	400	500	APBD	Tata Kota
Sub Kegiatan 1 b : Inspeksi sanitasi sarana air minum	Cakupan sarana air minum yang dilakukan inspeksi sanitasi														
	Provinsi Banten			11,625	11,9375	14,125	13,9375	17	1143,3	1134,5	1213,4	1304,7	1384,2	APBN & APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			5	7,5	10	12,5	15	50	75	100	125	150	APBD	Dinkes
	2. Kabupten Tangerang			5	6	7	8	9	125	150	175	200	225	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			2	3	4	5	6	5,4	8,1	10,8	13,5	16,2	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			63	64	65	67	70	205	225	236	260	273	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			2	3	4	5	6	603	605	607	608	609	APBD	Dinkes
	6. Kota Tangerang			4	5	6	7	8	63,6	79,5	95,4	111,7	127,2	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			5	7	9	11	13	31,3	43,8	56,3	68,8	81,3	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			7	7,5	8	8,5	9	60	64,2	68,5	72,8	77,1	APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1c. Advokasi penyediaan air minum berkualitas	Presentasi desa yang di advokasi														
	Provinsi Banten			60	70	80	90	100	350	450	550	650	750	APBN & APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			20	20	20	20	20	60	60	60	60	60	APBD	Dinkes
	2. Kabupten Tangerang			8	10	10	10	10	264	324	324	324	324	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			100	-	-	-	-	39,7	-	-	-	-	APBD	Dinkes
	6. Kota Tangerang			100	-	-	-	-	73,5	-	-	-	-	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			-	25	25	25	25	-	20	20	20	20	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			-	55	45	-	-	-	30	25	-	-	APBD	Dinkes
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan	**2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat**														
	Provinsi Banten			90	95	100	100	100	1433,5	11153,9	20878,7	31056,7	41246,3	APBN & APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			90	95	100	100	100	110	1372	2634	3896	5158	APBD	Dinkes
	2. Kabupten Tangerang			90	95	100	100	100	920	1790	2640	3890	5140	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			90	95	100	100	100	-	1268,6	2527,8	3786,2	5044,7	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			90	95	100	100	100	112	1372,4	2654,8	3968,7	5252	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			90	95	100	100	100	156	1434	2732	4055	5412	APBD	Dinkes
	6. Kota Tangerang			90	95	100	100	100	74	1335,7	2596,5	3857,2	5118	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			90	95	100	100	100	28	1288,2	2542,7	3795,6	5049	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			90	95	100	100	100	33,5	1293	2550,9	3808	5072,6	APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1a. Pengawasan kualitas air minum perpipaan.	Persentase Sampel air minum pada jaringan perpipaan yang memenuhi syarat.air minum														
	Provinsi Banten			45,6	66,5	73,5	81,875	89,625	156	181	190	199	344	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	1. Kabupaten Serang			90	91	92	93	94	50	55	60	65	70	APBD	Dinkes
	2. Kabupten Tangerang			-	90	92	95	98	-	70	70	70	70	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			-	25	50	75	100	-	4,8	9,5	14,2	19	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			32	35	45	65	75	50	54,6	70,2	101,4	117	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			10	20	30	40	50	52	56	60	64	68	APBD& APBN	Dinkes
	6. Kota Tangerang			92,5	94	96	98	100	4	4,1	4,2	4,3	4,4	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			-	80	85	90	100	-	6,7	7,1	7,5	8,3	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			96	97	98	99	100	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	APBD	Dinkes
	Persentase Sampel Air Minum Non Perpipaan yang meme-nuhi syarat.														
	Provinsi Banten			45,57143	48,625	55,875	63,375	70,625	364	297,4	347,2	442,4	561	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			30	35	40	45	50	50	55	60	65	70	APBD	Dinkes
	2. Kabupten Tangerang			60	62	65	67	70	70	70	70	70	70	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			-	25	30	35	40	-	4,8	5,7	6,7	7,7	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			32	35	45	65	75	50	54,6	70,2	101,4	117	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			10	20	30	40	50	94	113	147	206	304	APBD	Dinkes
	6. Kota Tangerang			60	70	80	90	100	58	67,6	77,3	86,9	96,6	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			55	60	70	75	80	17	18,5	21,6	23,1	24,7	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			72	82	87	90	100	25	28,4	30,2	31,2	34,7	APBD	Dinkes
	Persentase Sampel air minum dari Depot Air Minum yang memenuhi syarat.														
	Provinsi Banten			70,28571	72,5	78,75	85,125	93	85	103	116	138	196	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			95	96	97	98	99	10	12	14	16	18	APBD	Dinkes
	2. Kabupten Tangerang			60	70	75	80	85	24	28	30	32	34	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			-	50	70	85	100	-	9	12,6	15,3	18	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			40	44	48	53	60	12	13,2	14,4	15,9	18	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			80	85	90	95	100	10	15	25	35	40	APBD I	Dinkes
	6. Kota Tangerang			72	80	85	90	100	12	14	15	16	17	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			70	75	80	90	100	11	13	14	15	16	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			75	80	85	90	100	6	12	18	24	35	APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1b. Penyediaan water test kita untuk setiap puskesmas.	Jumlah puskesmas yang memiliki water test kit														
	Provinsi Banten			17	29,125	56,25	84,375	112,5	850	10400	22500	33750	45000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			-	25	50	75	100	-	1250	2500	3750	5000	APBD	Dinkes
	2. Kabupten Tangerang			17	33	50	75	100	850	1650	2500	3750	5000	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			-	25	50	75	100			2500	3750	5000	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			-	25	50	75	100	-	1250	2500	3750	5000	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			-	25	50	75	100	-	1250	2500	3750	5000	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			-	25	50	75	100	-	1250	2500	3750	5000	APBD	Dinkes
	6. Kota Tangerang			-	25	50	75	100	-	1250	2500	3750	5000	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			-	25	50	75	100	-	1250	2500	3750	5000	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			-	25	50	75	100	-	1250	2500	3750	5000	APBD	Dinkes
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan	**3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat**														
	Provinsi Banten			67	69	72	75	100	1680	2070	2360	2630	640	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			67	69	72	75	100	20	80	140	200	260	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
	2. Kabupten Tangerang			67	69	72	75	100	160	160	160	160	160	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			67	69	72	75	100	-	10	20	30	40	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			67	69	72	75	100	-	40	60	80	100	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			67	69	72	75	100	-	20	20	20	20	APBD	Dinkes
	6. Kota Tangerang			67	69	72	75	100	1500	1700	1900	2080	-	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			67	69	72	75	100	-	40	40	40	40	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			67	69	72	75	100	-	20	20	20	20	APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1a. Advokasi dan kampanye STOP BABS (buang air besar sembarangan)	jumlah desa yang mendeklarasi STOP BABS														
	Provinsi Banten			70	32	37	43	34	1680	2070	2360	2630	640	APBN & APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			5	20	35	50	65	20	80	140	200	260	APBD	Dinkes
	2. Kabupaten Tangerang			132	148	164	180	196	160	160	160	160	160	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			-	1	2	3	4	-	10	20	30	40	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			-	2	3	4	5	-	40	60	80	100	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			-	1	1	1	1	-	20	20	20	20	**APBD II**	Dinkes
	6. Kota Tangerang			75	85	95	104	-	1500	1700	1900	2080	-	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			-	2	2	2	2	-	40	40	40	40	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			-	1	1	1	1	-	20	20	20	20	APBD	Dinkes
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan	**4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**														
	Provinsi Banten			68	63	74	86	98	3825	4290	4830	5495	2860	APBN & APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			115	165	215	265	314	300	350	400	425	450	APBD	Dinkes
	2. Kabupten Tangerang			132	148	164	180	196	160	160	160	160	160	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			-	2	4	6	8	-	30	60	90	120	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			50	55	60	70	75	125	135	140	145	150	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			-	1	2	3	4	-	15	20	25	30	APBD	Dinkes
	6. Kota Tangerang			75	85	95	104	-	2250	2550	2850	3120	-	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			8	10	14	16	40	90	112,5	157,5	180	450	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			30	35	40	45	50	900	1050	1200	1350	1500	APBD	Dinkes
Sub kegiatan 1a. Advokasi pelaksanaan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)	Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)														
	Provinsi Banten			68	63	74	86	98	875	992	1116	1240	1364	APBN & APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
	1. Kabupaten Serang			115	165	215	265	314	300	350	400	425	450	APBD	Dinkes
	2. Kabupten Tangerang			132	148	164	180	196	160	160	160	160	160	APBD	Dinkes
	3. Kabupaten Pandeglang			-	2	4	6	8	-	30	60	90	120	APBD	Dinkes
	4. Kabupaten Lebak			50	55	60	70	75	125	135	140	145	150	APBD	Dinkes
	5. Kota Serang			-	1	2	3	4	-	15	20	25	30	APBD	Dinkes
	6. Kota Tangerang			75	85	95	104	-	2250	2550	2850	3120	-	APBD	Dinkes
	7. Kota Cilegon			8	10	14	16	40	90	112,5	157,5	180	450	APBD	Dinkes
	8. Kota Tangerang Selatan			30	35	40	45	50	900	1050	1200	1350	1500	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin dipermukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020															
NASIONAL															
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman															
Pengaturan, Pembinaan,Pengawasn,Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi,serta Pengelolaanpengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	Pemabangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sisitem off site dan on-site (kab/kota)			93 kawasan	11 kab/kota sistem off-site;40 kab/kota sistem on-site	11 kab/kota sistemoff-site;50 kab/kota sistem on-site	11 kab/kota sistem off-site;55 kab/kota sistem on-site		953,2	1.076,0	957,0	1.672,0			Kemen PU
Program pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman															
Pengaturan,Pembinaan,Penghawasan,Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi,serta Pengembangan Sistem penyediaan Air minum	Jumlah desa,kawasan MBR perkotaan,IKK,dan kawasn khusus)pemekaran,pulau terluar,Pembatasan,terpencil,dan KAPET) yang terfasilitasi		500 desa 100 kawasan MBR perkotaan 160 IKK 23 kawasan khusus 10 kawasan pelabuhan perikanan	1.283 desa 81 kawasan MBR 170 IKK 23 kawasan khususn10 pelabuhan perikanan	700 desa 140 kawasan MBR perkotaan 175 IKK 20 kawasan khusus 10 kawasan pelabuhab perikanan	813 desa 173 kawan MBR perkotaan 187 IKK22 kawasan khusus 10 kawasan pelabuhan perikanan			2.855,7	1.880,0	2.304,0	3.147,0			Kemen PU
PROVINSI BANTEN															
Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan															
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan	1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas			62,5	63	63,5	67	-	373	379	447	499	-	APBN	Kementerian Kesehatan
	2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat			90	95	100	100	-							
	s			67	69	72	75	-							
	4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			5.500	11.000	16.000	20.000	-							
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan	1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas			63	63	64	67	70	900	1.150	1.400	1.650	2.000	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
Sub kegiatan 1a. Pembangunan sarana air minum berkualitas	Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun			4	5	6	7	9	250	350	450	550	750	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
Sub Kegiatan 1 b : Inspeksi sanitasi sarana air minum	Cakupan sarana air minum yang dilakukan inspeksi sanitasi			65	75	85	90	100	300	350	400	450	500	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin

Program/ Kegiatan	Indikator	Baseline		Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pendanaan	Pelaksana
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
Sub kegiatan 1c. Advokasi penyediaan air minum berkualitas	Presentasi desa yang di advokasi			60	70	80	90	100	350	450	550	650	750	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan	2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat			58	64	70	76	82	800	833	910	988	1068	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
Sub kegiatan 1a. Pengawasan kualitas air minum perpipaan.	Persentase Sampel air minum pada jaringan perpipaan yang memenuhi syarat air minum			65	70	75	80	85	300	400	500	600	700	APBN/APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
	Persentase Sampel Air Minum Non Perpipaan yang meme-nuhi syarat.			57	60	63	66	70	350	450	550	650	750	APBN/APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
	Persentase Sampel air minum dari Depot Air Minum yang memenuhi syarat.			50	55	70	85	100	150	200	250	350	450	APBN/APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
Sub kegiatan 1b. Penyediaan water test kita untuk setiap puskesmas.	Jumlah puskesmas yang memiliki water test kit			-	8	16	24	30	-	400	800	1200	1500	APBN/APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan	3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat			68	70	72	75	80	0	800	1600	3200	6900	APBN/APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
Sub kegiatan 1a. Advokasi dan kampanye STOP BABS (buang air besar sembarangan)	jumlah desa yang mendeklarasi STOP BABS			-	8	16	32	64	-	800	1600	3200	6900	APBN/APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan	4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			24	30	36	42	48	750	930	1116	1302	1488	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin
Sub kegiatan 1a. Advokasi pelaksanaan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat)	Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			24	30	36	42	48	750	930	1116	1302	1488	APBN / APBD Provinsi Banten	Subbid Kesling & Makmin

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH